

## Jawaban 32 butir Pertanyaan Komisi Informasi

### 1. Profil:

1. Informasi tentang badan publik:

Nama : Biro Organisasi Sekretariat daerah Prov. Sumbar

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang

Kode Pos :

Alamat email : <http://www.sumbarprov.go.id>. E-mail:pdeisb@sumbar.

Keterangan : foto tersedia.

2. Visi Biro Organisasi: Mewujudkan Organisasi Pemerintah Daerah yang berkualitas.

Misi”

a. Mengoptimalkan penataan kelembagaan

b. Mewujudkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dengan prosedur kerja yang terstandar dalam meningkatkan pelayanan Prima yang akurat dan tepat waktu.

c. Mewujudkan akuntabilitas kinerja insatnasi pemerintah daerah yang akurat dan tepat waktu

d. Mewujudkan SDM Aparatur yang berkompotensi dan berkarier

e. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Prov. Sumbar

Keterangan : foto tersedia

3. Tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi

Keterangan foto pdf : Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah provinsi sumatera barat

4. Struktur organisasi : foto pdf : Pergub Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat daerah provinsi sumatera barat

5. Informasi tentang badan publik:

Nama : Biro Organisasi Sekretariat daerah Prov. Sumbar

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang

Kode Pos :

Alamat email : <http://www.sumbarprov.go.id>. E-mail:pdeisb@sumbar.

Keterangan : foto tersedia.

### 2. Informasi yang berkaitan dengan Profil Biro Organisasi:

Keterangan : foto tersedia.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 31401 – 31402 – 34425 Padang  
<http://www.sumbar.go.id>. E-mail: pdsiesb@sumbar.go.id

Padang, 4 Maret 2020

Nomor : 065/619/ Org-2020

Lampiran : -

Perihal : Permintaan username dan password id  
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik  
(Sinovik).

Kepada Yth :

Ibu Deputi Bidang Pelayanan Publik  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi RI  
di –  
JAKARTA.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui website [www.sinovik.menpan.go.id](http://www.sinovik.menpan.go.id), bersama ini kami mohon bantuan **username** dan **password id** untuk login pada sinovik tersebut dapat dikirimkan ke alamat email **tatalaksanabiroorganisasiprov@gmail.com**

Sebagai Admin sinovik pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Sdr. **Igusti Firmansyah**, Nomor HP 08116606748.

Demikian disampaikan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA,

**Drs. H. NASIR AHMAD, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610929 198211 1 001

## Daftar Nominasi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. BPJS Kesehatan
7. Pemerintah Kota Semarang
8. Pemerintah Kota Banjarmasin
9. Pemerintah Kota Cirebon
10. Pemerintah Kota Bandung
- 11. Pemerintah Kota Solok**
12. Pemerintah Kota Medan
13. Pemerintah Kota Banjar Baru
14. Pemerintah Kota Sukabumi
15. Pemerintah Kota Ambon
16. Pemerintah Kota Malang
17. Pemerintah Kab. Bojonegoro
18. Pemerintah Kab. Banyuwangi
19. Pemerintah Kab. Bulukumba
20. Pemerintah Kab. Kendal
21. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
22. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
23. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta
24. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
25. PT Pos Indonesia (Persero)

DAFTAR : EVALUASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 PADA UNIT  
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Pemda Kabupaten/Kota	Tanggal	Nama tim evaluator
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Solok	1 Juli 2019	- Irwan, S.Sos,MM - Drs.Yastri Alphian - Muzirwan
2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu	Kabupaten Solok	1 Juli 2019	- Irwan,S.Sos,MM - Drs.Yastri Alphian - Muzirwan
3	RSUD Arosuka	Kabupaten Solok	2 Juli 2019	- Irwan,S.Sos,MM - Drs.Yastri Alphian - Muzirwan
4	Polres Kabupaten Solok	Polri	2 Juli 2019	- Irwan,S.Sos,MM - Drs.Yastri Alphian - Muzirwan
5	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu	Kota Solok	4 Juli 2019	-Muzirwan, SH -Igusti Firmansyah, S.Sos,M.AP
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Solok	5 Juli 2019	-Muzirwan, SH -Igusti Firmansyah, S.Sos,M.AP
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Padang Panjang	8 Juli 2019	-Irwan,S.Sos,MM -Igusti Firmansyah, S.Sos,MAP.
8	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu	Kota Padang Panjang	8 Juli 2019	-Irwan,S.Sos,MM -Igusti Firmansyah, S.Sos,M.AP
9	RSUD Padang Panjang	Kota Padang Panjang	9 Juli 2019	-Irwan,S.Sos,MM -Igusti Firmansyah, S.Sos,M.AP
10	Polresta Padang Panjang	Polri	10 Juli 2019	-Irwan,S.Sos,MM -Igusti Firmansyah, S.Sos,M.AP
11	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Tanah Datar	15 Juli 2019	- Drs.Yastri Alphian - Muzirwan, SH
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kab. Tanah Datar	16 Juli 2019	- Drs.Yastri Alphian - Muzirwan, SH
13	Polres Tanah Datar	Polri	17 Juli 2019	- Drs.Yastri Alphian - Muzirwan, SH
14	RSUD Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman	25 Juli 2019	- Irwan , S.Sos,MM - Muzirwan, SH
15	Polres Padang Pariaman	Polres	25 Juli 2019	- Irwan , S.Sos,MM - Muzirwan, SH
16	RSUD dr.Adnaan WD	Kota Payakumbuh	2 Agustus 2019	- Drs. Yastri Alphian - Igusti Firmansyah, S.Sos,M.AP
17	Polres Payakumbuh	Polri	2 Agustus 2019	- Drs. Yastri Alphian -Igusti Firmansyah, S.Sos,M.AP

Padang, 1 Juli 2019

KEPALA BIRO ORGANISASI

**IRWAN, S.Sos,MM**  
NIP.19680415 198902 1 001

## PENYERAHAN HASIL EVALUASI PELAYANAN PUBLIK 2019

(BATAM – 7 November 2019)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan hasil evaluasi pelayanan publik kepada pemerintah daerah di wilayah I. Tahun 2019, ada 80 kabupaten/kota dan 11 provinsi yang pelayanan publiknya dievaluasi oleh Kementerian PANRB. Jumlah tersebut bertambah dari tahun lalu, yakni 71 kabupaten/kota. Sembilan kabupaten/kota yang baru pertama kali dievaluasi adalah Kabupaten Aceh Besar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Merangin, Kota Prabumulih, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cilegon. Penyerahan hasil evaluasi itu diberikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada unit penyelenggara pelayanan yang meraih predikat A dan A-, di Batam, Kamis (07/11). Perlu diketahui, pmda wilayah I meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Jawa Barat, dan Banten. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, fokus evaluasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten/kota masih tetap, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sementara fokus evaluasi dan pemantauan pada pemerintah provinsi adalah Kantor DPM-PTSP Provinsi, RSUD Provinsi, dan UPTD Samsat.

Enam aspek yang dinilai dalam evaluasi itu, adalah profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, serta inovasi. Berdasarkan hasil evaluasi, maka perolehan Indeks Pelayanan Publik (IPP) secara keseluruhan lingkup wilayah I adalah sebesar 3,36 atau tergolong kedalam predikat B-. Jika dibanding dengan tahun 2018, maka capaian IPP ini meningkat, dimana pada tahun 2018 capaian IPP adalah 3,05. "Secara kualitas dan rerata menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cukup baik secara regional," ungkap Diah.



Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, fokus evaluasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten/kota masih tetap, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sementara fokus evaluasi dan pemantauan pada pemerintah provinsi adalah Kantor DPM-PTSP Provinsi, RSUD Provinsi, dan UPTD Samsat. Enam aspek yang dinilai dalam evaluasi itu, adalah profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, serta inovasi. Berdasarkan hasil evaluasi, maka perolehan Indeks Pelayanan Publik (IPP) secara keseluruhan lingkup wilayah I adalah sebesar 3,36 atau tergolong kedalam predikat B-. Jika dibanding dengan tahun 2018, maka capaian IPP ini meningkat, dimana pada tahun 2018 capaian IPP adalah 3,05. "Secara kualitas dan rerata menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cukup baik secara regional," ungkap Diah.

Menteri PANRB juga menyampaikan penghargaan secara khusus kepada dua kepala daerah sebagai Pembina Pelayanan Publik yang berhasil meraih predikat Sangat Baik, dimana ketiga Unit Penyelenggara Pelayanan berkategori A dan A-. Dengan diterimanya piagam penghargaan hasil evaluasi ini diharapkan agar masing-masing Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat memperbaiki pelayanannya menuju pelayanan prima sebagai *role model*.

Pada acara ini, dihadirkan tiga narasumber untuk berbagi pengalaman dalam meningkatkan pelayanan publik yakni Dekan FIA UI Eko Prasajo, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. (*don/HUMAS MENPANRB*)

**Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima :**

1. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
2. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau
3. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bogor
4. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pekanbaru
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

**Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Sangat Baik :**

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
7. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
8. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah kab.Padang Pariaman
9. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Siak
10. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Tebing Tinggi
11. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh
12. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Jambi
13. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palembang
14. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bandung
15. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi
16. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor
17. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang
18. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
19. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
20. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
21. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun
22. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi banyuasin
23. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka
24. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bogor
25. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Cimahi
26. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang
27. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Tangerang
28. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi

**Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik :**

- a. Walikota Bandung
- b. Walikota Bogor

## Daftar Kepatuhan Standar Pelayanan Kabupaten/kota se Sumbar Ombudsman RI

- Provinsi Sumatera Barat skor **87,96 = tahun 2016**

✓ Kabupaten/ Kota se Sumbar :

Pasaman Barat,	skor 98,88	= tahun 2018
Payakumbuh	94,04	= tahun 2017
Kota Sawahlunto	93,97	= tahun 2018
Pesisir Selatan	93,09	= tahun 2018
Padang Panjang	92,33	= tahun 2017
Padang	92,27	= tahun 2016
Padang Pariaman	90,91	= tahun 2018
Tanah Datar	90,61	= tahun 2016
Agam	87,96	= tahun 2017
Bukittinggi	85,65	= tahun 2018
Pariaman	84,20	= tahun 2018
Pasaman	82,87	= tahun 2018
Sijunjung	82,29	= tahun 2018
Kota Solok	81,90	= tahun 2018

### Penilaian tahun 2019 :

1. Kab. Lima Puluh Kota , Zona Kuning
2. **Kab. Solok,** **Zona Merah**
3. Kab. Dharmasraya Zona Kuning
4. Kab. Kepulauan Mentawai **Zona Merah**
5. Kab. Solok Selatan **Zona Merah**

Evaluasi /penilaian dilakukan pada bulan Mei – Juni 2019

Padang, Maret 2020

KEPALA BIRO ORGANISASI,

**AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19730524 199303 1 003

3. a. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja

*Keterangan : file tentang RKA dan DPA Tahun 2019*

b. Agenda Biro Organisasi:

- Evaluasi pelayanan publik pada 5 Kabupaten/kota se Sumbar
- Penyerahan hadiah kompetisi pelayanan prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Sumbar
- Forkompanda Kabupaten/ Kota se Sumbar
- Persiapan evaluasi LAKIP Tahun 2019 oleh Tim Assesmen Kemenpan RB
- Tindak lanjut percepatan Reformasi Birokrasi Pemprov. Sumbar
- Pembahasan ranperda SOTK 6 OPD yang dari Tipe B ke A

c. Hak –hak masyarakat sesuai dengan Perda Nomor 6 tahun 2005 dan Pergub Nor 62 Tahun 2016

d. Penerimaan Pegawai pada BKD

e. Rencana kerja dan capaian kinerja tahun 2018. LKPI Tahun 2018.

4. Laporan arus Kas tahun 2019 , terlampir

- Catatan laporan keuangan tahun 2019
- Daftar asset selama tahun 2019
- RKA Tahun 2019

5. Tidak ada permohonan dan keberatan informasi:

6. Tata cara permohonan informasi berdasarkan Pergub Nomor 62 Tahun 2016.

7. S.d.a., terlampir foto yang ada pada Biro Organisasi

8. Informasi mengenai pengadaan barang dan jasa

9. Rancangan Pergub dan Keputusan Gubernur. Terlampir

10. DIP dikelola oleh Kominfo Prov. Sumbar

11. Dokumen tentang Keputusan Gubernur dan Pergub semenjak tahun 2012-2019  
Dokumen pendukung tentang pembuatan perda SOTK dan Yanlik.

12. Dokumen antara kerjasama dengan interaksi dengan Pihak Ketiga, SOP

13. Profil pegawai tahun 2019 SUK

14. Tidak Ada data Statistik

15. Laporan arus kas dan catatan laporan keuangan,  
Laporan asset kantor

16. Dokumen Renstra

17. SOP dan SP sektor pelayanan publik

18. SOP Informasi Pelayanan Publik

19. Sarana prasarana pelayanan publik,

20. Kegiatan pelayanan publik selama tahun 2019

21. Renstra dan Rencana kerja

22. Laporan pengaduan masyarakat menggunakan LAPOR!-SP4N

23. Situasi di loket pengaduan layanan informasi

24. Formulir pendaftaran,

==



## KRONOLOGIS PEMBENTUKKAN UPTD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah pada pasal , perlu kiranya dibentuk UPTD.

Dengan adanya ke 2 regulasi tersebut maka Pergub Prov. Sumbar Nomor 76/ 2012 tentang pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta turunannya , perlu dirubah dan direvisi sesuai dengan UU Nomor 23/ 2014 dan PP Nomor 18/ 2016 tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Gubernur Sumbar Nomor 061/1737 / Org-2017 tanggal 5 September 2017 perihal Mohon fasilitasi Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana diusulkan sebanyak 90 (sembilan puluh) buah UPTD untuk disahkan sebagai UPTD/UPTB di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud telah diterima pada Subag Persurat Penggandaan dan Ekspedisi Setjen Kemendagri tertanggal 10 Oktober 2017 lalu

Namun sampai saat ini belum ada/ sampai jawaban dari Biro Organisasi Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, dan kita masih menunggu surat jawaban tersebut. Apabila jawaban dari Kemendagri turun nantinya maka akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumbar.

Pada saat bersamaan, untuk mewujudkan amanat pasal Permendagri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah, juga perlu dibentuk Cabang Dinas. Terminologi antara Cabang Dinas berbeda dengan UPTD.

Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan **menengah**, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.

Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

Pembentukan Cabang Dinas dari UPTD sebagai perpanjangan dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.

Sampai saat ini baru sektor Kehutanan yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri karena merupakan pilot project Kemendagri, hanya berbentuk UPTD yakni Kawasan Kehutanan. Sedangkan Cabang Dinas Pendidikan yang telah disetujui berdasarkan Surat Mendagri Nomor 060/7601/ Otda- 2017 tertanggal 26 September 2017 adalah :

1. Cabang Dinas

2. Cabang Dinas
3. Cabang Dinas
4. Cabang Dinas
5. Cabang Dinas
6. Cabang Dinas
7. Cabang Dinas
8. Cabang Dinas

Sedangkan cabang dinas kelautan dan perikanan tidak ada hanya berbentuk UPTD, begitu juga untuk sektor energi sumber daya mineral , hanya berbentuk

Masalahnya, terkait pembentukan Cabang Dinas dari UPTD sebagai perpanjangan dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.

**Pergub Prov. Sumbar NOMOR 76/ 2012**



## NOTA DINAS

Kepada : Kepala Biro Pemerintahan  
Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 065/ / Org-2019  
Tanggal : 20 Juli 2019  
Tembusan : Yth. Asisten Pemerintahan  
Perihal : Usulan untuk memasukkan materi LAPOR!-SP4N pada acara FORKOMPIMDA.

---

Dengan hormat,

Bersama ini disam

- a. Bahwa sampai saat ini Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain yang menjadi dasar pembentukan SOTK Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Barat telah dicabut berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, dan saat ini masih menunggu Keppres tentang Pembentukan kembali Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Prov. Sumbar. Sejalan dengan itu Korpri Unit Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga ikut bubar, sehingga seluruh kegiatan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa sampai saat ini Bendaharawan Gaji Kantor Gubernur masih tetap melakukan pemotongan gaji untuk iuran Korpri, yakni Rp.5.000,- untuk golongan I dan II, Rp. 10.000,- golongan III, dan Rp. 20.000,- golongan IV, dimana dana iuran Anggota tersebut utuh tersimpan di Bank Nagari Capem Kantor Gubernur, dan yang bisa mencairkan dana iuran Peserta adalah Ketua lama Bapak H.Sudirman Gani, SH,MH dan Bendahara lama , Aswia Alwi, SE.
- c. Seiring adanya keinginan dari PNS yang ingin mencairkan dana iuran Anggota Korpri yang tersimpan di Bank Nagari Capem Kantor Gubernur untuk membeli baju Seragam Olah Raga, perlu kiranya dilakukan **penyisipan** Pengurus Inti yang akan mencairkan dana dimaksud. Hal ini terkait Surat Nomor 01/Ist/Korpri Unit-2018 tanggal 29 Februari 2018 dari Ketua Korpri Unit Setda. Prov. Sumbar (terlampir), yang menyarankan agar dilakukan pembentukan Pengurus Korpri Unit Setda yang tidak lagi aktif, yakni Ketua H. Sudirman Gani, SH, Sekretaris Drs.Mulyadi, MM dan Bendahara , Aswia Alwi, SE
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, sekiranya Bapak setuju disarankan kepada Bapak agar diadakan rapat penyisipan kepengurusan dimaksud pada hari Rabu tanggal 4 April 2018.

Skenarionya, sebagai berikut: Ketua Bapak Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Ibu Dra. Reni Delafina dan Bendahara Despri Pricillia. Sedangkan undangan untuk Peserta Rapat langsung ditandatangani Bapak Sekda Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Barat .Terlampir daftar undangan. Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan petunjuk Bapak selanjutnya.

Kepala Biro Organisasi,

**IRWAN, S.Sos, MM**  
NIP. 19680415 198902 1 001

Sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/92/PP.03/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang tindaklanjut pemantauan SP4N-LAPOR!, dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor B/92/PP.03/2019 tanggal 12 Mei 2019 tentang Tindak lanjut Pemantauan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Plattform Nasional aplikasi LAPOR!, bersama ini disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengirimkan surat kepada Bupati/Walikota se Sumatera Barat untuk menindaklanjuti laporan pengelolaan SP4N-LAPOR Tahun 2018 yang belum diselesaikan, dan bersama ini kami sampaikan tindaklanjut pengelola SP4N-LAPOR! 2018 Kabupaten /Kota se Sumatera Barat.

Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. ALWIS**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610303 198210 1 002

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Dari : Kepala Biro Organisasi  
Nomor : 065/ / Org-2018  
Tanggal : 20 Maret 2018  
Tembusan : Yth. Bapak Asisten Administrasi Umum  
Perihal : **Saran dan usulan rapat Pengurus Korpri Unit Setda.**

---

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hal-hal , sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan UU nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI telah melakukan penilaian terhadap tingkat kepatuhan pelayanan public sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - b. Dari hasil penilaian tingkat kepatuhan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sumbar, ada 5 Pemerintah Daerah yang telah memperoleh Zonasi Hijau dengan predikat kepatuhan Tinggi, yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dengan skor 87,96, Kota Padang panjang skor 92,33 , Kota padang dengan skor 92,27, Kabupaten Tanah datar skor 80,87 dan Kota Payakumbuh dengan skor 94,01.
  - c. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 9 kabupaten/ kota yang dilakukan penilaian yakni 3 Kabupaten/kota yang masih berada di zonasi Kuning/sedang. Sisanya 6 Kabupaten/ Kota ada dinilai pada tahun 2019 akan datang.
  - d. Untuk itu, agar semua Kabupaten/ Kota dapat memperoleh hasil maksimal, yakni berada di zona Hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi, perlu diingatkan kepada Pemda yang dinilai agar mempersiapkan diri dengan melengkapi 9 variabel penilaian sesuai
    - e.
  - e.
  - f. Bahwa sampai saat ini Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain yang menjadi dasar pembentukan SOTK Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Barat telah dicabut berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, dan saat ini masih menunggu Keppres tentang Pembentukan kembali Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Prov. Sumbar. Sejalan dengan itu Korpri Unit Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga ikut bubar, sehingga seluruh kegiatan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
  - g. Bahwa sampai saat ini Bendaharawan Gaji Kantor Gubernur masih tetap melakukan pemotongan gaji untuk iuran Korpri, yakni Rp.5.000,- untuk golongan I dan II, Rp. 10.000,- golongan III, dan Rp. 20.000,- golongan IV, dimana dana iuran Anggota tersebut utuh tersimpan di Bank Nagari Capem Kantor Gubernur, dan yang bisa mencairkan dana iuran Peserta adalah Ketua lama Bapak H.Sudirman Gani, SH,MH dan Bendahara lama , Aswia Alwi, SE.
  - h. Seiring adanya keinginan dari PNS yang ingin mencairkan dana iuran Anggota Korpri yang tersimpan di Bank Nagari Capem Kantor Gubernur untuk membeli baju Seragam Olah Raga, perlu kiranya dilakukan **penyisipan** Pengurus Inti yang akan mencairkan dana dimaksud. Hal ini terkait Surat Nomor 01/Ist/Korpri Unit-2018 tanggal 29 Februari 2018 dari Ketua Korpri Unit Setda. Prov. Sumbar (terlampir), yang menyarankan agar dilakukan pembentukan Pengurus Korpri Unit Setda yang tidak lagi aktif, yakni Ketua H. Sudirman Gani, SH, Sekretaris Drs.Mulyadi, MM dan
-

Bendahara , Aswia Alwi, SE

- i. Sehubungan dengan hal tersebut, sekiranya Bapak setuju disarankan kepada Bapak agar diadakan rapat penyisipan kepengurusan dimaksud pada hari Rabu tanggal 4 April 2018.

Skenarionya, sebagai berikut: Ketua Bapak Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Ibu Dra. Reni Delafina dan Bendahara Despri Pricillia. Sedangkan undangan untuk Peserta Rapat langsung ditandatangani Bapak Sekda Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Barat .Terlampir daftar undangan.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan petunjuk Bapak selanjutnya.

Kepala Biro Organisasi,

**IRWAN, S.Sos, MM**  
NIP. 19680415 198902 1 001



\

1.

---

Surat Gubernur Sumbar Nomor 065/195/Org-2018 tanggal 31 Januari 2018 (terlampir) bersama ini kami mengharapkan bantuan dari

Menteri Dalam Negeri Nomor 487.1/8879/SJ tanggal 29 November 2017 tentang Penyelenggaraan Indonesia Public Service Expo 2018, bersama ini diharapkan keikutsertaan OPD yang Saudara pimpin untuk berpartisipasi pada *Indonesia Public Service Expot 2018* tersebut, yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 Mei 2018 bertempat di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta Selatan.

Pendaftaran paling lambat tanggal 5 Mei 2018 dengan mengisi formulir yang disediakan Panitia dan membayar biaya stand kepada PT. KABITA SELARAS PRAMATA pada Bank Mandiri Ac. 1240007989255.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Panitia Bapak Rifahmi, Nomor HP 081390000220.

Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

---

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Nomor : 065/ / Org-2018  
Tanggal : April 2018  
Perihal : Rapat persiapan menghadapi penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Perwakilan Sumbar.

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, hal-hal sebagai berikut :

Bahwa semenjak tahun 2014 s/d tahun 2017, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik , dimana pada tahun 2017 lalu pesertanya sudah mencapai 3.400 buah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pemenang dari Kompetisi ini akan diikuti kompetisi yang menghasilkan TOP 90 Inovasi Pelayanan Publik, dan selanjutnya diseleksi lagi menjadi TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik.

Pada tahun 2017 lalu, untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat, telah terpilih 5 besar pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Puskesmas Tanah Garam Kota Solok, SMK Negeri 9 Padang, UPTD. Museum Nagari Sumbar, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Agam. Sedangkan yang masuk kategori TOP 90 Inovasi Pelayanan Publik adalah RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi, Puskesmas Padang Kerambil Kota Payakumbuh, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar.

Pada tahun 2018 ini akan digelar kembali Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dengan Peserta terdiri dari lingkup Pemda Kabupaten/Kota se Sumbar dan lingkup OPD Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Bapak berupa Surat yang ditujukan kepada OPD Provinsi

---

Sumatera Barat dan RSUD Milik Pemda Provinsi Sumatera Barat,  
untuk berkenan kiranya Bapak tandatangani.

Demikian disampaikan kepada Bapak, terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

**Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd.**  
Pembina Utama  
NIP. 19580705 197903 1 004

### ***PENGANTAR***

Puji syukur kami ucapkan Kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini telah dapat dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pengawasan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Provinsi Sumatera Barat pada saat ini telah berjalan dengan baik, yakni dengan adanya 3 (tiga) pilar yang saling bersinergi, yaitu Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik, dan LAPOR!-SP4N yang terdiri dari Tim Admin dan Pejabat Penghubung pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan dengan kehadiran 3 pilar tersebut, Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat karena pelayanan publik merupakan salah satu area perubahan dari Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan oleh semua Penyelenggara Negara.

Kami menyadari, laporan ini memang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal saleh dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Amin.

Padang, 31 Desember  
2017

Kepala Biro Organisasi,

---

## ***PENGANTAR***

Puji syukur kami ucapkan Kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 telah dapat dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pengawasan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Provinsi Sumatera Barat pada saat ini telah berjalan dengan baik, yakni dengan adanya 3 (tiga) pilar yang saling bersinergi, yaitu Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik, dan LAPOR!-SP4N yang terdiri dari Tim Admin dan Pejabat Penghubung pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan dengan kehadiran 3 pilar tersebut, Penyelenggara Pelayanan Publik harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat karena pelayanan publik ini merupakan salah satu area perubahan dari Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan oleh semua Penyelenggara Negara.

Kami menyadari, kualitas laporan ini memang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal saleh dan memberikan balasan yang sebaik-

---

baiknya. Amin.

Padang, 31 Desember  
2017

**Kepala Biro Organisasi,**

**IRWAN, S.Sos, MM**  
NIP. 19680415 198902 1  
001

termasuk pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah yang mempunyai inovasi terbaik dari yang terbaik serta replikasinya, untuk menggerakkan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik Indonesia.

Tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan

---

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 yaitu **“Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Mewujudkan Nawa Cita dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”**.

Oleh karena itu, kami mengucapkan kepada seluruh peserta, selamat datang, selamat berjuang, dan selamat berinovasi!

**CALL CENTER SINOVIK 2018:**

**0816-855-351**

***Batas akhir pengajuan proposal inovasi pelayanan publik melalui SINOVIK yaitu 10 Maret 2018.***

### **Proposal**

#### **Kompetisi Inovasi**

Setelah mendapatkan ID dan sandi sebagai UIP, anda dapat membuat dan mengirimkan proposal secara online melalui sinovik.  
**Selamat berkarya**

#### **Persyaratan Inovasi Pelayanan Publik**

- Memberikan perbaikan pelayanan publik.
- Memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Dapat dan/atau sudah direplikasi.
- Berkelanjutan.
- Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

#### **Tujuan Kompetisi**

- Menjaring inovasi pelayanan publik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- Menetapkan inovasi pelayanan publik yang diberikan penghargaan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik.
- Menggunakan inovasi pelayanan publik yang terpilih sebagai bahan untuk melakukan transfer pengetahuan/replikasi inovasi pelayanan publik.

#### **Kategori Inovasi Pelayanan Publik**

- **Tata kelola pemerintahan**, meliputi salah satu atau lebih unsur partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, ketertiban sosial, dan kontrol terhadap korupsi dalam pelayanan publik.
  - **Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.**
  - **Perbaikan kesejahteraan sosial dalam penyelesaian masalah-masalah sosial.**
  - **Pelayanan langsung kepada masyarakat** yaitu pelayanan yang dilaksanakan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang manfaatnya dirasakan langsung.
-

## **Kriteria Inovasi Pelayanan Publik**

- a. **Memperkenalkan pendekatan baru**,Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. **Produktif**,Memberikan bukti hasil implementasi.
- c. **Berdampak**,Memberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya ungkit terhadap percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. **Berkelanjutan**,Memberikan jaminan bahwa inovasi pelayanan publik terus dipertahankan, diimplementasikan, dan dikembangkan dengan dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.
- e. Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

## **Mekanisme Seleksi**

- Penilaian Tahap I (Seleksi Administrasi)
- Penilaian Tahap II (Desk Evaluation)
- Penilaian Tahap III
- Penilaian Tahap IV (Presentasi dan Wawancara)
- Penilaian Tahap V (Verifikasi dan Observasi Lapangan)
- Penilaian Tahap VI (Penentuan Akhir)

## **Publikasi dan Bimbingan Teknis**

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan publikasi melalui berbagai mekanisme untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan kompetisi melalui:

- Pemberitaan di sejumlah media.
  - Sosialisasi baik secara nasional maupun tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
  - Bimbingan teknis kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
-





2.

Surat Gubernur Sumbar Nomor 065/195/Org-2018 tanggal 31 Januari 2018 ( terlampir) bersama ini kami mengharapkan bantuan dari

Menteri Dalam Negeri Nomor 487.1/8879/SJ tanggal 29 November 2017 tentang Penyelenggaraan Indonesia Public Service Expo 2018, bersama ini diharapkan keikutsertaan OPD yang Saudara pimpin untuk berpartisipasi pada *Indonesia Public Service Expot 2018* tersebut, yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 Mei 2018 bertempat di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta Selatan.

Pendaftaran paling lambat tanggal 5 Mei 2018 dengan mengisi formulir yang disediakan Panitia dan membayar biaya stand kepada PT. KABITA SELARAS PRAMATA pada Bank Mandiri Ac. 1240007989255.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Panitia Bapak Rifahmi, Nomor HP 081390000220.

Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Nomor : 065/ / Org-2018  
Tanggal : April 2018  
Perihal : Rapat persiapan menghadapi penilaian kepatuhan pelayanan public oleh Ombudsman Perwakilan Sumbar.

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, hal-hal sebagai berikut :

Bahwa semenjak tahun 2014 s/d tahun 2017, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik , dimana pada tahun 2017 lalu pesertanya sudah mencapai 3.400 buah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pemenang dari Kompetisi ini akan

diikuti kompetisi yang menghasilkan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik, dan selanjutnya diseleksi lagi menjadi TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik.

Pada tahun 2017 lalu, untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat, telah terpilih 5 besar pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, Puskesmas Tanah Garam Kota Solok, SMK Negeri 9 Padang, UPTD. Museum Nagari Sumbar, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Agam. Sedangkan yang masuk kategori TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik adalah RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi, Puskesmas Padang Kerambil Kota Payakumbuh, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar.

Pada tahun 2018 ini akan digelar kembali Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dengan Peserta terdiri dari lingkup Pemda Kabupaten/Kota se Sumbar dan lingkup OPD Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Bapak berupa Surat yang ditujukan kepada OPD Provinsi Sumatera Barat dan RSUD Milik Pemda Provinsi Sumatera Barat, untuk berkenan kiranya Bapak tandatangani.

Demikian disampaikan kepada Bapak, terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

**Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd.**  
Pembina Utama  
NIP. 19580705 197903 1 004

### ***PENGANTAR***

Puji syukur kami ucapkan Kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini telah dapat dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pengawasan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Provinsi Sumatera Barat pada saat ini telah berjalan dengan baik, yakni dengan adanya 3 (tiga) pilar yang saling bersinergi, yaitu Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Tim Pengelola

Pengaduan Pelayanan Publik, dan LAPOR!-SP4N yang terdiri dari Tim Admin dan Pejabat Penghubung pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan dengan kehadiran 3 pilar tersebut, Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat karena pelayanan publik merupakan salah satu area perubahan dari Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan oleh semua Penyelenggara Negara.

Kami menyadari, laporan ini memang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal saleh dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Amin.

Padang, 31 Desember  
2017

Kepala Biro Organisasi,

**IRWAN, S.Sos, MM**  
NIP. 19680415 198902 1 001

## ***PENGANTAR***

Puji syukur kami ucapkan Kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan

karunia-Nya, laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 telah dapat dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pengawasan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Provinsi Sumatera Barat pada saat ini telah berjalan dengan baik, yakni dengan adanya 3 (tiga) pilar yang saling bersinergi, yaitu Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik, dan LAPOR!-SP4N yang terdiri dari Tim Admin dan Pejabat Penghubung pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan dengan kehadiran 3 pilar tersebut, Penyelenggara Pelayanan Publik harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat karena pelayanan publik ini merupakan salah satu area perubahan dari Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan oleh semua Penyelenggara Negara.

Kami menyadari, kualitas laporan ini memang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal saleh dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Amin.

Padang, 31 Desember  
2017

**Kepala Biro Organisasi,**

**IRWAN, S.Sos, MM**  
NIP. 19680415 198902 1  
001

termasuk pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah yang mempunyai inovasi terbaik dari yang terbaik serta replikasinya, untuk menggerakkan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik Indonesia.

Tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 yaitu **“Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Mewujudkan Nawa Cita dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”**.

Oleh karena itu, kami mengucapkan kepada seluruh peserta, selamat datang, selamat berjuang, dan selamat berinovasi!

***CALL CENTER SINOVIK 2018:***

***0816-855-351***

***Batas akhir pengajuan proposal inovasi pelayanan publik melalui SINOVIK yaitu 10 Maret 2018.***

### **Proposal**

### **Kompetisi Inovasi**

Setelah mendapatkan ID dan sandi sebagai UIP, anda dapat membuat dan mengirimkan proposal secara online melalui sinovik.

**Selamat berkarya**

### **Persyaratan Inovasi Pelayanan Publik**

- Memberikan perbaikan pelayanan publik.
- Memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Dapat dan/atau sudah direplikasi.
- Berkelanjutan.
- Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

## Tujuan Kompetisi

- Menjaring inovasi pelayanan publik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- Menetapkan inovasi pelayanan publik yang diberikan penghargaan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik.
- Menggunakan inovasi pelayanan publik yang terpilih sebagai bahan untuk melakukan transfer pengetahuan/replikasi inovasi pelayanan publik.

## Kategori Inovasi Pelayanan Publik

- **Tata kelola pemerintahan**, meliputi salah satu atau lebih unsur partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, ketertiban sosial, dan kontrol terhadap korupsi dalam pelayanan publik.
- **Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.**
- **Perbaikan kesejahteraan sosial dalam penyelesaian masalah-masalah sosial.**
- **Pelayanan langsung kepada masyarakat** yaitu pelayanan yang dilaksanakan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang manfaatnya dirasakan langsung.

## Kriteria Inovasi Pelayanan Publik

- f. **Memperkenalkan pendekatan baru**,Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
- g. **Produktif**,Memberikan bukti hasil implementasi.
- h. **Berdampak**,Memberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya ungkit terhadap percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- i. **Berkelanjutan**,Memberikan jaminan bahwa inovasi pelayanan publik terus dipertahankan, diimplementasikan, dan dikembangkan dengan dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.
- j. Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

## Mekanisme Seleksi

- Penilaian Tahap I (Seleksi Administrasi)
- Penilaian Tahap II (Desk Evaluation)
- Penilaian Tahap III
- Penilaian Tahap IV (Presentasi dan Wawancara)
- Penilaian Tahap V (Verifikasi dan Observasi Lapangan)
- Penilaian Tahap VI (Penentuan Akhir)

## Publikasi dan Bimbingan Teknis

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan publikasi melalui berbagai mekanisme untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan kompetisi melalui:

- Pemberitaan di sejumlah media.
- Sosialisasi baik secara nasional maupun tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.



- Bimbingan teknis kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.



## PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG KETATALAKSANAAN

Berdasarkan kesepakatan rapat-rapat Tim Reformasi Birokrasi, Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Ketatalaksanaan adalah sebagai berikut:

A.		Analisis		Business		Process
B.		Review		Business		Process
C.	Penyusunan	Standard	Operating		Procedures	(SOP)
D.	Review	Standard		Operating		Procedures.

**A. Analisis Business Process**

Seiring dengan bergulirnya reformasi tahun 1999, muncul tuntutan masyarakat untuk mereformasi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dan berbeda dari era sebelumnya. Salah satu gagasan reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang paling fundamental dan telah diterapkan di Indonesia adalah otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka peran Kementerian Dalam Negeri berada posisi yang strategis. Kemendagri berperan dalam konteks sistem negara kesatuan yang didalamnya terdapat pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah agar sentra pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Desentralisasi kemudian menjadi suatu alat untuk mempertahankan stabilitas nasional.

Sebagai organisasi yang pro publik, penyempurnaan proses bisnis di Kementerian Dalam Negeri diarahkan untuk menghasilkan proses bisnis yang akuntabel dan transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri menyusun SOP yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif, melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan, serta melakukan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Dengan ketiga alat tersebut Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan layanan prima kepada publik, yaitu layanan yang terukur dan pasti dalam hal waktu penyelesaian, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dan biaya yang harus dikeluarkan.

**B. Review Business Process**

**C. Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui penyusunan Tatalaksana yang menghasilkan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) bertujuan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis. Metode penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Dalam negeri dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP diawali dengan identifikasi jenis kebutuhan yang menjelaskan mengenai SOP apa saja yang diperlukan di setiap komponen dan unit kerja masing-masing.
2. Penyusunan SOP dilakukan berdasarkan fakta yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada saat ini (adanya kaitan antara jabatan dan struktur organisasi yang ada saat ini). Dapat dijelaskan di sini bahwa penyusunan SOP dilakukan berbasis fakta riil aktifitas yang dilakukan saat ini, tidak berdasarkan Kepmendagri nomor 130 Tahun 2003 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ataupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
3. Dari kejelasan identifikasi jenis kebutuhan SOP, maka dapat diketahui jumlah SOP yang diperlukan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
4. Hingga saat ini melalui fasilitasi bagian tatalaksana biro organisasi, telah dilakukan beberapa kali rapat-rapat dalam rangka konsultasi mengenai penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

5. Dari pelaksanaan rapat-rapat tersebut, saat ini telah dihasilkan sebuah draft Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri beserta daftar kebutuhan atau identifikasi jenis-jenis SOP yang diusulkan setiap unit kerja setingkat eselon II setiap komponen.

#### **D. Review Standard Operating Procedures.**

Bagi internal organisasi, memperjelas persyaratan dan target pekerjaan dalam format yang siap diaplikasikan pada pekerjaan, serta memberikan informasi dengan detail apa yang diharapkan oleh organisasi untuk dilakukan oleh pegawai dalam situasi yang di alami. Sementara bagi pimpinan, Standard Operating Procedures (SOP) dapat menyediakan informasi bagi perumusan strategi dan menyediakan informasi implementasi kegiatan. Sejalan dengan reformasi birokrasi, Standard Operating Procedures (SOP) bermanfaat sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian serta meningkatkan akuntabilitas, metode penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut

1. Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) dikelompokkan sesuai dengan unit kerja dan selanjutnya disesuaikan dengan tugas dan fungsi, berdasarkan kesesuaian unit kerja maka unit kerja **Kementerian Dalam Negeri** dikelompokkan sebagai berikut :

- Sekretariat Jenderal
- Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah
- Inspektorat Jenderal
- Badan Penelitian dan Pengembangan
- Badan Pendidikan dan Pelatihan

2) Selanjutnya dari kesatuan unit kerja, Standard Operating Procedures (SOP) yang dibuat dikelompokkan berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi masing-masing, menjadi sebagai berikut :

1. Standard Operating Procedures (SOP) Sekretariat Jenderal dikelompokkan menjadi :

- Biro Perencanaan dan Anggaran
- Biro Kepegawaian
- Biro Umum
- Biro Organisasi
- Pusat Kajian Kebijakan Strategik
- Biro Hukum
- Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri
- Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi
- Pusat Penerangan
- Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Asset

2. Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dikelompokkan menjadi

- Direktorat Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan
- Direktorat Penanganan Konflik
- Sekretariat Ditjen Kesbang dan Politik
- Direktorat Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan
- Direktorat Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik
- Direktorat Pengembangan Budaya Politik

3. Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dikelompokkan menjadi :

- Sekretariat Ditjen PUM
- Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama

- Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan
  - Direktorat Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
  - Direktorat Kawasan dan Otorita
  - Direktorat Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
- Sekretariat Ditjen Otda
  - Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah
  - Direktorat Penataan Daerah dan Otonomi Khusus
  - Direktorat Fasilitasi DPOD dan Hubungan Antar Lembaga
  - Direktorat Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
  - Direktorat Pejabat Negara
5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- Sekretariat Ditjen Bina Bangda
  - Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Direktorat Pengembangan Wilayah
  - Direktorat Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
  - Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah
  - Direktorat Perkotaan
6. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Sekretariat Ditjen PMD
  - Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
  - Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
  - Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat
  - Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
7. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan
- Sekretariat Ditjen Adminduk
  - Direktorat Pendaftaran Penduduk
  - Direktorat Pencatatan Sipil
  - Direktorat Informasi Kependudukan
  - Direktorat Perkembangan Kependudukan
  - Direktorat Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
8. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah
- Sekretariat Ditjen BAKD
  - Direktorat Administrasi Anggaran Daerah
  - Direktorat Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah
  - Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan
  - Direktorat Fasilitas Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
9. Jenderal Inspektorat
- Sekretariat Itjen
  - Inspektorat Wilayah I
  - Inspektorat Wilayah II
  - Inspektorat Wilayah III
  - Inspektorat Wilayah IV
10. Badan Penelitian dan Pengembangan
- Sekretariat Badan Litbang
  - Puslitbang Kesbangpol dan Pemerintah Umum
  - Puslitbang Otonomi Daerah

- Puslitbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
- Puslitbang Keuangan Daerah
- Puslitbang Pembangunan Daerah dan Kependudukan

#### 11. Badan Pendidikan dan Pelatihan

- Sekretariat Badan Diklat
- Pusdiklat Pemerintahan dan Politik
- Pusdiklat Keuangan Daerah dan Teknis
- Pusdiklat Jabatan
- Pusdiklat Pembangunan dan Kependudukan
- Pusdiklat Kader dan Pengembangan Kepemimpinan

Dalam penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) yang sifatnya umum dan ada kesesuaian dengan bagian/unit lain dibuat dan dibahas secara bersama antar bagian/unit, sedangkan Standard Operating Procedures (SOP) yang sifatnya

#### Referensi:

- Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
- Biro Organisasi Kemendagri

### **DANA TAX AMNESTI CAPAI Rp. 3.540 Trilyun**

Sejak diluncurkannya program Tax amnesty, sudah terkumpul dana dari deklarasi sebesar Rp. 3.540,- Trilyun, yang terdiri atas deklarasi dalam negeri sebesar Rp.2.411 Trilyun dan deklarasi luar negeri sebesar Rp. 934,- Trilyun. Sedangkan uang tebusan tax amnesty ini berjumlah Rp. 93,3 Trilyun. Jumlah ini akan terus bertambah karena diperkirakan masih banyak dana deklarasi dari luar negeri, yang diperkirakan mencapai Rp 11 Trilyun

DAFTAR SKPD DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA  
BARAT YANG **BELUM** MENYERAHKAN DATA TENAGA  
OUTSOURCHING SAMPAI SEPTEMBER 2016:

1. Bappeda
2. SEKWAN DPRD Prop. Sumbar
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Padang, Mei 2016

PPTK Bagian PA

MUZIRWAN, S.H.  
NIP. 19670605 199703 1 006

DAFTAR KABUPATEN/ KOTA DAN PROVINSI YANG BELUM  
MEMBAYARKAN JKK DAN JKM DI PROPINSI SUMATERA  
BARAT S/D APRIL 2016

1. Kabupaten Padang Pariaman
2. Kota Solok
3. Kabupaten Solok Selatan
4. Kota Padang Panjang
5. Propinsi Sumatera Barat



## WACANA PENGURANGAN JUMLAH PNS

Sekira 1,37 juta PNS yang masuk dalam daftar rasionalisasi terutama bagi PNS yang hanya lulusan SMA akan dirumahkan atau di PHK, Mereka yang akan di PHK ini akan tetap diberikan pesangon sebagaimana para pekerja swasta. Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan, PNS yang dirumahkan tersebut bisa memikirkan alternatif pekerjaan lainnya. PNS yang kena rasionalisasi akan diberi pesangon.

Dalam usulan kami, pesangonnya diberikan sekaligus dan tidak dicicil agar bisa dimanfaatkan PNSnya untuk usaha dan lain-lain. Tapi keputusannya ada pada Kementerian Kurangan, karena mereka paling tahu apakah dana cukup atau tidak, " ujar Bambang Sumarsono. Dia mencontohkan bila PNS yang kena rasionalisasi umurnya 45 tahun, maka pesangonnya dihitung berdasarkan masa kerja hingga 58 tahun sesuai batas usia pensiun yang diatur dalam UU ASN. PNS yang mendapatkan pesangon, syaratnya sudah mengabdikan minimal 10 tahun.

Dalam roadmap rasionalisasi, ada sekitar 1,37 juta PNS yang menjadi target, mereka tersebar di jabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP dan SD.

Rasionalisasi akan dilakukan selama 4 tahun, sehingga pada tahun 2019 jumlah PNS menjadi 3,5 juta orang, yang sebelumnya 4,517.000 PNS.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Herman Suryatman, mengungkapkan banyak media yang salah menafsirkan rencana pengurangan PNS dari KemenPAN-RB. Menurutnya, rencana pengurangan PNS yang masih dalam **tahap kajian** tersebut, tidak melulu berarti pemberhentian para PNS yang masih aktif.

"Pengurangan itu dilakukan dengan sejumlah opsi, bukan berarti memberhentikan PNS," kata Herman kepada Republika, Rabu (6/1).

Ia menuturkan apabila rencana KemenPAN-RB ini memang benar terlaksana, salah satu pilihan langkah yang hendak dijalankan adalah dengan menekan angka pengadaan. Angka pengadaan PNS tersebut, lanjut Herman, harus dikurangi dan berada di bawah angka dari jumlah PNS yang akan memasuki masa pensiun.

Selain itu, Herman mengatakan pengurangan PNS memiliki pilihan langkah lain, seperti penawaran pensiun dini kepada PNS yang telah memasuki masa tua. Dana pensiun dini yang akan diberikan, tentu akan disesuaikan dengan perhitungan yang tepat, sehingga layak untuk diterima PNS yang memutuskan mengambil pensiun dini.

Sebelumnya, rencana MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi untuk mengurangi PNS telah menuai pro-kontra di tengah publik, khususnya di

kalangan PNS. Rencana yang masih di tahap pengkajian itu, menimbulkan kekhawatiran karena para PNS takut akan ada pemecatan atau pemberhentian PNS yang masih aktif.

PNS yang mendapatkan pesangon, syaratnya sudah mengabdikan minimal 10 tahun.

“Rasionalisasi berupa pensiun dini juga diberlakukan untuk PNS yang pengabdian minimal 10 tahun,”  
sergahnya.

Dalam roadmap rasionalisasi, ada sekira 1,37 juta PNS jadi target. Mereka tersebar di jabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP, dan SD.

Rasionalisasi akan dilakukan bertahap selama empat tahun, sehingga pada 2019 jumlah PNS menjadi 3,5 juta dari 4,517 juta pegawai.

SUMBER(<http://portalketapang.com>)



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend.Sudirman No.51 Telp.31401 – 31402 – 34425 Padang  
<http://www.sumbar.go.id>. e-mail:pdesb@sumbar.go.id

ekian berita da Informasinya semoga apa yang di sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya Dan bisa di Jadikan pelajaran untuk kita semuanya,amiiin

Padang, Februari 2016

Nomor : 061/ / Org-2016  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan data tentang jasa tenaga Sopir, jasa pengamanan kantor, dan jasa petugas Kebersihan.

Kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur
  2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  3. Sdr. Kepala Dinas/Badan/ Lembaga Teknis Daerah
  4. Sdr. Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- di -

**Padang.**

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga Sopir dan tenaga pengamanan kantor, pada akhir tahun 2013 telah dilakukan pengadaan jasa Sopir dan jasa pengamanan kantor yang dilakukan dengan pengadaan langsung orang perorangan atau pemilihan jasa Penyedia pihak Ketiga. Pengadaan tenaga Sopir dan tenaga pengamanan kantor tersebut didasarkan atas Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/1101/Org-2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Kebutuhan jasa Pengamanan kantor dan jasa Sopir, dan dikuatkan dengan Pergub Nomor 75 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak lain.

Agar pemanfaatan jasa Sopir dan jasa pengamanan kantor tersebut berjalan efektif dan berdayaguna, perlu dilakukan pengendalian dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Sdr untuk mengirimkan data-data tentang tenaga Sopir dan tenaga Pengamanan kantor yang ada pada SKPD Sdr.( sesuai dengan daftar terlampir). Diharapkan data-data tersebut disampaikan kepada Biro Organisasi Setda. Prov. Sumbar selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 2016.

Demikian disampaikan kepada Sdr, atas bantuan dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

**DR.H. ALI ASMAR, M.Pd.**  
Pembina Utama  
NIP. 19580705 197903 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend.Sudirman No.51 Telp.31401 – 31402 – 34425 Padang  
<http://www.sumbar.go.id>. e-mail:pdesb@sumbar.go.id

Padang, Mei 2016

Nomor : 061/ / Org-2016  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan .

Kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur
2. Sdr. Kepala BKD Prov.Sumbar
3. Sdr. Kepala Badan Diklat Prov. Sumbar
4. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

- Transmigrasi Prov. Sumbar
5. Sdr. Kepala Biro Hukum
  6. Sdr. Kepala Biro Umum
  7. Sdr. Kepala Biro Pengelolaan Asset Daerah
- di -

**Padang.**

Dalam rangka mewujudkan amanat salah satu area perubahan reformasi birokrasi adalah dengan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) sehingga akan dapat dibangun budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang transparan, bersih, dan bertanggung jawab serta menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan tauladan bagi masyarakat.

Untuk menyamakan persepsi tentang nilai-nilai budaya kerja perlu disepakati nilai-nilai budaya kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (terlampir)

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 2 Juni 2016

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai

Acara : Kesepakatan nilai-nilai budaya kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Demikian disampaikan , atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

**DR.H. ALI ASMAR, M.Pd.**

Pembina Utama

NIP. 19580705 197903

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan.
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend.Sudirman No.51 Telp.31401 – 31402 – 34425 Padang

<http://www.sumbar.go.id>. e-mail:pdesb@sumbar.go.id

Padang, Mei 2016

Nomor : 061/ / Org-2016  
Lampiran : 1 (satu) Buku  
Perihal : Undangan .

Kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur
2. Sdr. Kepala BKD Prov.Sumbar
3. Sdr. Kepala Badan Diklat Prov. Sumbar
4. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar
5. Sdr. Kepala Biro Hukum

6. Sdr. Kepala Biro Umum
7. Sdr. Kepala Biro Pengelolaan Asset Daerah  
di -

**Padang.**

Dalam rangka mewujudkan amanat salah satu area perubahan reformasi birokrasi adalah dengan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) sehingga akan dapat dibangun budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang transparan, bersih, dan bertanggung jawab serta menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan tauladan bagi masyarakat.

Untuk menyamakan persepsi tentang nilai-nilai budaya kerja perlu disepakati nilai-nilai budaya kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ( terlampir )

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Juni 2016

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Kerja Biro Organisasi

Acara : Kesepakatan nilai-nilai budaya kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

**DR.H. ALI ASMAR, M.Pd.**

Pembina Utama

NIP. 19580705 197903 1 004

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan.
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan.



Padang, Mei 2016

Nomor : 061/ / Org-2016  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan data tentang personil  
Satuan Polisi Pamong Praja Non- PNS.

Kepada Yth:

Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Sumatera Barat  
di -

**Padang.**

Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/1101/Org-2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Kebutuhan jasa Pengamanan kantor dan jasa Sopir, dan dikuatkan dengan Pergub Nomor 75 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak lain, telah dilakukan pengadaan jasa Sopir dan jasa pengaman kantor pada SKPD dilakukan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan dengan pengadaan langsung orang perorangan atau pemilihan jasa Penyedia pihak Ketiga.

Sehubungan dengan adanya tenaga non PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bersama ini diminta kepada Sdr untuk mengirimkan data-data tentang tenaga non PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan kepada Sdr, atas bantuan dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

**DR.H. ALI ASMAR, M.Pd.**  
Pembina Utama  
NIP. 19580705 197903 1 004



Padang, April 2014

Nomor : 061/ /Org-2014  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Usulan standar biaya upah tenaga Sopir dan Pengamanan Kantor.**

Kepada Yth :  
Sdr. **Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat**  
di -  
Padang.

Berdasarkan hasil rapat penetapan Standar Biaya Khusus APBD Prov. Sumbar Tahun 2014 pada Kamis tanggal 10 April 2014, bersama ini diminta kepada Sdr. untuk standar biaya upah tenaga Sopir dan Pengamanan Kantor agar dimasukkan ke dalam Standar Biaya APBD Prop. Sumbar Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Pengadaan Jasa dengan **kontrak perorangan** :

- Jasa Sopir dan Pengamanan Kantor / bulan ..... : Rp. 1.588.000,-
- Iuran jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan, sebesar 10,20 % dari Gaji/ bulan..... : Rp. 162.000,-
- Jumlah..... : Rp. **1.750.000,-**
- Terbilang : *(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*

2. Pengadaan Jasa dengan **Perusahaan Penyedia Jasa** :

- Jasa Sopir dan Pengamanan Kantor / bulan ..... : Rp. 1.588.000,-
- Iuran jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan , sebesar 10,20 % dari Gaji/ bulan..... : Rp. 162.000,-
- *Fee/keuntungan pihak ketiga/ Perusahaan*..... : Rp. 250.000,-
- Jumlah..... : Rp. **2.000.000,-**
- Terbilang : *(Dua Juta Rupiah)*

Di samping jasa Sopir dan Pengamanan Kantor, juga diberikan :

- ✓ Pakaian Dinas 1 kali / tahun :
  - (1). Pakaian Dinas Sopir : Rp. 350.000,-
  - (2). Pakaian Dinas Pengamanan Kantor : Rp. 750.000,-
- ✓ Tunjangan Hari Raya 1 tahun sebesar 1 kali jasa yang diterima setiap bulan.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH

**Dr.H. ALI ASMAR, M.Pd**  
Pembina Utama  
NIP. 19580705 197903 1 004

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan ).
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan ).



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend.Sudirman No.51 Telp.31401 – 31402 – 34425 Padang  
<http://www.sumbar.go.id>. e-mail:pdesb@sumbar.go.id

---

Padang, September 2016

Nomor : 061/ /Org-2016  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : *Undangan.*

Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Biro
2. Sdr. Kepala Bagian
3. Sdr. Kepala Sub bagian  
di lingkungan Setda.Provinsi Sumatera Barat

di-

Padang.

## NOTA DINAS

Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Kepada : 1. Kepala Biro  
2. Kepala Bagian  
3. Kepala Sub Bagian  
di lingkungan Setda. Prop. Sumbar  
Tanggal : 25 Agustus 2016  
Nomor : 061/ / Org- 2016  
Perihal : **Undangan.**

Dalam rangka meningkatkan nilai manfaat Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai ASN pada saat memasuki pensiun, direncanakan akan dilakukan penambahan premi sebesar Rp. 200.000,- per orang/bulan melalui PT. Asuransi Jiwa TASPEN.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Saudara/Saudari untuk hadir pada :

Hari : **Selasa**  
Tanggal : 13 September 2016  
Waktu : Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB  
Tempat : Auditorium Gubernur  
Narasumber : Jhon Irwan ( Kepala PT. Taspen Cabang Padang )  
Acara : Sosialisasi peningkatan premi THT pada PT. Asuransi Jiwa TASPEN

Demikian disampaikan, atas kehadiran Sdr/i. diucapkan terima kasih.

Plh. SEKRETARIS DAERAH

**DEVI KURNIA, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640707 199108 1 001

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan ).
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan ).

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Prov. Sumbar  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Tanggal : 24 Mei 2016  
Nomor : 061/ / Org- 2016  
Perihal : Kesepakatan nilai-nilai Budaya Kerja

Plh.SEKRETARIS DAERAH

**Dr.H. ALI ASMAR, M.Pd**  
Pembina Utama  
NIP. 19580705 197903 1 004

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Prov. Sumbar  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Tanggal : 24 Mei 2016  
Nomor : 061/ / Org- 2016  
Perihal : Kesepakatan nilai-nilai Budaya Kerja .

---

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Biro Organisasi semenjak tahun 2014 sampai sekarang telah melakukan kegiatan pembinaan budaya kerja pada SKPD melalui kegiatan Bimtek Optimalisasi Budaya kerja, dan penyusunan Buku Pedoman Teknis Nilai-Nilai Budaya Kerja Bagi Pegawai ASN Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa Biro Organisasi telah membuat draft Pergub tentang Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Kerja bagi Pegawai ASN Provinsi Sumatera Barat, namun terbentur karena belum ditetapkannya nilai-nilai budaya Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa Biro Organisasi telah mengirimkan Surat kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang nilai-nilai Budaya Kerja pada SKPD , dan ternyata dalam perkembangannya sudah ada SKPD yang telah memajukan Nilai-nilai Budaya Kerja seperti terlampir.

Untuk menyepakati agar 10 Nilai-nilai budaya Kerja yang telah dipergunakan tersebut, perlu dilakukan rapat dengan SKPD terkait , dan hasil kesepakatan ini akan dijadikan dasar untuk penyusunan Pergub Nilai-Nilai Budaya Kerja yang akan diteliti oleh Biro Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Bapak untuk menandatangani surat terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 090

**H.SUDIRMAN GANI, SH, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP.19561105 199403 1 005

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Prov. Sumbar  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Tanggal : 25 Februari 2016  
Nomor : 061/ / Org- 2015  
Perihal : **Undangan** .

---

Dalam rangka sosialisasi Peraturan Pemerintah 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bersama ini kami mengharapkan agar Saudara menugaskan 10 (sepuluh) orang Staf untuk ikut berperan serta pada kegiatan sosialisasi dimaksud, pada :

Hari : **Selasa**

Tanggal : 1 Desember 2015

Waktu : Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB

Tempat : Auditorium Gubernur

Narasumber : Jhon Irwan ( Kepala PT. Taspen Cabang Padang )

Acara : Sosialisasi program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Pegawai ASN berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2015

Pada pelaksanaan acara tersebut juga disediakan berbagai *doorprise* oleh pihak PT.(Persero) TASPEN Cabang Padang.

Demikian disampaikan, agar Saudara dapat menugaskan Karyawan/ wati untuk hadir tepat waktu.

SEKRETARIS DAERAH

**Dr.H. ALI ASMAR, M.Pd**  
Pembina Utama  
NIP. 19580705 197903 1 004

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Pj. Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan ).

Berdasarkan hasil rapat penetapan Standar Biaya Khusus APBD Prov. Sumbar Tahun 2014 pada Kamis tanggal 10 April 2014, bersama ini diminta kepada Sdr. untuk standar biaya upah tenaga Sopir dan Pengamanan Kantor agar dimasukkan ke dalam Standar Biaya APBD Prop. Sumbar Tahun 2014, sebagai berikut :

3. Pengadaan Jasa dengan **kontrak perorangan** :

- Jasa Sopir dan Pengamanan Kantor / bulan ..... : Rp. 1.588.000,-
  - Iuran jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan, sebesar 10,20 % dari Gaji/ bulan..... : Rp. 162.000,-
  - Jumlah..... : Rp. 1.750.000,-
- Terbilang : (*Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

4. Pengadaan Jasa dengan **Perusahaan Penyedia Jasa** :

- Jasa Sopir dan Pengamanan Kantor / bulan ..... : Rp. 1.588.000,-
  - Iuran jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan , sebesar 10,20 % dari Gaji/ bulan..... : Rp. 162.000,-
  - *Fee/keuntungan pihak ketiga/ Perusahaan*..... : Rp. 250.000,-
  - Jumlah..... : Rp. 2.000.000,-
- Terbilang : (*Dua Juta Rupiah*)

Di samping jasa Sopir dan Pengamanan Kantor, juga diberikan :

- ✓ Pakaian Dinas 1 kali / tahun :
  - (1). Pakaian Dinas Sopir : Rp. 350.000,-
  - (2). Pakaian Dinas Pengamanan Kantor : Rp. 750.000,-
- ✓ Tunjangan Hari Raya 1 tahun sebesar 1 kali jasa yang diterima setiap bulan.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH

**Dr.H. ALI ASMAR, M.Pd**  
Pembina Utama  
NIP. 19580705 197903 1 004

Tembusan kepada :

2. Yth. Bapak Pj. Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan ).

Padang, Desember 2014

Nomor : 061/ /Org-2015  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Usulan standar biaya upah tenaga  
Sopir dan Pengamanan Kantor.**

Kepada Yth :  
Sdr. **Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan  
Daerah Provinsi Sumatera Barat**  
di -  
Padang.

Berdasarkan hasil rapat penetapan Standar Biaya Khusus APBD Prov. Sumbar Tahun 2014 pada Kamis tanggal 10 April 2014, bersama ini diminta kepada Sdr. untuk standar biaya upah tenaga Sopir dan Pengamanan Kantor agar dimasukkan ke dalam Standar Biaya APBD Prop. Sumbar Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Pengadaan Jasa dengan **Perusahaan Penyedia Jasa** :
  - Upah per bulan ..... : Rp. 1.615.000,-
  - Iuran jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan, sebesar 10,20 % dari Gaji/ bulan..... : Rp. 111.274,-
  - Iuran jaminan kesehatan BPJS Kesehatan..... : Rp. 25.500,-
  - Tunjangan Hari Tua program BPJS Ketenagakerjaan.....: Rp. 134.584,-
  - Fee/ keuntungan untuk Perusahaan ..... : Rp. 150.869,-
  - Pajak untuk Perusahaan ..... : Rp. 203.673,-
  - Jumlah..... : Rp. **2.240.000,-**

Terbilang : ( dua juta dua ratus empat puluh ribu)

2. Pengadaan Jasa dengan **Perorangan** ..... : Rp. 1.885.858,-

Di samping jasa Sopir dan Pengamanan Kantor, juga diberikan :

- ✓ Pakaian Dinas 1 kali / tahun :
  - (1). Pakaian Dinas Sopir : Rp. 350.000,-
  - (2). Pakaian Dinas Pengamanan Kantor : Rp. 750.000,-
- ✓ Tunjangan Hari Raya 1 tahun sebesar 1 kali jasa yang diterima setiap bulan.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH

**Dr.H. ALI ASMAR, M.Pd**  
Pembina Utama



Padang, Nopember 2015

Nomor : 061/ /Org-2015  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : ***Undangan.***

Kepada Yth :

1. **Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat**
2. **Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat**
3. **Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

di -

*Padang.*

Berdasarkan hasil rapat penetapan Standar Biaya Khusus APBD Prov. Sumbar Tahun 2014 pada Kamis tanggal 10 April 2014, bersama ini diminta kepada Sdr. untuk standar biaya upah tenaga Sopir dan Pengamanan Kantor agar dimasukkan ke dalam Standar Biaya APBD Prop. Sumbar Tahun 2015, sebagai berikut :

3. Pengadaan Jasa dengan **Perusahaan Penyedia Jasa** :

- Upah per bulan ..... : Rp. 1.615.000,-
- Iuran jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan, sebesar 10,20 % dari Gaji/ bulan..... : Rp. 111.274,-
- Iuran jaminan kesehatan BPJS Kesehatan..... : Rp. 25.500,-
- Tunjangan Hari Tua program BPJS Ketenagakerjaan.....: Rp. 134.584,-
- Fee/ keuntungan untuk Perusahaan ..... : Rp. 150.869,-
- Pajak untuk Perusahaan ..... : Rp. 203.673,-
- Jumlah..... : Rp. **2.240.000,-**

Terbilang : ( dua juta dua ratus empat puluh ribu)

- 4. Pengadaan Jasa dengan **Perorangan** ..... : Rp. 1.885.858,-

Di samping jasa Sopir dan Pengamanan Kantor, juga diberikan :

- ✓ Pakaian Dinas 1 kali / tahun :
  - (1). Pakaian Dinas Sopir : Rp. 350.000,-
  - (2). Pakaian Dinas Pengamanan Kantor : Rp. 750.000,-
- ✓ Tunjangan Hari Raya 1 tahun sebesar 1 kali jasa yang diterima setiap bulan.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH

**Dr.H. ALI ASMAR, M.Pd**  
 Pembina Utama  
 NIP. 19580705 197903 1 004

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Prov. Sumbar  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Tanggal : Agustus 2016  
Nomor : 061/ / Org- 2016  
Perihal : **Sosialisasi penambahan iuran THT PT. Taspen ( Persero ).**

---

Dengan hormat,

Sehubungan surat dari Kepala PT. Taspen ( Persero ) Cabang Padang nomor SRT-336/C.2.4/082016 tanggal 18 Agustus 2016, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa acara sosialisasi ini direncanakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 mendatang. Narasumber acara tersebut adalah Kepala PT. TASPEN ( Persero) Cabang Padang, dengan peserta terdiri dari utusan Biro-Biro di lingkungan Setda.

Tujuan sosialisasi adalah memberikan informasi tentang kenaikan premi THT PNS dimana selama ini telah dipotong gaji PNS setiap bulannya sebesar 6 % dari gaji pokok, dan direncanakan akan dinaikkan/ ditambah sebesar RP. 200.000,- /bulan.

Apabila PNS setuju dengan kenaikan sebesar Rp. 200.000,-/ bulan per orang tersebut maka manfaat yang akan diperoleh pada saat pensiun jauh lebih besar dari yang ada sekarang. Sedangkan uang premi penambahan THT tersebut akan dikelola oleh PT. Asuransi Jiwa TASPEN, Gedung Arthaloka lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2 Jakarta, yang merupakan anak perusahaan PT. Taspen ( Persero ).

Demikian disampaikan, sekiranya Bapak setuju dimohon kiranya menandatangani surat undangan terlampir, terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**Drs. H. NASIR AHMAD, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610929 198211 1 001

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 090

**SEKRETARIS DAERAH**

**Dr.H. ALI ASMAR, M.Pd**  
Pembina Utama  
NIP. 19580705 197903 1 004

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Pj. Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan ).

## NOTA DINAS

Kepada : 1.Sdr. Kepala Biro di lingkungan Setda. Prop. Sumbar  
2.Sdr. Sekretaris KPU Prop. Sumbar

Dari : Kepala Biro Organisasi

Tanggal : 9 Juni 2014

Nomor : 061/ / Org- 2014

Perihal : **Pengisian Data Individu Peserta PT. TASPEN.**

---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala BKD Prop. Sumbar Nomor 2872/BKD/III-2014 tanggal 5 Juni 2014 perihal Pengisian Data Individu Peserta PT. ( Persero) TASPEN, bersama ini disampaikan bahwa nama-nama PNS yang tertera pada lampiran surat dari PT. Taspen Cabang Padang (terlampir) agar dapat mengisi blangko Data Individu Peserta Taspen.

Pengisian blangko tersebut diharapkan telah diserahkan pada Biro Organisasi paling lambat tanggal 17 Juni 2014, untuk selanjutnya diserahkan secara kolektif kepada PT (Persero) Taspen Cabang Padang.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO ORGANISASI

**ONZUKRISNO, SH,M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640825 198611 1 001

Dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil agar dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sangat diperlukan data dan informasi tentang kondisi sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan pengisian kuesioner Peningkatan Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat ini adalah untuk memperoleh informasi yang jelas sebagai bahan/ data dalam membuat analisis dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara kiranya dapat menyampaikan blangko lembaran Peningkatan Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan menginstruksikan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Unit Kerja Sdr. untuk mengisi kuesioner dimaksud ( terlampir).

Pengembalian blangko kuesioner ini diharapkan telah diterima selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 2014 kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

**Dr.H. ALI ASMAR, M.Pd**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580705 197903 1 004

Tembusan kepada :

5. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat( sebagai laporan )
6. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan ).

## NOTA DINAS

Kepada : Kepala Bidang DPKD Provinsi Sumatera Barat  
Dari : Kepala Biro Organisasi  
Tembusan : Kepala DPKD Prov. Sumbar  
Tanggal : 18 Maret 2014  
Nomor : 061/ / Org- 2014  
Perihal : **Besaran anggaran biaya tenaga Sopir, Cleanning Service, dan Pengaman Kantor.**

---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan disposisi Bapak Sekda tanggal 6 Desember 2013 tentang Laporan hasil rapat tenaga alih daya / Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, bersama ini disampaikan kepada Sdr. Besaran Rincian Biaya anggaran biaya tenaga alih daya / Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain, untuk dimasukkan pada Lampiran Peraturan Gubernur tentang Standar Anggaran Biaya APBD Sumbar Tahun Anggaran 2014.

Besaran anggaran biaya tenaga alih daya / Penyerahan  
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain.

**GAJI SOPIR , CLEANNING SERVICE, PENGAMANAN KANTOR :**

Terdiri dari :

1. Gaji sesuai UMP (Pergub Nomor 562-846-2014) : Rp. **1.490.000,-**
2. Iuran jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan : RP. 151.940,-  
( **10,2 %** x Rp. 1.490.000,- ) ( per bulan/ per orang )
- Jumlah ..... : Rp. **1.641.940,-**

Terbilang :( *Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah* )

:

Di samping besaran tersebut , ditambah lagi :

1. Bagi tenaga **Satuan Pengamanan** dialokasikan anggaran untuk Pakaian seragam sebesar Rp. 750.000,-/ tahun 1 stel , sudah termasuk Sepatu )
2. Tunjangan Hari Raya 1 kali setahun sebesar : Rp. 1.490.000,-

Rincian Iuran Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan sebesar **10,2 %**,  
terdiri dari 3 jenis Jaminan:

- 1. *Tunjangan Hari Tua = 5,7 % dibayar oleh Pekerja sebesar 3,7 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2 %*
- 2. *Tunjangan Kecelakaan , dibayarkan oleh Pengusaha*
- 3. *Tunjangan Kematian , dibayarkan oleh Pengusaha*
- *Iuran BPJS Kesehatan = 4,5 % dibayar oleh Pekerja sebesar 2 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2,5%*



3. Keuntungan (*fee*) untuk Perusahaan untuk per orangnya : Rp.  
337.000,-  
(sekiranya diadakan Perjanjian Kontrak dg. Pihak Ketiga )

Pajak pph. pasal 21:

- 5 % untuk Perseorang bagi yang punya NPWP
- 10 % untuk Perseorangan bagi yang tidak punya NPWP

Jumlah : ..... : Rp. 2.214.940,-

Dibulatkan menjadi ..... Rp. **2.215.000,-**

Keterangan :

1. Rp. **2.215.000,-** sekiranya diadakan Perjanjian Kontrak dg. Pihak Ketiga
2. Rp. **1.878.000,-** sekiranya dilakukan Penunjukan Langsung secara Individu

**GAJI SOPIR , CLEANNING SERVICE, PENGAMANAN KANTOR :**

Terdiri dari :

- 4. Gaji sesuai UMP (Pergub Nomor 562-846-2014) : Rp. **1.490.000,-**
- 5. Pakaian seragam (Rp. 600.000,-/ tahun 1 stel ) : Rp. 600.000,-
- 6. Tunjangan Hari Raya ( 1 x Rp. 1.490.000,- ) : Rp. 1.490.000,-
- 7. Iuran jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan : RP. 151.940,-  
( **10,2 %** x Rp. 1.490.000,- ) ( per bulan/ per orang )

Rincian Iuran Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan sebesar **10,2 %**, terdiri dari 3 jenis Jaminan:

- 1. *Tunjangan Hari Tua = 5,7 % dibayar oleh Pekerja sebesar 3,7 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2 %*
- 2. *Tunjangan Kecelakaan , dibayarkan oleh Pengusaha*
- 3. *Tunjangan Kematian , dibayarkan oleh Pengusaha*
- *Iuran BPJS Kesehatan = 4,5 % dibayar oleh Pekerja sebesar 2 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2,5%*

- 8. Keuntungan (*fee*) untuk Perusahaan untuk per orangnya : Rp. 337.000,-  
(sekiranya diadakan Perjanjian Kontrak dg. Pihak Ketiga )

- 9. Pajak pph. pasal 21:
  - 11 % untuk Perseorang bagi yang punya NPWP
  - 12 % untuk Perseorangan bagi yang tidak punya NPWP

Jumlah : ..... : Rp. 2.214.940,-

Dibulatkan menjadi ..... Rp. **2.215.000,-**

Keterangan :

- 3. *Rp. 2.215.000,- sekiranya diadakan Perjanjian Kontrak dg. Pihak Ketiga*
- 4. *Rp. 1.878.000,- sekiranya dilakukan Penunjukan Langsung secara Individu*

✓ Contact Person : Muzirwan, SH ( Biro Organisasi )  
HP. 08126622460, 081267278808

✓ Sumber Rujukan : YAYAT , S.Kom.  
HP. 085274024356  
**KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN DISNAKERTRANS PROV. SUMBAR**

SILVIANA, S.Sos : HP. 081977539839

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO ORGANISASI

ONZUKRISNO, SH,M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640825 198611 1 001

## NOTA DINAS

Kepada : Kepala Bidang DPKD Provinsi Sumatera Barat  
Dari : Kepala Biro Organisasi  
Tembusan : Kepala DPKD Prov. Sumbar  
Tanggal : 18 Maret 2014  
Nomor : 061/ / Org- 2014  
Perihal : **Besaran anggaran biaya tenaga alih daya / Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain.**

---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan disposisi Bapak Sekda tanggal 6 Desember 2013 tentang Laporan hasil rapat tenaga alih daya / Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, bersama ini disampaikan kepada Sdr. Besaran Rincian Biaya anggaran biaya tenaga alih daya / Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain, untuk dimasukkan pada Lampiran Peraturan Gubernur tentang Standar Anggaran Biaya APBD Sumbar Tahun Anggaran 2014.

### **GAJI SOPIR , CLEANNING SERVICE, PENGAMANAN KANTOR :**

Terdiri dari :

13	Gaji sesuai UMP Pergub Nomor 562-846-2014	:	Rp.
	<b>1.490.000,-</b>		
14	Pakaian seragam (9 bulan x 58.500,- = Rp. 600.000,-/ tahun)	:	Rp.
	58.500,-		
15	Iuran jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan	:	RP.
	151.940,-		
	( <b>10,2 %</b> x Rp. 1.490.000,- )		
16	Tunjangan Hari Raya ( 9 % x Rp. 1.490.000,- )	:	Rp.
	166.000,-		
17	Keuntungan ( <i>fee</i> ) untuk Perusahaan untuk per orangnya	:	<u>Rp.</u>
	<u>337.000,-</u>		
	Jumlah : .....		Rp. 2.203.440,-

Dibulatkan menjadi ..... Rp. **2.204.000,-**

( TERBILANG : *Dua Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah* )

Rincian Iuran Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan sebesar **10,2 %**, terdiri dari 3 jenis Jaminan:

- 1. *Tunjangan Hari Tua = 5,7 % dibayar oleh Pekerja sebesar 3,7 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2 %*
- 2. *Tunjangan Kecelakaan , dibayarkan oleh Pengusaha*
- 3. *Tunjangan Kematian , dibayarkan oleh Pengusaha*
- *Iuran BPJS Kesehatan = 4,5 % dibayar oleh Pekerja sebesar 2 %*

*dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2,5%*

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO ORGANISASI

**ONZUKRISNO, SH,M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 19640825 198611 1 001

Rincian Iuran Jamsostek/ BPKS Ketenagakerjaan sebesar **10,2** %, terdiri dari 3 jenis Jaminan:

- Tunjangan Hari Tua = **5,7** % dibayarkan oleh Pekerja sebesar 3,7 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2 %
- Tunjangan Kecelakaan = dibayarkan oleh Pengusaha
- Tunjangan Kematian = dibayarkan oleh Pengusaha
- Iuran BPJS Kesehatan = **4,5** % dibayarkan oleh Pekerja sebesar 2 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2,5%

## NOTA DINAS

Kepada : Kepala DPKD Provinsi Sumatera Barat  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Tembusan : 1. Kepala DPKD Prov. Sumbar  
2. Kabid Anggaran DPKD Prov. Sumbar  
Tanggal : 17 Maret 2014  
Nomor : 061/ / Org- 2014  
Perihal : **Besaran anggaran biaya tenaga alih daya / Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain.**

---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan disposisi Bapak Sekda tanggal 6 Desember 2013 tentang Laporan hasil rapat tenaga alih daya / Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, bersama ini disampaikan kepada Sdr. Besaran Rincian Biaya anggaran biaya tenaga alih daya / Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain, untuk dimasukkan pada Lampiran Pergub tentang Standar Anggaran Biaya APBD Sumbar Tahun Anggaran 2014.

### GAJI SOPIR , CLEANNING SERVICE, PENGAMANAN KANTOR :

Terdiri dari :

18 Gaji sesuai UMP Pergub Nomor 562-846-2014	:	Rp.
<b>1.490.000,-</b>		
19 Pakaian seragam (9 bulan x 70.000,- = Rp. 600.000,-/ tahun)	:	Rp.
70.000,-		
20 Iuran Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan	:	RP.
151.940,-		
( <b>10,2 %</b> X Rp. 1.490.000,- )		
21 Tunjangan Hari Raya ( 9 % x Rp. 1.490.000,- )	:	Rp.
166.000,-		
22 Keuntungan ( <i>fee</i> ) untuk Perusahaan per orangnya	:	<u>Rp.</u>
<u>337.000,-</u>		

Jumlah :..... Rp. 2.214.940,-

Dibulatkan menjadi ..... Rp. **2.215.000,-**

Iuran Jamsostek/ BPKS Ketenagakerjaan sebesar **10,2 %**, terdiri dari 3 jenis Jaminan:

- Tunjangan Hari Tua = 5,7 % dibayarkan oleh Pekerja sebesar 3,7 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2 %

Tunjangan Kecelakaan = dibayarkan oleh Pengusaha  
Tunjangan Kematian = dibayarkan oleh Pengusaha

- Iuran BPJS Kesehatan = 4,5 % dibayarkan oleh Pekerja sebesar 2 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2,5%

.

.

1. CLEANING SERVICE:

a. **Upah/ gaji 1 bulan per orang** : Rp. 2.215.000,-

Terdiri dari :

23	Gaji sesuai UMP Pergub Nomor 562-846-2014 1.490.000,-	:	Rp.
24	Pakaian seragam (9 bulan x 70.000,- = Rp. 600.000,-/ tahun) 70.000,-	:	Rp.
25	Iuran Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan 151.940,- ( 10,2 % X Rp. 1.490.000,- )	:	RP.
26	Tunjangan Hari Raya ( 9 % x Rp. 1.490.000,- 166.000,-	:	Rp.
27	Keuntungan ( <i>fee</i> ) untuk Perusahaan per orangnya 337.000,-	:	Rp.

b. Iuran Jamsostek/ BPKS Ketenagakerjaan sebesar 10,2 %, terdiri dari 3 jenis Jaminan:

- Tunjangan Hari Tua = 5,7 % dibayarkan oleh Pekerja sebesar 3,7 %  
dibayarkan oleh Pekerja sebesar 2 %

Tunjangan Kecelakaan = dibayarkan oleh Pengusaha  
Tunjangan Kematian = dibayarkan oleh Pengusaha

- Iuran BPJS Kesehatan = 4,5 % dibayarkan oleh Pekerja sebesar 2 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2,5%

.

.

2. PENGAMANAN KANTOR :

c. **Upah/ gaji 1 bulan per orang** : Rp. 2.215.000,-

Terdiri dari :

28	Gaji sesuai UMP Pergub Nomor 562-846-2014 1.490.000,-	:	Rp.
29	Pakaian seragam (9 bulan x 70.000,- = Rp. 600.000,-/ tahun) 70.000,-	:	Rp.



30 Iuran Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan	:	RP.
151.940,-		
( 10,2 % X Rp. 1.490.000,- )		
31 Tunjangan Hari Raya ( 9 % x Rp. 1.490.000,-	:	Rp.
166.000,-		
32 Keuntungan ( <i>fee</i> ) untuk Perusahaan per orangnya	:	Rp.
337.000,-		

d. Iuran Jamsostek/ BPKS Ketenagakerjaan sebesar 10,2 %, terdiri dari 3 jenis Jaminan:

- Tunjangan Hari Tua = 5,7 % dibayarkan oleh Pekerja sebesar 3,7 %  
dibayarkan oleh Pekerja sebesar 2 %

Tunjangan Kecelakaan = dibayarkan oleh Pengusaha  
Tunjangan Kematian = dibayarkan oleh Pengusaha

- Iuran BPJS Kesehatan = 4,5 % dibayarkan oleh Pekerja sebesar 2 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2,5%

.  
.

agar diadakan rapat dengan SKPD terkait, bersama ini dilaporkan kepada Bapak bahwa telah dilaksanakan rapat dimaksud pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 dengan Pimpinan Rapat Kabag. Pendayagunaan Aparatur di Ruang Biro Organisasi.

Hasil resume rapat tersebut dapat kami laporkan, sebagai berikut :

## **1. Peserta rapat :**

- Syafnirwan, SH , Kabid Data dan Informasi BKD
- Drs.Azwar/ Sekretaris Inspektorat
- Silviana, S.Sos, M.Si / Kasubag. Anggaran DPKD
- Wery Ratna Darwis, SH/Kasubag Perundang-undangan Biro Hukum
- Nichamo Daeli/ Kasubag.Umum dan Kepegawaian Bappeda
- Kurnila Syofyani, SE/ Kasubag. Tata Usaha Biro Peng. Asset Daerah
- Edwin, SE/ Kasubag Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi

## **2. Agenda :** Pembahasan Ranpergub tentang Standar Anggaran Biaya Tenaga Alih Daya

### **3. Laporan Materi rapat :**

Mengenai standar biaya tenaga alih daya agar mengacu pada Pergub Nomor 44 Tahun 2013 pasal 6

1. Saran dari Syafnirwan/ BKD:  
Sebelum masuk substansi Ranpergub , agar didudukkan terlebih dahulu mekanisme alih daya, standar biaya, atau standarisasi harga barang dan jasa
2. Silviana/ DPKD, perlu dikaji tentang alih daya ini ; apa dasarnya, angka yang terdapat pada konsep ranpergub darimana didapat. Perlu kerjasama dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Edwin/ Disnakertrans,  
Dalam Keppres Nomor 54 Tahun 2010, sebenarnya CV tidak boleh melakukan / bertindak sebagai Penyedia Jasa , tetapi harus berbentuk PT .

Setelah mendengarkan masukan dan saran dari Peserta rapat, dicapai kesepakatan bahwa Biro Organisasi tidak perlu melakukan pengaturan yang berbentuk Peraturan Gubernur karena aturannya sudah ada , yakni :

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  2. Keppres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, pasal 36 ayat (1).
  3. Pergub Nomor 44 tahun 2013 tentang Standar Biaya APBD Sumbar Tahun Anggaran 2013
  4. Surat penegasan dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor B-3977/LKPP/D-IV.1.1/07 2013 tanggal 23 Juli 2013
- 
5. Permenaker Nomor 19/ Men/VI/2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain.

Untuk itu, perlu disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat, supaya memasukkan item Biaya Alih daya, seperti yang diusulkan sebelumnya,sbg :

▪ **Gaji Sopir, Cleanning Service dan Pengamanan Kantor :**

- Gaji 1 bulan : Rp. 1.490.000,- x 12 = **Rp.17.880.000,-**

*(Pertimbangan besaran tabel ini diusulkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 562-846-2013 tanggal 29 Oktober 2013 dimana besaran UMP Tahun 2014 sebesar Rp. 1.490.000 )*

- Pengeluaran lain – lain : 600.000,- x 12 = **Rp. 7.220.000,-**  
*( Alokasi Dana ini untuk THR, gaji ke 13 dan iuran Jamsostek)*

- Pembelian 1 pasang Baju seragam dan 1 stel Sepatu = **Rp. 550.000,-**

Total setahun (17.880.000 + 7.220.000 + 550.000 )..... = **Rp.25.650.000,-**

Nominal **Rp.25.650.000,-** ini sudah termasuk digit keuntungan untuk Pihak Ketiga, yakni apabila dilakukan Penunjukkan/ Pemilihan PIHAK KETIGA, seperti PT. Andalan Mitra Prestasi ( AMP ).

Usulan angka - angka tersebut di atas akan disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ( DPKD ) Prov. Sumbar agar dimasukkan pada rancangan Standar Anggaran Biaya APBD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 , yang nantinya bisa menjadi dasar/ payung hukum standar anggaran biaya tenaga alih daya, sehingga kita tidak perlu lagi membuat Pergub baru tentang Mekanisme Tenaga Alih Daya.

Demikian laporan hasil rapat ini disampaikan, mohon petunjuk dan arahan selanjutnya dari Bapak, terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 009

## NOTA DINAS

Kepada : Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Dari : Kepala Biro Organisasi  
Melalui Asisten Administrasi Umum  
Tembusan : -  
Tanggal : 21 April 2014  
Nomor : 061/ / Org- 2014  
Perihal : **Laporan tenaga Sopir, Cleanning Service dan Pengamanan Kantor.**

---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat edaran Sekda Nomor 800/1121/Org-2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Kebutuhan jasa Pengamanan Kantor dan Sopir yang ditujukan kepada seluruh SPKD, telah dilakukan oleh SKPD yang membutuhkan berupa pengadaan/ penyediaan tenaga Sopir, pengamanan kantor dan petugas Kebersihan. Berhubung belum ada rapat pembahasan sebelumnya sehingga dalam surat edaran tersebut tidak dicantumkan standar besaran upah/ gajinya, akibatnya masing-masing SKPD berbeda-beda memberikan besaran upah tenaga alih daya tersebut.

Untuk itu pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 telah dilakukan rapat pembahasan upah tenaga alih daya tersebut yang dilakukan oleh Bidang Anggaran DPKD Prop. Sumbar bersama dengan peserta dari SKPD di lingkungan Propinsi Sumatera Barat, dengan besaran sebagai berikut :

▪ **Gaji Sopir, Cleanning Service dan Pengamanan Kantor :**

- Gaji 1 bulan .....	=	Rp. 1.588.000,-
- Iuran BPJS Ketenagakerjaan (10,2% x 1.588.000,- )	=	<u>Rp. 162.000,-</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>=</b>	<b>Rp. 1.750.000,-</b>

( Untuk perorangan )

Rincian iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar **10,2 %** dari Gaji Pokok , meliputi :

1. THT , Tunjangan Kecelakaan, dan tunjangan Kematian = 5,7 %
2. Iuran BPJS Kesehatan = 4,5 %

- Gaji 1 bulan .....	=	Rp. 1.588.000,-
- Iuran BPJS Ketenagakerjaan (10,2% x 1.588.000,- )	=	Rp. 162.000,-
- Fee ( keuntungan ) untuk pihak Ketiga ( Perusahaan)=		<u>Rp. 252.000,-</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>=</b>	<b>Rp. 2.000.000,-</b>

( Jika dilakukan Pihak Ketiga )

❖ Di samping gaji, juga diberikan **Baju seragam** dan **THR** sekali setahun, sebagai berikut:

- Pembelian 1 pasang Baju seragam ( 1 kali dalam setahun )	=	Rp. 250.000,-
- Khusus tenaga Pengamanan Kantor	=	Rp. 750.000,-
- THR 1 bulan gaji/ per tahun.	=	Rp. 1.588.000,-

Besaran upah tenaga Sopir, Cleaning Service, dan Pengamanan Kantor tersebut nantinya dituangkan dalam Lampiran Pergub Standar Anggaran Biaya APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2014, untuk dipedomani oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, mohon petunjuk dan arahan selanjutnya dari Bapak, terima kasih.

PLH. KEPALA BIRO ORGANISASI

**Drs. YASTRI ALPHIAN**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650316 199308 1 001

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 009

Padang, 15 April 2014

## BIRO ORGANISASI

Keterangan;

Rincian Iuran Jamsostek/ BPKS Ketenagakerjaan sebesar **10,2 %**, terdiri dari 3 jenis Jaminan:

- Tunjangan Hari Tua = **5,7 %** dibayarkan oleh Pekerja sebesar 3,7 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2 %  
  
Tunjangan Kecelakaan = dibayarkan oleh Pengusaha  
Tunjangan Kematian = dibayarkan oleh Pengusaha
- Iuran BPJS Kesehatan = **4,5 %** dibayarkan oleh Pekerja sebesar 2 %  
dibayarkan oleh Pengusaha sebesar 2,5%

tanggal 21 Oktober 2013 agar diadakan rapat dengan SKPD terkait, bersama ini dilaporkan kepada Bapak bahwa telah dilaksanakan rapat dimaksud pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 dengan Pimpinan Rapat Kabag. Pendayagunaan Aparatur di Ruang Biro Organisasi.

Hasil resume rapat tersebut dapat kami laporkan, sebagai berikut :

**2. Peserta rapat :**

- Syafnirwan, SH , Kabid Data dan Informasi BKD
- Drs.Azwar/ Sekretaris Inspektorat
- Silviana, S.Sos, M.Si / Kasubag. Anggaran DPKD
- Wery Ratna Darwis, SH/Kasubag Perundang-undangan Biro Hukum
- Nichamo Daeli/ Kasubag.Umum dan Kepegawaian Bappeda
- Kurnila Syofyani, SE/ Kasubag. Tata Usaha Biro Peng. Asset Daerah
- Edwin, SE/ Kasubag Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi

**2. Agenda :** Pembahasan Ranpergub tentang Standar Anggaran Biaya Tenaga Alih Daya

**3. Laporan Materi rapat :**

Mengenai standar biaya tenaga alih daya agar mengacu pada Pergub Nomor 44 Tahun 2013 pasal 6

4. Saran dari Syafnirwan/ BKD:  
Sebelum masuk substansi Ranpergub , agar didudukkan terlebih dahulu mekanisme alih daya, standar biaya, atau standarisasi harga barang dan jasa
5. Silviana/ DPKD, perlu dikaji tentang alih daya ini ; apa dasarnya, angka yang terdapat pada konsep ranpergub darimana didapat. Perlu kerjasama dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Edwin/ Disnakertrans,  
Dalam Keppres Nomor 54 Tahun 2010, sebenarnya CV tidak boleh melakukan / bertindak sebagai Penyedia Jasa , tetapi harus berbentuk PT .

Setelah mendengarkan masukan dan saran dari Peserta rapat, dicapai kesepakatan bahwa Biro Organisasi tidak perlu melakukan pengaturan yang berbentuk Peraturan Gubernur karena aturannya sudah ada , yakni :

6. Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Keppres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, pasal 36 ayat (1).
8. Pergub Nomor 44 tahun 2013 tentang Standar Biaya APBD Sumbar Tahun Anggaran 2013
9. Surat penegasan dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor B-3977/LKPP/D-IV.1.1/07 2013 tanggal 23 Juli 2013



10. Permenaker Nomor 19/ Men/VI/2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain.

Untuk itu, perlu disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat, supaya memasukkan item Biaya Alih daya, seperti yang diusulkan sebelumnya, sbg :

▪ **Gaji Sopir, Cleaning Service dan Pengamanan Kantor :**

- Gaji 1 bulan : Rp. 1.490.000,- x 12 = **Rp.17.880.000,-**

*(Pertimbangan besaran tabel ini diusulkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 562-846-2013 tanggal 29 Oktober 2013 dimana besaran UMP Tahun 2014 sebesar Rp. 1.490.000 )*

- Pengeluaran lain – lain : 600.000,- x 12 = **Rp. 7.220.000,-**  
*( Alokasi Dana ini untuk THR, gaji ke 13 dan iuran Jamsostek)*

- Pembelian 1 pasang Baju seragam dan 1 stel Sepatu = **Rp. 550.000,-**

Total setahun (17.880.000 + 7.220.000 + 550.000 )..... = **Rp.25.650.000,-**

Nominal **Rp.25.650.000,-** ini sudah termasuk digit keuntungan untuk Pihak Ketiga, yakni apabila dilakukan Penunjukkan/ Pemilihan PIHAK KETIGA, seperti PT. Andalan Mitra Prestasi ( AMP ).

Usulan angka - angka tersebut di atas akan disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ( DPKD ) Prov. Sumbar agar dimasukkan pada rancangan Standar Anggaran Biaya APBD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 , yang nantinya bisa menjadi dasar/ payung hukum standar anggaran biaya tenaga alih daya, sehingga kita tidak perlu lagi membuat Pergub baru tentang Mekanisme Tenaga Alih Daya.

Demikian laporan hasil rapat ini disampaikan, mohon petunjuk dan arahan selanjutnya dari Bapak, terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 009

## NOTA DINAS

Kepada : Kepala Biro Organisasi  
Dari : Kasubag. Analisa Kebijakan dan Pengembangan Aparatur  
Tembusan : Kabag. Pendayagunaan Aparatur  
Tanggal : 16 September 2013  
Perihal : **Laporan koordinasi tentang outsourcing/ alih daya .**

---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan disposisi Bapak Sekda dan Asisten Administrasi Umum tanggal 22 dan 23 Agustus 2013, telah dilakukan konsultasi/ koordinasi dengan pihak terkait.

Dari konsultasi dengan DPKD diperoleh hasil, bahwa untuk bisa dilakukan penganggaran tenaga outsourcing dibutuhkan dasar hukum berupa Peraturan Gubernur. Menurut pihak DPKD, tugas membuat draft Pergub ini adalah Biro Organisasi. Sementara itu dari hasil kesepakatan rapat-rapat sebelumnya, SKPD lain yang juga memperoleh tugas adalah Biro Pengelolaan Aset Daerah yang tugasnya adalah menghitung dan menetapkan Standar Biaya Upah/ gaji tenaga outsourcing, yang nantinya dituangkan ke dalam Pergub.

Di sisi lain, menurut Kabid Anggaran (Risa Bur) terjadi paradoks dalam pengadaan tenaga outsourcing. Sisi pertama, outsourcing tidak dibenarkan sesuai PP Nomor 56 Tahun 2012 dan Surat edaran Mendagri Nomor 814.1/169/SJ/2013 sementara di sisi lain pihak Setjen Kemendagri masih menerima tenaga outsourcing sebanyak 130 Orang, begitu juga di Propinsi Jawa Barat. Untuk mengatasi pelarangan tenaga outsourcing tersebut, saat ini tengah dilakukan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian dan BUMN.

Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan BKD Propinsi (Sekretaris BKD) dan diperoleh hasil bahwa untuk pengadaan tenaga outsourcing tersebut - walaupun dilarang, pihak BKD Sumbar atas dasar kebutuhan yang mendesak semenjak tanggal 1 Juli 2013 telah melakukan penerimaan tenaga outsourcing sebanyak 4 orang, yang terdiri 1 orang Sopir dan 3 orang tenaga Pengaman Kantor . Anggaran untuk pengadaan tenaga outsourcing tersebut diambilkan dari jasa pengaman kantor (terlampir draft Surat Kontrak Perjanjian dengan PT AMP). Saat ini SKPD yang telah melakukan pengadaan outsourcing sebagaimana BKD adalah Dinas Nakertrans, Inspektorat dan Dinas PSDA. Hal yang memperkuat untuk pengadaan tenaga Outsourcing tersebut adalah adanya Surat dari Direktur Bimbingan Teknis dan Advokasi ( Reifeldi ) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan Nomor B-3977/LKPP/D-IV.1/07/2013 tanggal 23 Juli 2013.

Pada point 2 surat tersebut, berbunyi “ *Sehubungan dengan pengadaan jasa pengamanan kantor dan jasa Sopir, dapat dilakukan dengan pemilihan penyedia badan usaha atau dapat dilakukan dengan orang-perseorangan dengan Pengadaan Langsung bilamana nilainya dibawah 200 juta rupiah untuk masing-masing orang ( pasal 39 ayat 1 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.*

Pada point 3 dan 4 surat tersebut berbunyi “ *Kegiatan pengadaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan untuk tenaga perorangan, dimana PPK melakukan penandatanganan kontrak langsung dengan masing-masing personil tenaga kontrak serta disesuaikan dengan peraturan yang bahea tidak ada jaminan pengangkatan (poin3 ). Acuan standar upah untuk tenaga kontrak dapat mengacu minimal pada Standar Upah Minimum di lokasi tempat dimana pekerjaan dilaksanakan.(point 4 )*

Jika dilihat dari hasil konsultasi tersebut, alternatif untuk melakukan pengadaan tenaga outsourcing adalah dengan menganggarkan pada kegiatan Bagian Rumah Tangga Biro Umum. Sedangkan tugas Biro Organisasi hanya untuk pengaturan keseragaman upah, agar jangn ada yang upah yang tinggi dan ada pula upah yang rendah.

Demikian laporan koordinasi ini disampaikan, mohon petunjuk dan arahan selanjutnya dari Bapak, terima kasih.

KASUBAG. ANALISA KEBIJAKAN  
DAN PENGEMBANGAN APARATUR

**MUZIRWAN, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19670605 199703 1 006

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth.Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Tembusan : -  
Tanggal : 1 2013  
Perihal : Sharring informasi tentang program BPJS bidang Kesehatan ke Kantor Regional PT. ( Persero ) ASKES Pekanbaru.

---

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan DPA Biro Organisasi Tahun Anggaran 2013 terdapat kegiatan Kajian Kualitas Pelayanan Askes Terhadap PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana hasil kerjanya berupa Buku tentang Pelayanan Askes terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .
2. Sejalan dengan kegiatan tersebut, dalam rangka mensukseskan rencana pemerintah tentang pemberlakuan Badan Pengelola Jaminan Sosial ( BPJS ) Bidang Kesehatan

sebagai ganti dari PT. (Persero) Askes yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2014 mendatang, sesuai tupoksi kita juga berkewajiban untuk mensukseskan program pemerintah tersebut. Untuk itu sangat diperlukan data dan informasi seputar BPJS Bidang Kesehatan yang nantinya akan disosialisasikan kepada PNS di lingkungan Setda. Prov. Sumbar.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini ditugaskan PNS dari Biro Organisasi, sebagai berikut :

1. **Muzirwan,SH**, III/d, jabatan Kasubag. Analisa Kebijakan dan Pengembangan Aparatur
2. **Yufnida, S.Sos**, III/b, Staf Kasubag. Analisa Kebijakan dan Pengembangan Aparatur
3. **Firdaus** , II/b, Staf Subag. Analisa Kebijakan dan Pengembangan Aparatur untuk melakukan pengumpulan informasi tentang Askes dan sharring informasi tentang program BPJS Kesehatan ke Kantor Regional PT.( Persero ) Askes Pekanbaru

Biaya perjalanan dinas ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Setda Prop. Sumbar tahun Anggaran 2013 kegiatan Kajian Kualitas Pelayanan Askes Terhadap PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan hal tersebut, sekiranya Bapak setuju dimohon berkenan Bapak untuk menyetujui perjalanan dinas selama **3** ( tiga ) hari mulai tanggal 6 s/d 8 Nopember 2013 ke Pekanbaru Provinsi Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19561231 198003 1 090

KISI – KISI : **MATERI RAPAT TENTANG PERGUB STANDAR BIAYA ALIH DAYA/ SYARAT- SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN**

( SELASA TANGGAL 19 NOPEMBER 2013 )

1. Dasar :

Surat Sekda Prop.Sumbar Nomor 800/1121/Org-2013 tanggal 21 Oktober yang ditandatangani Bapak PLH Sekda Drs.H. Syafrial. S , tentang Kebutuhan Jasa Pengamanan Kantor dan Sopir, dimana telah dikirimkan surat ke seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kecuali RSUD/RSJ karena ke 4nya sudah BLUD. Intinya : bagi SKPD yang membutuhkan telah dapat melakukan pengadaan tenaga alihdaya untuk Tenaga SOPIR, dan JASA PENGAMANAN KANTOR,

Surat ini memperkuat surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor B-3977/LKPP/D-IV.1.1/07/2003 Tanggal 23 Juli 2013.

Seharusnya Surat Sekda tersebut juga dilampirkan Daftar Standar Anggaran Biaya Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang menetapkan Upah dari Sopir, Cleanning Service, dan Pengamanan kantor. Akan tetapi Bapak Syafrial S. selaku PLH. Sekda hanya memberikan disposisi :” Karena ini prinsip dan persetujuan Bapak Gubernur maka sebaiknya kita tunggu Pak Sekda hari Senin 28/10 masuk Kantor.

Kemudian Lampiran Surat tersebut diteruskan kepada Bapak Sekda sepulang haji, dan diberikan disposisi “ *Agar dirapatkan dulu dengan Biro Hukum, DPKD, Biro P.Asset dan DPKD.*”

2. Inti rapat pada hari ini adalah untuk menetapkan besaran biaya Standar Anggaran Biaya Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dimana Biro Organisasi telah mengajukan usul sbg:

**Gaji Sopir, Cleanning Service dan Pengamanan Kantor :**

- Gaji 1 bulan sebesar : Rp. 1.400.000,-  
Pertimbangan besaran tabel ini diusulkan karena UMP sebelumnya Rp. 1.350.000,- jadi di atas UMP Sebesar RP. 50.000,- namun dalam perkembangan terakhir berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 562-846-2013 tanggal 29 Oktober 2013 telah ditetapkan besaran UMP adalah Rp. 1.490.000,-
- Pengeluaran lain – lain : 600.000,-  
Dana ini untuk THR, dan iuran Jamsostek Baju seragam Rp. 550.000,-  
Total setahun..... Rp.2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000,-  
Kemudian ditambah paket Baju Seragam dan 1 stel Sepatu, sehingga totalnya Rp. 24.550.000,-

Nominal Rp. 24.550.000,- ini sudah termasuk keuntungan Pihak Ketiga , apabila dilakukan Penunjukkan/ Pemilihan PIHAK KETIGA, seperti PT. Andalan Mitra Persada ( AMP )

3. Draft Pergub ini dikaitkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.19/MEN/X/2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
4. Berhubung Pergub ini sangat ditunggu oleh semua Pihak, maka kami mengharapkan kepada Peserta Rapat untuk memberikan saran untuk perbaikan Pergub ini, untuk selanjutnya dilakukan proses legal drafting .

**SUBSTANSI RANPERGUB:**

Pada konsiderans Menimbang dimasukkan Surat Gubernur Nomor 800/617/BKD tentang larangan pengangkatan tenaga Honorer

5. Konsideran mengingat dimasukkan UU Nomor 32 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan juga Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19/MEN/KK/VI/2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
6. Pada Ketentuan Umum, dimuat pengertian Sopir, Pengaman kantor, Penyediaan Jasa Kebersihan, Penyediaan Makanan bagi Pegawai/Catering dan Penyedia Jasa Pertambangan
7. Pasal 4 ayat 3 Standar Anggaran Biaya tenaga Kontrak tidak dibolehkan berada di bawah Standar UMP,
8. Pasal 8, Mekanisme syarat-syarat kontrak antara Penyedia Jada dengan Pekerja Kontrak ditetapkan oleh Permenaker Nomor 19 TAHUN 2012 TENTANG Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain.
9. Pasal 10 : Pekerja kontrak harus diikutsertakan pada Program Jamsostek
10. Pasal 12, pekerja yang diPHK harus diberi uang Pesangon
- 11.
- 12.

disposisi Bapak Sekda dan Asisten Administrasi Umum tanggal 22 dan 23 Agustus 2013, telah dilakukan konsultasi/ koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini DPKD dan BKD Provinsi.

Dari konsultasi dengan DPKD diperoleh hasil, bahwa untuk bisa dilakukan penganggaran tenaga outsourcing dibutuhkan dasar hukum berupa Peraturan Gubernur. Menurut pihak DPKD, tugas membuat draft Pergub ini adalah Biro Organisasi. Sementara itu dari hasil kesepakatan rapat-rapat sebelumnya, SKPD lain yang juga memperoleh tugas adalah Biro Pengelolaan Aset Daerah yang tugasnya adalah menghitung dan menetapkan Standar Biaya Upah/ gaji tenaga outsourcing, yang nantinya dituangkan ke dalam Pergub.

Di sisi lain, menurut Kabid Anggaran (Risa Bur) terjadi paradoks dalam pengadaan tenaga outsourcing. Sisi pertama, outsourcing tidak dibenarkan sesuai PP Nomor 56 Tahun 2012 dan Surat edaran Mendagri Nomor 814.1/169/SJ/2013 sementara di sisi lain pihak Setjen Kemendagri masih menerima tenaga outsourcing sebanyak 130 Orang, begitu juga di Propinsi Jawa Barat. Untuk mengatasi pelarangan tenaga outsourcing tersebut, saat ini tengah dilakukan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian dan BUMN.

Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan BKD Propinsi (Sekretaris BKD) dan diperoleh hasil bahwa untuk pengadaan tenaga outsourcing tersebut - walaupun dilarang, pihak BKD Sumbar atas dasar kebutuhan yang mendesak semenjak tanggal 1 Juli 2013 telah melakukan penerimaan tenaga outsourcing sebanyak 4 orang, yang terdiri 1 orang Sopir dan 3 orang tenaga Pengaman Kantor . Anggaran untuk pengadaan tenaga outsourcing tersebut diambilkan dari jasa pengaman kantor (terlampir draft Surat Kontrak Perjanjian dengan PT AMP). Saat ini SKPD yang telah melakukan pengadaan outsourcing sebagaimana BKD adalah Dinas Nakertrans, Inspektorat dan Dinas PSDA. Hal yang memperkuat untuk pengadaan tenaga Outsourcing tersebut adalah adanya Surat dari Direktur Bimbingan Teknis dan Advokasi ( Reifeldi ) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan Nomor B-3977/LKPP/D-IV.1/07/2013 tanggal 23 Juli 2013.

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Dari : Sekretaris Daerah  
Tembusan : -  
Tanggal : 1 Oktober 2013  
Perihal : **Laporan tindaklanjut pelaksanaan tenaga outsourcing / alih daya.**

---

Dengan hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti rencana pengadaan tenaga outsourcing / alih daya berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 yang dikenal dengan istilah Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, dapat disampaikan kepada Bapak, hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya larangan penerimaan tenaga Honorer dan tidak adanya formasi penerimaan tenaga Sopir, Pengaman Kantor dan tenaga Kebersihan, telah dilakukan beberapa kali rapat dengan Instansi terkait dengan pengangkatan tenaga outsourcing, terakhir dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 yang bertempat di ruangan Asisten Administrasi Umum dan dihadiri oleh Instansi terkait ( Daftar Hadir terlampir ).
2. Dari hasil keputusan rapat tersebut diperoleh beberapa kesepakatan, antara lain:
  - a. Dasar hukumnya adalah Kepmenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Atas dasar itu, terdapat 5 jenis tenaga penunjang yang dapat dilaksanakan, yakni **tenaga Sopir, tenaga Pengaman Kantor, Petugas Kebersihan, Catering dan Jasa Pertambangan.**
  - b. Berdasarkan surat dari Direktur Bimbingan Teknis dan Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor B-3977/LKPP/D-IV.1.1./07/2013 tanggal 23 Juli 2013 perihal Arahan/ solusi Pengadaan Jasa Tenaga Sopir, Pengaman Kantor dan Kebersihan, disebutkan antara lain :

dapat dilaksanakan dengan Pemilihan **Badan Usaha** yang berbentuk PT.(Persero ) atau dapat dilakukan **dengan perorangan** dengan membuat **Penunjukan langsung secara individu**, yang ditandatangani oleh Pembina Pengawas tenaga Kerja (PPK) sesuai UMP dan tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi CPNS.

- c. Upah dari Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain ini dapat dialokasikan pada biaya operasional Kantor pada masing-masing SKPD dan tidak dianggarkan langsung seperti alokasi dana untuk 14 ( empat belas ) orang Pegawai Honorer di lingkungan Setda. Propinsi Sumatera Barat, akan tetapi dalam Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain seperti tenaga Sopir, Pengaman Kantor dan Petugas Kebersihan, dimana pembiayaan jasanya hanya bisa dilaksanakan dalam operasional biaya kantor pada DPA Biro Umum dalam kegiatan/ kegiatan Rumah Tangga Biro Umum.
- d. Mengenai standar biaya untuk setiap Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, berpedoman pada Peraturan Gubernur



Nomor 44 Tahun 2013 pada pasal 6 ayat (1) tentang Standar Biaya APBD di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Untuk standar ini akan diseragamkan pada semua SKPD, yang rencana besarnya ditetapkan sebesar Rp. **24.550.000,-** ( terbilang *dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*). Draft rincian standar anggaran biaya terlampir, yang nantinya dimasukkan dalam Lampiran Pergub tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain pada tahun anggaran 2014.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan persetujuan Bapak. Terima kasih.

PLH. SEKRETARIS DAERAH

**DRS. H. SYAFRIAL.S**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19540609 1988111 001

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak PLH. Sekretaris Daerah  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Tembusan : -  
Tanggal : 22 Oktober 2013  
Perihal : **Standar Anggaran Biaya pelaksanaan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain.**

---

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/1121/ Org-2013 tanggal 21 Oktober 2013 (terlampir) dan disposisi Gubernur Sumatera Barat tanggal 3 Oktober 2013, akan diedarkan surat kepada semua SKPD yang membutuhkan tenaga Pengaman kantor, Sopir dan Cleaning Service. Pada surat dimaksud yang merupakan lampiran Peraturan Gubernur belum tercantum biaya pengeluaran dan upah Sopir, Pengamanan Kantor dan Cleaning Service, karena draft Pergubnya perlu penyempurnaan dan kesepakatan dengan SKPD terkait, seperti DPKD, BKD, Inspektorat, Bappeda dan Biro Pengelolaan Asset Daerah.

Sambil menunggu Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain dimaksud, perlu dilengkapi dengan lampiran biayanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Lampiran Daftar Biaya untuk Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, dimana besaran nominalnya telah disetujui oleh Gubernur Prop. Sumbar.

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 090

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Tembusan : -  
Tanggal : Nopember 2013  
Perihal : **Pergub tentang Standar Anggaran Biaya pelaksanaan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain.**

---

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/1121/ Org-2013 tanggal 21 Oktober 2013 (terlampir) dan disposisi Gubernur Sumatera Barat tanggal 3 Oktober 2013, telah diedarkan surat kepada semua SKPD yang membutuhkan tenaga Pengaman Kantor, Sopir dan Cleaning Service. Dalam lampiran surat tersebut tercantum standar biaya anggaran untuk per orangnya adalah sebesar Rp. 2.450.000,- yang telah disetujui oleh Bapak Gubernur.

2. Standar biaya anggaran untuk Sopir, Pengamanan Kantor dan Cleaning Service tersebut adalah Lampiran dari Peraturan Gubernur, yang masih perlu penyempurnaan dan kesepakatan dengan SKPD terkait, seperti DPKD, BKD, Inspektorat, Bappeda, Biro Hukum dan Biro Pengelolaan Asset Daerah. Setelah disepakati dan diperbaiki , akan diajukan ke Biro Hukum untuk legal draftingnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Surat Undangan Rapat Pembahasan draft Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Standar Anggaran Biaya pelaksanaan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain, yang direncanakan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 ( sebagaimana terlampir ).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**H. SUDIRMAN GANI, SH,MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 009

KEPALA BIRO ORGANISASI

**ONZUKRISNO, SH, M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640826 198611 1 001

Lampiran Daftar Biaya untuk Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, dimana besaran nominalnya telah disetujui oleh Gubernur Prop. Sumbar.

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 090

KEPALA BIRO ORGANISASI

**ONZUKRISNO, SH, M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640826 198611 1 001

i

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 090

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak PLH. Sekretaris Daerah  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Tembusan : -  
Tanggal : 22 Oktober 2013  
Perihal : **Rencana biaya pelaksanaan tenaga Sopir, Pengamanan Kantor dan Cleanning Service.**

---

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/1121/ Org-2013 tanggal 21 Oktober 2013 (terlampir) dan disposisi Gubernur Sumatera Barat tanggal 3 Oktober 2013, akan diedarkan surat kepada semua SKPD yang membutuhkan tenaga Pengaman kantor, Sopir dan Cleanning Service. Pada surat dimaksud yang merupakan lampiran Peraturan Gubernur belum tercantum biaya pengeluaran dan upah Sopir, Pengamanan Kantor dan Cleanning Service, karena draft Pergubnya perlu penyempurnaan dan kesepakatan dengan SKPD terkait, seperti DPKD, BKD, Inspektorat, Bappeda dan Biro Pengelolaan Asset Daerah.

Sambil menunggu Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain dimaksud, perlu dilengkapi dengan lampiran biayanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Lampiran Daftar Biaya untuk Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, dimana besaran nominalnya telah disetujui oleh Gubernur Prop. Sumbar.

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 090

**Daftar : Standar Anggaran Biaya Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain**

**1. SOPIR :**

Upah 1 bulan Rp. 2.000.000,-

Terdiri dari :

- Gaji 1 bulan : Rp. 1.490.000,-
- Pengeluaran lain-lain : Rp. 600.000,-
- Pembelian baju seragam  
dan 1 stel Sepatu : Rp. 550.000,- ( sekali setahun)

Total biaya 1 tahun : Rp. **24.550.000,-**

Terbilang : *(dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)*

**2. CLEANING SERVICE:**

Upah 1 bulan Rp. 2.000.000,-

Terdiri dari :

- Gaji 1 bulan : Rp. 1.490.000,-
- Pengeluaran lain-lain : Rp. 600.000,-
- Pembelian baju seragam  
dan 1 stel Sepatu : Rp. 550.000,- ( sekali setahun)

Total biaya 1 tahun : Rp. **24.550.000,-**

Terbilang : (*dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*)

**3. PENGAMAN KANTOR :**

Upah 1 bulan Rp. 2.000.000,-

Terdiri dari :

- Gaji 1 bulan : Rp. 1.400.000,-
- Pengeluaran lain-lain : Rp. 600.000,-
- Pembelian baju seragam  
dan 1 stel Sepatu : Rp. 550.000,- ( sekali setahun)

Total biaya 1 tahun : Rp. **24.550.000,-**

Terbilang : (*dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*)

Padang, Oktober 2013

PLH. SEKRETARIS DAERAH

**DRS. H. SYAFRIAL.S**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19540609 1988111 001

**Daftar : Standar Anggaran Biaya Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain**

3.

**SOPIR :**

Upah 1 bulan Rp. 2.000.000,-

Terdiri dari :

- Gaji 1 bulan : Rp. 1.400.000,-
- Pengeluaran lain-lain : Rp. 600.000,-
- Pembelian baju seragam  
dan 1 stel Sepatu : Rp. 550.000,- ( sekali setahun)

Total biaya 1 tahun : Rp. **24.550.000,-**

Terbilang : (*dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*)

**2. CLEANNING SERVICE:**

Upah 1 bulan Rp. 2.000.000,-



Terdiri dari :

- Gaji 1 bulan : Rp. 1.400.000,-
- Pengeluaran lain-lain : Rp. 600.000,-
- Pembelian baju seragam  
dan 1 stel Sepatu : Rp. 550.000,- ( sekali setahun)

Total biaya 1 tahun : Rp. **24.550.000,-**

Terbilang : *(dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)*

**3. PENGAMAN KANTOR :**

Upah 1 bulan Rp. 2.000.000,-

Terdiri dari :

- Gaji 1 bulan : Rp. 1.400.000,-
- Pengeluaran lain-lain : Rp. 600.000,-
- Pembelian baju seragam  
dan 1 stel Sepatu : Rp. 550.000,- ( sekali setahun)

Total biaya 1 tahun : Rp. **24.550.000,-**

Terbilang : *(dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)*

Padang, Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH

**DR.H. ALI ASMAR, M.Pd.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580705 197903 1 004

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

H. SUDIRMAN GANI, SH, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP.

, perlu dibuatkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tentang

rencana pengadaan tenaga outsourcing / alih daya berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 yang dikenal dengan istilah Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, dapat disampaikan kepada Bapak, hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya larangan penerimaan tenaga Honorer dan tidak adanya formasi penerimaan tenaga Sopir, Pengaman Kantor dan tenaga Kebersihan, telah dilakukan beberapa kali rapat dengan Instansi terkait dengan pengangkatan tenaga outsourcing, terakhir dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 yang bertempat di ruangan Asisten Administrasi Umum dan dihadiri oleh Instansi terkait ( Daftar Hadir terlampir ).
2. Dari hasil keputusan rapat tersebut diperoleh beberapa kesepakatan, antara lain:

- e. Dasar hukumnya adalah Kepmenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Atas dasar itu, terdapat 5 jenis tenaga penunjang yang dapat dilaksanakan, yakni **tenaga Sopir, tenaga Pengaman Kantor, Petugas Kebersihan, Catering dan Jasa Pertambangan.**
- f. Berdasarkan surat dari Direktur Bimbingan Teknis dan Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor B-3977/LKPP/D-IV.1.1./07/2013 tanggal 23 Juli 2013 perihal Arahan/ solusi Pengadaan Jasa Tenaga Sopir, Pengaman Kantor dan Kebersihan, disebutkan antara lain :

dapat dilaksanakan dengan Pemilihan **Badan Usaha** yang berbentuk PT.(Persero ) atau dapat dilakukan **dengan perorangan** dengan membuat **Penunjukan langsung secara individu**, yang ditandatangani oleh Pembina Pengawas tenaga Kerja (PPK) sesuai UMP dan tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi CPNS.

- g. Upah dari Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain ini dapat dialokasikan pada biaya operasional Kantor pada masing-masing SKPD dan tidak dianggarkan langsung seperti alokasi dana untuk 14 ( empat belas ) orang Pegawai Honorar di lingkungan Setda. Propinsi Sumatera Barat, akan tetapi dalam Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain seperti tenaga Sopir, Pengaman Kantor dan Petugas Kebersihan, dimana pembiayaan jasanya hanya bisa dilaksanakan dalam operasional biaya kantor pada DPA Biro Umum dalam kegiatan/ kegiatan Rumah Tangga Biro Umum.
- h. Mengenai standar biaya untuk setiap Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 pada pasal 6 ayat (1) tentang Standar Biaya APBD di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Untuk standar ini akan diseragamkan pada semua SKPD , yang rencana besarnya ditetapkan sebesar Rp.**2.450.000,-** ( terbilang *dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*). Draft rincian standar anggaran biaya terlampir, yang nantinya dimasukkan dalam Lampiran Pergub tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain pada tahun anggaran 2014.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan persetujuan Bapak. Terima kasih.

PLH. SEKRETARIS DAERAH

**DRS. H. SYAFRIAL.S**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19540609 1988111 001

**DAFTAR: PEMBIAYAAN TENAGA ALIH DAYA/ PENYERAHAN SEBAGIAN  
PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN PADA SKPD  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	JENIS TENAGA ALIH DAYA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
<b>A.</b>	<b>Sopir</b>				
	I. Belanja Bahan				
	a. Baju seragam sopir	Org	1 stel	Rp. 350.000	
	b. Sepatu	Org	1 pasang	Rp. 200.000	
	Jumlah.....				<b>Rp.550.000</b>
	II. Honor per bulan	orang	1 bln	Rp. 1.400.000,-	
	Biaya pengeluaran lain-lain	org	1	Rp. 100.000	
	a. Mengemudikan kendaraan pimpinan		1	Rp. 250.000	
	b. Mengemudikan kendaraan pegawai lain untuk acara tertentu		1	Rp. 50.000	
	c. Merawat dan membawa mobil dinas kebengkel		1	Rp. 50.000	
	d. Memanggil pegawai yang		1	Rp. 50.000	

	diperlukan pimpinan e. Membawa tas/berkas dan surat pimpinan f. Mengerjakan tugas-tugas tertentu dari pimpinan g. Melakukan perjalanan dinas		1	Rp. 200.000	
	<b>Jumlah</b>				Rp.1.500.000
	<b>Total biaya keseluruhan perorang</b>				Rp. 2.050.000
<b>B.</b>	<b>Cleaning Service</b> I. Belanja Bahan a. Baju seragam cleaning service b. Sepatu Jumlah  II. Honor yang terkait dengan out put kegiatan a. Membersihkan ruangan kantor dan halaman b. Menata dan merawat tanaman c. Menata ruang pimpinan dan ruang staf d. Menyiapkan ruang rapat e. Menyiapkan dan menyajikan ruang minum pegawai f. Membantu pegawai dalam tugas-tugas tertentu	Org Org  org	1 stel 1 psg  1 bln 1 1 1 1 1	Rp. 350.000 Rp. 200.000  Rp. 800.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 50.000	Rp.550.000
	<b>Jumlah</b>				Rp.1.500.000
	<b>Total biaya keseluruhan perorang</b>				Rp. 2.050.000
<b>C.</b>	<b>Satuan Pengaman</b> I. Belanja Bahan a. Seragam Satpam b. Sepatu Jumlah  II. Honor yang terkait dengan out put kegiatan a. Melaksanakan pengamanan di lingkungan kantor  b. Melakukan pemeriksaan pada setiap tamu c. Memeriksa setiap mobil yang masuk ke area kantor d. Menjaga kantor pada siang hari/malam hari e. Mengantar berkas/surat dari pimpinan ke pegawai lain f. Menutup gerbang/stand by di posko g. Menertibkan parkir mobil	Org  Org  org	1 stel 1 psg  1 bln 1 1 1 1 1 1	Rp. 350.000 Rp. 200.000  Rp. 800.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 250.000 Rp. 100.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000	Rp.550.000

	<b>Jumlah</b>				Rp.1500.000
	<b>Total biaya keseluruhan perorang</b>				Rp. 2.050.000

SEKRETARIS DAERAH

**DR.H. ALI ASMAR, M.Pd.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580705 197903 1 004

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Asisten Administrasi Umum  
Dari : Kepala Biro Organisasi  
Tanggal : 1 Oktober 2013  
Lampiran : -  
Perihal : **Perjalanan dinas ke Kota Solok menghadiri launching PPK BLUD RSUD Solok.**

---

Dengan hormat,

Untuk memenuhi undangan Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat mewakili Kepala Biro Organisasi dalam rangka menghadiri acara launching PPK BLUD RSUD Solok yang telah memperoleh pengesahan sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, telah dihadiri pada tanggal 27 September 2013 di Kota Solok, perlu menugaskan personil dari Biro Organisasi, Hj. Guspriyenni, SH, jabatan Kabag. Pendayagunaan Biro Organisasi

Biaya perjalanan dinas ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Setda Prop. Sumbar tahun Anggaran 2013 kegiatan Monitoring dan Evaluasi PNS Bermasalah kode rekening 1.20.1.20.03.07.21.36. 5.2.2.15.0001.

Sehubungan hal tersebut, mohon persetujuan Bapak untuk perjalanan dinas selama 1 (satu) hari pada tanggal 27 September 2013 ke Kota Solok.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BIRO ORGANISASI

**ONZUKRISNO, SH, M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640826 198611 1 001

3. Berdasarkan DPA-SKPD Biro Organisasi Setda. Prov. Sumbar Tahun 2013 terdapat kegiatan Analisa Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, yang mengkaji sejauhmana kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan kualitas SDM Aparatur, sehingga akan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
4. Hasil dari kegiatan ini berupa Buku tentang analisis Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti untuk Diklat , kepegawaian , dll.
5. Untuk memperoleh informasi yang akurat tentang analisa Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dimaksud, diperlukan data-data dari setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak untuk berkenan menandatangani Surat terlampir, yang akan dikirimkan kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 090



6. Telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait / Inspektorat Provinsi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 .
  
7. Dari koordinasi tersebut diketahui bahwa surat tersebut merupakan balasan dari Surat Inspektur Provinsi Sumatera Barat nomor 700/479/Insp-SP/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Oleh Pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah RI, surat tersebut dibalas dengan Surat Nomor Nomor B-3977/LKPP/D-IV.1.1/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah. Menurut pihak Inspektorat, kita tidak drjai ilibatkan untuk pengadaan jasa tenaga pengaman kantor dan tenaga sopir di lingkungan ULP Inspektorat Propinsi Sumatera Barat. Namun demikian kami akan memonitor perkembangan pengadaan tenaga Pengaman kantor dan tenaga Sopir dimaksud.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KASUBAG. ANALISA KEBIJAKAN  
PENGEMBANGAN  
DAN KESEJAHTERAAN APARATUR

**MUZIRWAN, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19670605 199703 1 006

## **Bahan resume Rapat Outsourcing**

Dasar :

Dalam rangka mengantisipasi kekurangan tenaga/ personil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama sejak dikeluarkannya Peraturan Bersama 3 Menteri Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, dan Nomor 141/PMK.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Moratorium Penerimaan Pegawai Negeri Sipil, yang berakibat tidak adanya penambahan CPNS pada Tahun 2012. Untuk itu perlu dilakukan penambahan personil di luar penerimaan CPNS khususnya tenaga teknis melalui pengadaan tenaga outsourcing .

Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan tahapan-tahapan untuk pengadaan Tenaga Outsourcing tersebut , sebagai berikut :

1. Telah dilakukan Rapat Pertama pada tanggal 11 April 2012 di ruangan kerja Kepala Organisasi, hasilnya antara lain bahwa peristilahan tenaga outsourcing tidak sama dengan tenaga PTT, dan perlu didudukkan tenaga apa saja yang dioutsourcing. Dimungkinkan menerima tenaga outsourcing seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah khususnya pasal (19) dan pasal (20). Tugas Biro Organisasi hanya memfasilitasi sedangkan masalah kontrak dan wewenang berada pada Biro Umum.
2. Rapat Kedua, pada tanggal 25 Mei 2012, dengan hasil rapat adalah membahas draft berupa Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 060-401-2012 tentang Pembentukan Tim Analisis Outsourcing
3. Rapat ketiga, tanggal 4 Juli 2012 bertempat di ruangan rapat Biro Organisasi , rapat membahas tentang tenaga yang akan dioutsourcingkan, yakni Sopir, tenaga kebersihan dan Pengaman Kantor.

4. Rapat ke empat, pada tanggal 26 Juli 2012 di ruangan rapat Kepala Biro Organisasi, lanjutan pembahasan draft Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 060-401-2012 tentang Pembentukan Tim Analisis Outsourcing di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Rapat ke lima, pada tanggal 21 Desember 2012 bertempat di ruangan Biro Organisasi. Disepakati tenaga outsourcing adalah Sopir, Satuan Pengamanan dan tenaga Kebersihan. Dengan 2 opsi, yakni Diserahkan pada pihak ke III atau diswakelola (perbandingannya aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) dimana perbandingan tenaga ahlinya 50 % dari Pemda dan 50 % dari Instansi lain , yang berbentuk Perseroan Terbatas.
  
6. Rapat ke enam, tanggal 4 Januari 2013, di ruangan Asisten Administrasi Umum, yang dihadiri 12 orang peserta, terdiri dari Asisten Administrasi Umum, Kadinas Tenaga Kerja, Kabiro Organisasi, Kabag. Arsek Biro Umum, Kabag. PA, Irban III Inspektorat, Kabid pada Disbnaker, Kabag. Perundang-undangan, dan dari DPKD
7. Rapat ke tujuh , tanggal 22 Februari 2013 di ruangan kerja Asisten Administrasi Umum tentang Rancangan Pergub tentang Standar Biaya Tenaga Alih Daya .Hasil telah disusun konsep Lampiran Pergub tentang Standar Biaya Tenaga Alih Daya **Sopir, Cleaning Service dan Satuan Pengaman.**
8. Telah dibuat Surat yang ditanda tangani Gubernur Sumbar dengan Nomor 800/15/Org-2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal Perekrutan Tenaga Alih daya, inti surat minta arahan tertulis tentang Alih Daya dan Dasar hukum.
9. Berdasarkan Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor B-3977/LKPP/D-IV.1.1/07/2013 Tanggal 23 Juli 2013, beberapa SKPD telah dilakukan pengadaan tenaga outsourcing yang meliputi Sopir dan Pengaman Kantor, yang dananya diambilkan dari kegiatan Jasa Pengamanan Kantor. SKPD yang telah menerima outsourcing di antaranya BKD dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
10. Untuk tindaklanjut tenaga outsourcing itu, perlu didudukkan kembali permasalahan, antara lain :
  - ✓ Dasar hukum alihdaya
  - ✓ Pembiayaan ditempatkan dimana
  - ✓ Bagaimana status tenaga/ Staf telah ada saat ini, seperti di lingkungan Setda. : **11** orang, tidak termasuk PNS atau Honorer.

Nomor : 800/ / Org-2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Kuesioner Analisa Kebijakan  
Peningkatan Kualitas SDM  
Aparatur di lingkungan  
Provinsi Sumatera Barat.**

Padang, September 2013

Kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Dinas/Badan/ Kantor di lingkungan Prov. Sumbar
  2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
  3. Sdr. Kepala Satpol Pamong Praja
  4. Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi
  5. Sdr. Kepala Biro di lingkungan Setda.Prov. Sumbar
  6. Sdr. Direktur RSUD/ RSJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- di -

**Padang.**

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar mampu berdayaguna dan berhasilguna untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sangat diperlukan informasi tentang kondisi sumber daya manusia aparatur yang ada di

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Data dan bahan dimaksud akan bermanfaat sebagai bahan baku untuk memperoleh informasi yang valid dalam membuat analisis di bidang kebijakan peningkatan kualitas SDM Provinsi Sumatera Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Sdr. menyampaikan lembaran kuesioner Analisa Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur di lingkungan Provinsi Sumatera Barat dan menginstruksikan kepada seluruh Pegawai di lingkungan unit kerja Sdr. untuk mengisi kuesioner dimaksud (terlampir). Diharapkan pengembalian blangko Kuesiner ini selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2013 telah diterima di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

**DR.H. ALI ASMAR, M.Pd.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19580705 197903 1 004

Padang, September 2013

Nomor : 061/ / Org-2013  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada :

1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala DPKD Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
5. Sdr. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
6. Sdr. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat
7. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Sumatera Barat

di -

**Padang.**

Berkenaan dengan Surat dari Direktur Bimbingan Teknis dan Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor B-3977/LKPP/D-IV/D-IV.1.1./07/2013 tanggal 23 Juli 2013 (terlampir)

Untuk pembahasan penerapannya, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari : **Selasa**  
Tanggal : **24 September 2013**  
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Kerja Asisten Administrasi Umum  
Acara : 1. Tindak lanjut pelaksanaan outsourcing/ alih daya  
2. Hal – hal lain yang dirasa perlu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara dengan tidak mewakilkan diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**

**DR.H. ALI ASMAR, M.Pd.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580705 197903 1 004

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur sebagai laporan.

Padang, Oktober 2013

Nomor : 061/ / Org-2013  
Lampiran : -  
Perihal : **Tenaga Outsourcing/alih daya.**

Kepada :

1. Sdr. Kepala Dinas/Badan/ Kantor di lingkungan Prov. Sumbar
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Satpol Pamong Praja
4. Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi
5. Sdr. Kepala Biro di lingkungan Setda.Prov. Sumbar
6. Sdr. Direktur RSUD/ RSJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

di –

TEMPAT.

Dalam rangka mengantisipasi kekurangan personil tenaga Sopir, Pengamanan Kantor, dan Cleanning Servis sebagai akibat adanya larangan penerimaan tenaga honorer dan tidak tersedianya formasi tenaga Sopir, Pengamanan Kantor, dan Cleanning Service pada Rekrutmen CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu disikapi dengan menerima tenaga outsouching/ alih daya. Hal ini sesuai dengan Surat dari Direktur Bimbingan Teknis dan Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor B-3977/LKPP/D-IV/D-IV.1.1./07/2013 tanggal 23 Juli 2013 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara dengan tidak mewakilkan diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

**DR.H. ALI ASMAR, M.Pd.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580705 197903 1 004

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Tembusan : -  
Tanggal : 23 September 2013  
Perihal : Penyampaian kuesioner analisa kebijakan peningkatan kualitas SDM Aparatur.

---

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, hal-hal sebagai berikut :

8. Berdasarkan DPA-SKPD Biro Organisasi Setda. Prov. Sumbar Tahun 2013 terdapat kegiatan Analisa Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, yang mengkaji sejauhmana kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan kualitas SDM Aparatur, sehingga akan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
9. Hasil dari kegiatan ini berupa Buku tentang analisis Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti untuk Diklat , kepegawaian , dll.
10. Untuk memperoleh informasi yang akurat tentang analisa Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dimaksud, diperlukan data-data dari setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak untuk berkenan menandatangani Surat terlampir, yang akan dikirimkan kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 090

11. Telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait / Inspektorat Provinsi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 .
12. Dari koordinasi tersebut diketahui bahwa surat tersebut merupakan balasan dari Surat Inspektur Provinsi Sumatera Barat nomor 700/479/Insp-SP/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Oleh Pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah RI, surat tersebut dibalas dengan Surat Nomor Nomor B-3977/LKPP/D-IV.1.1/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah. Menurut pihak Inspektorat, kita tidak drjai ilibatkan untuk pengadaan jasa tenaga pengaman kantor dan tenaga sopir di lingkungan ULP Inspektorat Propinsi Sumatera Barat. Namun demikian kami akan memonitor perkembangan pengadaan tenaga Pengaman kantor dan tenaga Sopir dimaksud.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KASUBAG. ANALISA KEBIJAKAN  
PENGEMBANGAN  
DAN KESEJAHTERAAN APARATUR

**MUZIRWAN, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19670605 199703 1 006

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. . bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
- c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
- e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang undang tentang Ketenagakerjaan;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN.

### **Pasal 64**

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

### **Pasal 65**

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan huku

Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

## **II.** [Facebook](#)

Cari orang, ter



- [Muzirwan Wan](#)
- [Beranda](#)
- 

[Pintasan Privasi](#)

•

[Pengaturan Akun](#)



[Muzirwan Wan](#) [Sunting Profil](#)

**FAVORIT**

- 
- 
- 
- 

**GRUP**

- 
-

- 

## APLIKASI

- 
- 
- 

## HALAMAN

- 
- 
- 

## LAINNYA

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



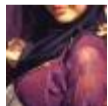
 [5 permintaan](#) dari Fenti Kesuma Dewi

[Rifza Warsil](#) dan 2 lainnya

**Rekomendasi Halaman**

[Lihat Semua](#)

**Rekomendasi Halaman**



[Buah Dada Montok](#)  
60.005 orang menyukai ini.  
[Suka](#)

[Bersponsor](#)

[Lihat Semua](#)

[Bersponsor](#)

### **Rumah Murah DP Ringan!**

[properti.tokobagus.com](http://properti.tokobagus.com)



[Cek langsung penawaran terbaik DP Ringan cicilan rendah! Intip foto & info lengkap disini!](#)

### **Perut Kempes Dlm Seminggu**

[ampuhsehat.com](http://ampuhsehat.com)



[Gendut atau perut buncit? Kempeskan dengan cepat! Pelangsing alami terdaftar di DepKes.](#)

### **Lagi Cari Motor?**

[motor-dan-sekuter.tokobagus.com](http://motor-dan-sekuter.tokobagus.com)



[Cek langsung ragam pilihan motor berbagai merk, type & tahun, baru/bekas tersedia lengkap!](#)

### **Hp Bekas Murah**

[berniaga.com](http://berniaga.com)



[Daripada beli baru, cari Hp bekas kualitas mulus. Harga mulai 500 ribuan. Cek di berniaga!](#)

### **Harga Honda CB Seken**



[Mulai 2 jutaan! Honda CB seken good condition. Klik berniaga.com.](#)  
[Sarwo Edi dan Putri Devi Nirmalasari menyukai ini.](#)

### **Dapat uang: Terima Tamu**



[Tambah penghasilan dan bertemu turis dari seluruh dunia! Terima tamu di Airbnb hari ini!](#)  
[310.604 orang menyukai ini.](#)

Facebook © 2013

[Bahasa Indonesia](#) · [Privasi](#) · [Ketentuan](#) · [Kuki](#) · [Lainnya](#)

- [Perbarui Status](#)
- [Tambahkan Foto/Video](#)

Apa yang Anda pikirkan?

## ***Kabar Berita***

- [URUTKAN](#)



### **[Yudhistira Nazar](#)**

***Hutan ditebang habis, lingkungan rusak !***



[Suka](#) · [Bagikan](#) · [4 menit yang lalu](#) melalui [BlackBerry](#) ·

- 
- 

Tulis komentar...

### **[Ops](#)**



### **[Cewek SMA Bispak](#)**

= ω =





[Suka](#) · [Bagikan](#) · [1.99942454](#) · [14 menit yang lalu](#) ·

[Opsi](#)



[\*\*Sukai Halaman\*\*](#)

[\*\*BlanjaMudah\*\*](#) · [Saran Kiriman](#)

***Jual Harddisk internal komputer, banyak Diskon & garansi resmi. Harga mulai dari 250 ribu***

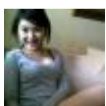
[\*\*Harddisk Komputer Murah\*\*](#)

[www.blanjamudah.com](http://www.blanjamudah.com)

[Menjual hard disk internal untuk komponen rakitan pc. Merk yang paling populer di Indonesia adalah Seagate dan WDC dan kami menjualnya dengan garansi resmi.](#)

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [778311](#) · [Bersponsor](#)

[Opsi](#)



[\*\*Cewek SMA Bispak\*\*](#) **menambahkan foto baru.**



[Suka](#) · [Bagikan](#) · [1.56223825](#) · [7 menit yang lalu](#) ·

[Ops](#)



**[Lendriyanti Len](#)**

***pai basanang-sanang lo awak lai.....***

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [sekitar sejam yang lalu](#) ·

- 
- [Reni Elvianti](#) menyukai ini.



- 

[Gus Nayati](#) pai lah malala lai!!!!

[sekitar sejam yang lalu](#) · [Suka](#)



- 

[Naldie Friendster](#) Pai ciek.....

[sekitar sejam yang lalu](#) · [Suka](#)

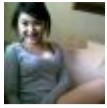


- 

Tulis komentar...

⏪ ⏩

[Ops](#)



[Cewek SMA Bispak](#)

= ω =



[Suka](#) · [Bagikan](#) · [1.22919518](#) · [10 menit yang lalu](#) ·

[Ops](#)



[Reni Elvianti](#)

*ini hari ke-8 dikampuanghalaman...sangat2 puass semua kulinernya mantap.naik lima kilonan kayaknya neh...(haaa)...bahagia bisa ngumpulin hampir tigapuluhan teman SMP-SMA sambil syukuran tgl kelahiranku..mksh temans..."kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku tggu aku kembalii....@back to jkta ...c u all.....*

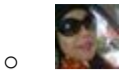
[Suka](#) · [Bagikan](#) · [8 jam yang lalu](#) melalui [BlackBerry](#) ·

- 
- [Isdamel Shine Mda](#) dan [2 orang lainnya](#) menyukai ini.



[Wisherman Dahli](#) Inga inga..ting!

[7 jam yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)



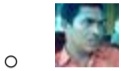
○ [Reni Elvianti](#) Wisherman : haaaaaa....lapeh salero wak bro.....bisuak tibo jkta puaso wak liak...

[6 jam yang lalu](#) · [Suka](#)



○ [Diny Veronica](#) hahahahah

[3 jam yang lalu](#) · [Suka](#)



Tulis komentar...

◀ ▶

[Ops](#)



• [Sarwo Edi](#)

***"seharusnya kau belajar berjalan dulu nak, baru lah kau bisa berlari.."***

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [31 menit yang lalu](#) ·

- 
- [3 orang](#) menyukai ini.



○ [Syafrizal Tajuddin](#) sabalun bajalan tantu baraja tagak dulu.....

[16 menit yang lalu](#) · [Suka](#)



○ [Sarwo Edi](#) itu zaman dulu da Syaf....zaman kini langsung balari inyo...ha...ha...

[13 menit yang lalu](#) · [Suka](#)



Tulis komentar...

◀ ▶

[Ops](#)



**[Khadija Soezmann](#)**

***Bukan mudah memperoleh gelar 'PANGERAN ILMU PENGETAHUAN'.***

***Thomas Aquinas dan Immanuel Kant berhutang ilmu dan mengakui Sina gurunya.***

***Russell dan Wittgenstein berhutang Logika Atomism dengannya, ...Lihat Selengkapnya***

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [158](#) · [30 menit yang lalu](#) ·

[Opsi](#)



**[Jhum Vaniloberry](#)**

***Mencoba dan trus mencoba walaupun smpai saat ini aku blum bsa mlkukanx..***

***Smangat***

[Suka](#) · [10 menit yang lalu](#) melalui [seluler](#) ·

- 
- [2 orang](#) menyukai ini.



Tulis komentar...

[Opsi](#)



**[M Radid Akbar](#)**

***Tanguhnya Berjuang Bersamamu..***

***Those who are weak don't fight.  
Those who are stronger might fight  
for an hour....Lihat Selengkapnya***

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [sekitar sejam yang lalu](#) ·

- 
- 

Tulis komentar...

[Opsi](#)

- [Opsi](#)



### [Sukai Halaman](#)

[bodrex](#) · Saran Halaman



[Jangan biarkan sakit kepala mengganggu hidup Anda&keluarga Anda melalui tips-tips disini](#)

48.589 orang menyukai ini. · [Bersponsor](#)



### [Boy Aun Arca](#)

***Ketika Islam sdh tdk diminati lg dan sdh tdk populer lg serta Islam hyn skdr agama saja dan tdk menjalankan smua perintah Nya dan menghentikan larangan Nya smpai pd titik puncak nya Islam itu terpuruk oleh smua budaya2 kaum kafir dan pd saat itulah hari Akhir itu sdh didepan mata, wahai saudara/i ku yg seiman marilah kita sama kembali kejalan yg di Ridhoi Allah Swt,smoga kita mnjadi kaum yg diMuliakan Allah... Amin...***

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [45 menit yang lalu](#) melalui [seluler](#) ·

- 
- [Boy Aun Arca](#) menyukai ini.



- 

Tulis komentar...

### [Opsi](#)



### [Friska Ramadhani](#)

***Thank's ya Mybf udah temenin aku...***

[Suka](#) · [10 menit yang lalu](#) melalui [BlackBerry](#) ·

- 
- [4 orang](#) menyukai ini.



-

Tulis komentar...

[Ops](#)



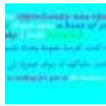
**[Andhyka Sedyawan](#)**

**Aku mencari ridho Allah, karena di hujung kehidupan itu, aku akan bertemu denganNYA.**

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [1](#) · [36 menit yang lalu](#) ·

[Ops](#)

- **[Adrian Mencobamembinahati](#)** mengomentari [kiriman](#)nya sendiri.



[Ops](#)

**[Adrian Mencobamembinahati](#)**

**Astaghfirullaah.**

**Gr2 buru2..**

**Akhirna hmpir tbrakn d smping RST Gantiang..**

**Bputa roda ko.**

**Trimakasih yaa Allah atas 'inayah & prtolongan-Mu..**

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [@Adriant99334287 on Twitte](#) · [17 September pukul 7:26](#) melalui [Twitter](#) ·

- [4 orang](#) menyukai ini.
- [Lihat 3 komentar lain](#)



[Farhan Nax Janex](#) Bl pak

[15 menit yang lalu](#) · [Suka](#)



[Adrian Mencobamembinahati](#) 4 hri yg llu

[14 menit yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)



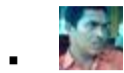
[Farhan Nax Janex](#) Ooooooo

[13 menit yang lalu](#) · [Suka](#)



▪ [Adrian Mencobamembinahati](#) 3eeeee

[13 menit yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)



Tulis komentar...

⬆️

⬇️

⬆️

⬅️ ➡️

[Opsi](#)

- [Jhum Vaniloberry](#) mengomentari [statusnya](#).



○

[Opsi](#)

[Jhum Vaniloberry](#)

**Huuff**

***Cpek plang kampus langsung msuk kerja lgi..***

[Suka](#) · [16 September pukul 13:14](#) melalui [seluler](#) ·

- 
- [2 orang](#) menyukai ini.
- [Lihat 1 komentar lain](#)



▪ [Jhum Vaniloberry](#) hehehe iy

[35 menit yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)



▪ [Umhy Susslieb](#) dmn q kuliah???

[10 menit yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)



▪ [Jhum Vaniloberry](#) di stiem. kau iya?

[8 menit yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)



▪ [Umhy Susslieb](#) d stikes panakkukang,jrusn ap d amb!



[6 menit yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)



Tulis komentar...

[Ops](#)



**[Rex Sikes](#)**

***That was fun bunch of cast an crew spent evening at Skyline Comedy Club. Lots of laughs! Thanks to Cliff for the wonderful hospitality!!! Just got in and am going straight to sleep. Yay***

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [44 menit yang lalu](#) melalui [seluler](#) ·

- 
- [Pattie Kimball-Poulakos](#) menyukai ini.



- 

Tulis komentar...

[Ops](#)



**[Andhyka Sedyawan](#)**

***Cinta bukan karna keindahan yang Tampak di Mata, tepai karna Cinta menyatukan Hati dan Jiwa manusia.***

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [sekitar sejam yang lalu](#) ·

[Ops](#)



**[Gatot Wiryantoko](#) berada di [Bukit Indah City-Purwakarta](#).**

[Suka](#) · [sekitar sejam yang lalu](#) melalui [BlackBerry](#) ·

- 
- [4 orang](#) menyukai ini.



-

Tulis komentar...

[Ops](#)



[Muzirwan Wan](#)

### [PT. ASKES \(Persero\) - Sejarah Perjalanan UU BPJS](#)

PT ASKES Persero

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [sekitar sejam yang lalu](#) melalui [ShareThis](#) ·

[Ops](#)



[Yeni Siswita](#)

*senangnya..*

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [2 jam yang lalu](#) melalui [Samsung Mobile](#) ·

- 
- [2 orang](#) menyukai ini.



[Linda Deswita](#) Knpa tu?????dpt anak cwek ni???

[sekitar sejam yang lalu](#) · [Suka](#)



Tulis komentar...

[Ops](#)



[Diian Mamahnya Aufa](#) dan [2 teman lainnya](#) menyukai [Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia](#).

---

KIRIMAN TERKAIT



o

[Sukai Halaman](#)

**[Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia](#)**

**Agar Ibadah Terasa Ringan & Mudah - Ust Mubarak Bamualim, Lc. MHi**

**Jika Anda merasa ajaran Islam itu berat atau terasa berat saat menjalankan ibadah maka simaklah video bincang-bincang santai (16 menit) berjudul "Agar Ibadah Terasa Ringan dan Mudah" bersama Ustadz Mubarak Bamualim, Lc., M.Hi.**

**Versi Youtube: <http://youtu.be/Klxn8Q2BHQk>**

**Jangan lupa share dan like page Yufid TV!**



[Suka](#) · [Bagikan](#) · [4161396](#) · [Bersponsor](#)

[Opsi](#)



**[Dian Wong Kito](#)**

**Selamat ulth ibu vita GF,mkn cake**

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [15 jam yang lalu](#) melalui [BlackBerry](#) ·

o

[3 orang](#) menyukai ini.

o



o

[Jerry Ismael](#) Ada yg ulth nih?

[4 jam yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)

o



Tulis komentar...

⬆️

⬇️

⬆️

⬅️

➡️

[Opsi](#)



**[Sufran Ali](#) dan [Uskaryawati Sofyar](#) mengomentari sebuah [status](#).**

---



[Opsi](#)

**[Uskaryawati Sofyar](#)**

***E-KTP udah setahun lebih blom selesai jg,udah di tanya k Kecamatan katanya masih di Depnagri,KTP lama udah expired,saran hrs di perpjjg,hari ini dr RT,RW,kekelurahan,Kecamatan anter berkas,setelah ini k Tata kota,Walahh perpanjang KTP aja ribet begini,kapan majunya Indonesiaku***

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [19 September pukul 11:50](#) melalui [BlackBerry](#) ·

- [2 orang](#) menyukai ini.
- [Lihat 8 komentar lain](#)



[Sutrisno Putra](#) Jagankan maju jalan di tempat aja susah, semua itu cuman di!!! susah2 kan aja tu , us

[19 September pukul 23:19](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)



[Uskaryawati Sofyar](#) @ mbak Rinta,akhirnya kemaren krn ngga mau pake jalur Progresif,aku anterin sendiri berkas ke Kantor Catatan Sipil,berkas masuk, ambil 14 hari kerja ...ampun bikin KTP kok ribet banget yah ( pertama kali nih ngurus KTP sendiri)..jadi tau..begini yah,ka...[Lihat Selengkapnya](#)

[Kemarin jam 7:48](#) · [Suka](#)



[Uskaryawati Sofyar](#) @ Tris..sepertinya masih pake Peribahasa " Kalau bisa di persulit ..kenapa mesti di permudah " ....sedihnya yah..malu sama generasi penerus..

[Kemarin jam 7:50](#) · [Suka](#)



[Sufran Ali](#) ya us itu kan programnya mentri dalam negeri,dimana letak kemajuan IT ? Akal aparatur pemerintah bulus semua karena kebanyakan makan yg haram kali!

[Kemarin jam 13:40](#) · [Suka](#)



Tulis komentar...

[Opsi](#)



***[O Li Ve](#) mengubah foto profilnya.***



[Suka](#) · [10 jam yang lalu](#) ·

- 
- [6 orang](#) menyukai ini.



[Diego Armando Harimau Sumatera](#) MANTAP

[10 jam yang lalu](#) · [Suka](#)



Tulis komentar...

[Opsi](#)



***[Nova Linda](#)***

***Kalau tdk dgn kesabaran, menunggu adlh sesuatu yg membosankan***

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [20 jam yang lalu](#) melalui [BlackBerry](#) ·

- 
- [Reni Elvianti](#), [Shally Tanjung](#) dan [5 orang lainnya](#) menyukai ini.



- 

[Bunda Ikhsan](#) Menunggu apa tu bun?

[19 jam yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)



- 

[Davud Manda](#) Klo menunggu sesuatu yg indah ... Ndak jd masalah bun .100thn serasa satu detik .

[12 jam yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#) · [1](#)



- 

Tulis komentar...

[Opsi](#)



[Warung Misbar](#)

***Menikmati "Semur Jengkol" akan terasa lebih nikmat sambil nonton film layar lebar di @Warung\_Misbar***



[Suka](#) · [Bagikan](#) · [3 jam yang lalu](#) ·

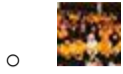
- 
- [18 orang](#) menyukai ini.
- [Lihat 11 komentar lain](#)



-

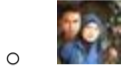
[Warung Misbar](#) @[Sanip Effendi](#): mariiiii..... mumpung weekend

[3 jam yang lalu](#) · [Suka](#)



[Warung Misbar](#) @[Asep Sunarya](#): di Jl. R.E. Martadinata (Jl. Riau) No.28A sebelahnya RS. Halmahera. Klo mau free minumannya SMS dulu ya mas ke 087824124251

[3 jam yang lalu](#) · [Suka](#) · [1](#)



[Asep Sunarya](#) ok. trnyta dkt tmpt krj aq jg

[3 jam yang lalu](#) · [Suka](#) · [1](#)



[Dede Kurniawan](#) S3mur jengkol.... I like it

[2 jam yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#) · [1](#)



Tulis komentar...

◀ ▶

[Ops](#)

- [Fitri Armi](#) mengomentari [fotonya sendiri](#).



[Ops](#)

[Fitri Armi](#)

*My lovely mom*



[Suka](#) · [Bagikan](#) · [2 jam yang lalu](#) melalui [BlackBerry](#) ·

- [2 orang](#) menyukai ini.



[Tri Hadira Armi](#) Ndeeee...gaya baju buk nur mah....

[sekitar sejam yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)



[Fitri Armi](#) Hahaha

[sekitar sejam yang lalu](#) · [Suka](#)



Tulis komentar...

[Ops](#)

- [Susylawati Pandan Sari](#) dan [Widya Prima Hatta](#) mengomentari sebuah [foto](#).



○

[Ops](#)

[Susylawati Pandan Sari](#)

***Ya Allah Smoga hari ini mendapatkan rezeki ya barokah dan berlimpak aminnn ya rabbal alaminnn, yang baca status ini juga akan mendapat rezeki yang belimpah amin ... Aminnn.. Aminnn — bersama [Dewi Mustika](#).***





[Suka](#) · [Bagikan](#) · [Kemarin jam 9:00](#) melalui [BlackBerry](#) ·

- [55 orang](#) menyukai ini.
- [Lihat 24 komentar lain](#)



[Susylawati Pandan Sari](#) All : teman sahabat terima kasih atas doa dan like moga kita semua dimudahkan rezeki ya

[21 jam yang lalu](#) · [Suka](#)



[Susylawati Pandan Sari](#) Bu helda : bungas orang yg bau datang dari jepang lah....

[21 jam yang lalu](#) · [Suka](#)



[Susylawati Pandan Sari](#) Pak fahrudin : ha ..ha..ulun doakan pian kawa nukar mobil alphard jua tp mobil pian sudah lamborgini kalo teharat lagi nah aminnn

[21 jam yang lalu](#) · [Suka](#)



[Mochamad Chotim](#) susy .... smoga mengabulkan doa mu....amiiiiiiin

[11 jam yang lalu](#) · [Suka](#)



Tulis komentar...

⬆️  
⬇️  
⬇️  
⬆️

[Ops](#)



[Dian Wong Kito](#)

@kompascom: Bos Apple Samakan Ponsel Murah dengan Sampah <http://t.co/z4kDVS98qX>

[Suka](#) · [Bagikan](#) · [16 jam yang lalu](#) melalui [BlackBerry](#) ·

- 
- [2 orang](#) menyukai ini.



[Satria Perdana Htci](#) begitu juga mobil murah yg belakangan marak ...

[16 jam yang lalu](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)



Tulis komentar...

[Ops](#)

[Sunting Ops](#)

[Berita Lainnya](#)

[Tentang](#) [Buat Iklan](#) [Buat Halaman](#) [Pengembang](#) [Karier](#) [Privasi](#) [Kuki](#) [Ketentuan](#) [Bantuan](#)

Facebook © 2013 · [Bahasa Indonesia](#)

[85%](#)

[Obrolan \(10\)](#)



[Cewek SMA Bispak](#)

Disukai · 7 Maret

Yukk Beibz — bersama [Putery Divani](#), [Teguh Teguh](#), [Ricki Setyawan](#), dan [30 lainnya](#).

[Suka](#) · [Bagikan](#)

- 
- [661 orang](#) menyukai ini.
- [23 berbagi](#)
- 6 dari 60

[Lihat Komentar Sebelumnya](#)



[Edoes Baweel](#) Kpn biepb

[11 September pukul 22:07](#) melalui [seluler](#) · [Suka](#)



[Sahabatku Daeli](#) seksi bngt,n...

[12 September pukul 21:11](#) · [Suka](#)



•

[Soenandi Van Boenyoe ChaCherbond](#) Udah tnggung buka jah?

[16 September pukul 2:33](#) · [Suka](#)



•

[Wawan Aditia](#) saya mau dg

[16 September pukul 15:45](#) · [Suka](#)



•

[LK VJ Serey Mun](#) Fax u

[18 September pukul 1:22](#) · [Suka](#)



•

[Muhamad Dadang](#) bisa ketemuan di hotel nggak

[19 jam yang lalu](#) · [Suka](#)



•

Tulis komentar...

↑

↓

←

→



Memuat...

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Tanggal : Agustus 2013  
Nomor : 800/ /Org- 2013  
Tembusan : -  
Perihal : **Laporan rencana pengadaan tenaga outsorching / Alih Daya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

---

Dengan hormat,

Dalam rangka mengantisipasi kekurangan tenaga/ personil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama sejak dikeluarkannya Peraturan Bersama 3 Menteri Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, dan Nomor 141/PMK.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Moratorium Penerimaan Pegawai Negeri Sipil, yang berakibat tidak adanya penambahan CPNS pada Tahun 2012, sementara itu jumlah PNS yang memasuki pensiun semakin banyak pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Untuk itu perlu dilakukan penambahan personil di luar penerimaan CPNS khususnya tenaga teknis melalui pengadaan tenaga outsourcing .

Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan tahapan-tahapan untuk pengadaan Tenaga Outsourcing tersebut , sebagai berikut :

11. Telah dilakukan Rapat Pertama pada tanggal 11 April 2012 di ruangan kerja Kepala Organisasi, hasilnya antara lain bahwa peristilahan tenaga outsourcing tidak sama dengan tenaga PTT, dan perlu didudukkan tenaga apa saja yang dioutsourcing. Dimungkinkan menerima tenaga outsourcing seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah khususnya pasal (19) dan pasal (20). Tugas Biro Organisasi hanya memfasilitasi sedangkan masalah kontrak dan wewenang

berada pada Biro Umum. Peserta rapat terdiri dari SKPD lain yang berjumlah 7 orang.

12. Telah dibuat Telaahan Staf kepada Bapak Gubernur tanggal 4 Mei 2012 perihal Pengangkatan tenaga outsourcing di lingkungan Propinsi Sumatera Barat, sekaitan dengan adanya Moratorium Penerimaan CPNS maka perlu disiasati dengan pengadaan tenaga outsourcing berupa tenaga sopir , Satpam, dan tenaga kebersihan. Sedangkan tenaga administrasi dan yang sifatnya teknis tidak dapat dioutsourchingkan, dan teknis pelaksanaan penerimaannya diserahkan kepada SKPD masing-masing.
  
13. Rapat Kedua, pada tanggal 25 Mei 2012, dengan hasil rapat adalah membahas draft berupa Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 060-401-2012 tentang Pembentukan Tim Analisis Outsourcing
14. Rapat ketiga, tanggal 4 Juli 2012 bertempat di ruangan rapat Biro Organisasi , rapat membahas tentang tenaga yang akan dioutsourchingkan, yakni Sopir, tenaga kebersihan dan Pengaman Kantor.
15. Rapat ke empat, pada tanggal 26 Juli 2012 di ruangan rapat Kepala Biro Organisasi, lanjutan pembahasan draft Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 060-401-2012 tentang Pembentukan Tim Analisis Outsourcing di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
16. Rapat ke lima, pada tanggal 21 Desember 2012 bertempat di ruangan Biro Organisasi. Disepakati tenaga outsourcing adalah Sopir, Satuan Pengamanan dan tenaga Kebersihan. Dengan 2 opsi, yakni Diserahkan pada pihak ke III atau diwakelola (perbandingannya aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) dimana perbandingan tenaga ahlinya 50 % dari Pemda dan 50 % dari Instansi lain , yang berbentuk Perseroan Terbatas.
17. Pengembalian draft Pergub tentang Mekanisme Pelaksanaan Outsourcing di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Biro Hukum. Menurut Biro Hukum, dapat diatur dengan Pergub, namun demikian draft ini perlu dikonsultasikan terlebih dulu ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri, serta ditambahkan pada diktum konsiderans berupa UU tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Kepmenakertans tentang Penyerahan sebagian pekerjaan kepada Pihak Lain.
18. Telah diadakan studi komparatif ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jabar dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta berdasarkan Surat Sekda Nomor 800/526 /Org-2012 tanggal 19 November 2012.

Hasilnya : tidak ada lagi istilah Outsourcing, digantikan dengan Alih Daya. Apabila terjadi perselisihan perburuhan, maka diselesaikan melalui Kepolisian, bukan oleh Serikat Pekerja. Dan pihak Kemenakertrans akan memfasilitasi pembukaan formasi kebutuhan pegawai Sopir, cleaning servise dan satpam. Mengenai alih daya ini, sampai saat ini belum ada regulasinya.

Salah satu hasil study komparatif adalah contoh Keputusan KPA Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri nomor 900.05-1132.PAKPA.2012 Tanggal 4 September 2012 tentang Penetapan Tenaga Teknis di lingkungan Setjen Kemendagri, dimana terdapat tenaga teknis berupa paramedis dan apoteker,

tenaga listrik, operator soundsystem, sopir pimpinan, sopir antar jemput, pramubhakti, yang semuanya berjumlah 125 orang , digaji Rp. 1.375.000 per bulan.

19. Rapat ke enam, tanggal 4 Januari 2013, di ruangan Asisten Administrasi Umum, yang dihadiri 12 orang peserta, terdiri dari Asisten Administrasi Umum, Kadinas Tenaga Kerja, Kabiro Organisasi, Kabag. Arsek Biro Umum, Kabag. PA, Irban III Inspektorat, Kabid pada Disbnaker, Kabag. Perundang-undangan, dan dari DPKD
20. Rapat ke tujuh , tanggal 22 Februari 2013 di ruangan kerja Asisten Administrasi Umum tentang Rancangan Pergub tentang Standar Biaya Tenaga Alih Daya .Hasil telah disusun konsep Lampiran Pergub tentang Standar Biaya Tenaga Alih Daya Sopir, Cleaning Service dan Satuan Pengaman.
21. Telah dibuat Surat yang ditanda tangani Gubernur Sumbar dengan Nomor 800/15/Org-2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal Perekrutan Tenaga Alih daya, inti surat minta arahan tertulis tentang Alih Daya dan Dasar hukum.

Setelah dilakukan upaya sesuai langkah/ tahapan sebagaimana di atas, akhirnya disepakati bahwa dalam rangka percepatan perekrutan tenaga outsourcing/ alih daya ini agar dimasukkan pada RKA DPKD Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Bidang Anggaran ( Kabid Risa Bur, SE). Sehingga apabila hal ini terwujud, maka diharapkan akan dapat dilakukan penerimaan/ pengadaan tenaga Alih daya yang meliputi: Sopir, Cleaning Service, dan Tenaga Pengaman pada tahun anggaran 2014. Hal ini tentunya sambil menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri tentang Dasar hukumnya.

**Penutup/ saran:**

Untuk pengadaan tenaga outsourcing/ alih daya ini agar dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar jangan berbenturan dengan aturan perundangan yang berlaku.

Hal ini mengingat ada 2 aturan yang melarang yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honor menjadi CPNS, pada pasal 8, yang berbunyi : "*Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan Instansi Pemerintah, dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*"
2. Surat Menteri Dalam Negeri, yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

Demikian laporan perkembangan rencana pengadaan tenaga outsourcing/ alih daya ini dibuat, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya .  
Terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561231 198003 1 090

## HASIL RAPAT PIMPINAN DI LINGKUNGAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Senin , tanggal 16 September 2013

Pimpinan rapat : H. Sudirman Gani,SH,MM (Asisten Administrasi Umum )

Peserta rapat : 1. Kepala Biro Umum, Kepala Biro Organisasi , Kepala Biro Pengelolaan Asset

Notulen rapat : Ade Ridha Utami

Materi rapat : Membahas masalah di lingkungan Biro Organisasi, Umum dan Asset

Khusus di lingkungan Bagian Pendayagunaan Aparatur membahas tentang Outsourcing , antara lain :

1. Apa dasar hukum tentang Outsourcing
2. Kebutuhan apa saja yang diambil dari tenaga outsourcing, termasuk supporting staf
3. Bagaimana bentuk pengadaannya hingga pembiayaannya
4. Agar segera dilakukan tindak lanjut dan adakan pertemuan sekali lagi dengan pihak terkait untuk finalisasinya.



KEPALA BIRO ORGANISASI

**ONZUKRISNO, SH, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP.19640825 198611 1 001



ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010078715

Padang, Desember 2010

Kepada :  
Sdr.Kepala .....

di lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar  
di -  
**PADANG.**

## **SURAT PENGANTAR**

Nomor : 065/..... / Org-2010

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Ket.
-	Bulletin Organisasi dan Aparatur ( O dan A ) Edisi 27/XII/2010	.....(.....) buah Buku	Untuk dapat dipergunakan seperlunya

Yang menerima,  
( *CAP / STEMPEL* )

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
U.b. KEPALA BIRO ORGANISASI

-----  
NIP.

**Ir. H. MUDRIKA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580209 198603 1 004

Padang, 18 Oktober 2010

Kepada Yth:  
Sdr.Kepala .....  
.....  
.....  
di -  
PADANG.

## SURAT PENGANTAR

Nomor : 065/..... / Org-2010

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Ket.
-	Bulletin Organisasi dan Aparatur ( O dan A ) Edisi 26/IX/2010	.....( .....) buah Buku	Untuk dapat dipergunakan seperlunya

Yang menerima,

a. n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
U.b. KEPALA BIRO ORGANISASI

-----  
NIP.

**Ir. H. MUDRIKA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580209 198603 1 004

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Ket.
----	--------------------	-----------	------

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Ket.
-	Bulletin Organisasi dan Aparatur ( O dan A ) Edisi 26/X/2010	5( lima) buah Buku	Untuk dapat dipergunakan seperlunya

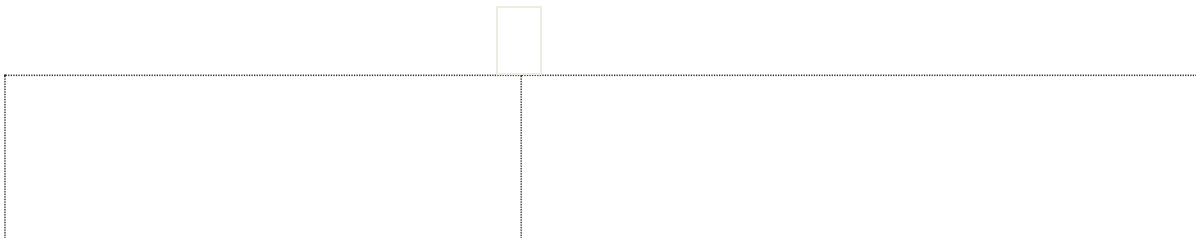
Yang menerima,

-----  
Nip.

\*> tanda tangan dan stempel

a. n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
U.b. KEPALA BIRO ORGANISASI

**Ir. H. MUDRIKA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580209 198603 1 004



**a.n. Sekretaris Daerah**

Padang, 6 Juli 2007

Kepada :

1. Yth. Bapak/ Sdr. ....

**Pembahas** Tim Penyusunan Pola Kinerja PNS

2. Sdr. ....  
**Penyusun** Tim Penyusunan Pola Kinerja PNS  
 di -  
Padang

## SURAT PENGANTAR

Nomor : 065/ / Apt-2007

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Ket.
-	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/250/Apt-2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pola Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat	1 ( satu) eksamplar	Untuk dilaksanakan sesuai SK.

**a.n. Sekretaris Daerah**

**JADWAL : BIMTEK ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
 TANGGAL 14 S/D 23 JUNI 2010**

No.	Hari / tanggal	Jam/ Pel	M a t e r i	Nara sumber	Keterangan
1	<b>Senin, 14 Juni 2010</b>				
	08.00 - 08.30	-	<i>Pendaftaran/Registrasi Peserta</i>		Panitia
	08.30 - 09.45	-	- Pembukaan oleh Bupati - Laporan Panitia Penyelenggaraan - Sambutan Bupati/ Sekda - Pembacaan do'a		
	09.45 - 10.00	-	Rehat		
	10.00 - 12.00	4	Dasar - dasar Analisis Jabatan	Ir. H. Mudrika	Kepala Biro Organisasi
	12.00 - 13.00	-	Istirahat		
	13.00 - 16.00	5	Uraian Tugas	Tim Anjab	

2	Selasa, <u>15 Juni 2010</u> 08.00 - 09.30  09.30 - 09.45 09.45 - 10.30 10.30 - 12.00 13.00 - 15.30 15.30 - 15.45 15.30 - 17.00	2  - 1 - 3 - 2	Keadaan Lingkungan Kerja, Syarat Fisik dan Kemungkinan Resiko Bahaya Rehat Diskusi dan latihan Ishoma Syarat Jabatan Ishoma Diskusi dan Latihan	Tim Anjab	
3	Rabu, <u>16 Juni 2010</u> 08.00 - 09.30  09.30 - 09.45 09.45 - 12.00  12.00 - 13.00 13.00 - 15.30 15.30 - 15.45 15.45 - 17.00	2  - 3  - 3 - 2	Pedoman Penyusunan Jabatan Fungsional Umum Rehat Metode /Teknik Pengumpulan data Ishoma Metode Perumusan Jabatan Ishoma lanjutan	Tim Anjab	
4	Kamis, <u>17 Juni 2010</u> 08.00 - 10.00  10.00 - 10.15 10.00 - 12.00  13.00 - selesai	4  - 4  -	Simulasi Pengumpulan Data jabatan Rehat Presentasi hasil Penyusunan Informasi Jabatan  Berangkat ke Solok Selatan	Tim Anjab	
5	Senin, <u>21 Juni 2010</u> 08.00 - 12.00  12.00 - 13.00 13.00 - 16.00	5  - 4	Pengumpulan data jabatan ke locus Ishoma Pengumpulan data jabatan	Tim Anjab	
6	Selasa, <u>22 Juni 2010</u> 08.00 - 12.00  12.00 - 13.00 13.00 - 16.00	5  - 4	Pengolahan dan penyusunan Informasi Jabatan Ishoma lanjutan	Tim Anjab	
7	Rabu, <u>23 Juni 2010</u> 08.00 -10.00 10.00 - 10.15 10.15 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - selesai	5  - 4  - -	Presentasi hasil lapangan Rehat lanjutan Ishoma Penutupan	Tim Anjab - Tim Anjab - -	Panitia Penyelenggara

Padang Aro, Juni 2010



**NB :**

Jumlah Jam pelajaran 62 jam

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum  
Dari : Kepala Biro Organisasi  
Tanggal : 11 Nopember 2010  
Lampiran : 14 ( Empat Belas ) Konsep Pergub  
Perihal : **Penelitian Draft Peraturan Gubernur Tentang Informasi Jabatan.**

---

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Sdr, hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menindak lanjuti Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lemtekda Prov. Sumbar serta Peraturan Gubernur Nomor 86 s/d 100 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi , perlu dibuatkan Uraian Jabatannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2005 dimana setiap Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/ Kota harus membuat Uraian Jabatan.
2. Sesuai dengan program kerja Biro Organisasi, telah dilakukan pembuatan Buku Informasi Jabatan pada Setda dan Setwan DPRD tahun 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 ini dilakukan penyusunan informasi jabatan Inspektorat, Bappeda dan Lemtekda Prov. Sumbar yang telah memasuki tahapan konfirmasi dengan SKPD terkait.
3. Adapun SKPD yang telah dilakukan penyusunan informasi jabatan pada tahun 2010 adalah :
  1. Inspektorat
  2. Bappeda
  3. Badan Kepegawaian Daerah
  4. Badan Diklat
  5. Badan Kesbang Politik dan Linmas
  6. Badan Pemberdayaan Masyarakat
  7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
  8. Badan Pemberdayaan Masyarakat
  9. Badan Perpustakaan dan Kearsipan
  10. Badan Ketahanan Pangan
  11. Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi
  12. Kantor Penghubung
  13. Dinas Perhubungan
  14. Satuan Polisi Pamong Praja

Sehubungan hal tersebut, kiranya diharapkan bantuan Saudara untuk meneliti Pergub tentang Inspektorat, Bappeda dan Lemtekda , Satpol Pamong Praja , Kantor Penghubung dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dimaksud sesuai teknis perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Gubernur untuk ditanda tangani.

KEPALA BIRO ORGANISASI

**Ir. H. MUDRIKA**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19580209 198603 1 004

☞ .

.  
. .  
. .

5. Dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, maka diperlukan informasi yang signifikan agar upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional lebih dapat eksis lagi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, akan diadakan lokakarya Evaluasi Jabatan Fungsional yang direncanakan pelaksanaannya pada minggu ke tiga bulan Desember 2009.
3. Berkenaan dengan hal itu, perlu menugaskan Pejabat/ Pegawai , sebagai berikut :
  1. Armen, SE : (ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara)
  2. Dra. Zulida Rivai, (ke Departemen Dalam Negeri)
  3. Muzirwan,S.H, (ke Badan Kepegawaian Negara)
4. Dalam rangka melakukan konsultasi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lokakarya Evaluasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 s/d 11 Desember 2009.
5. Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2009, kegiatan Evaluasi Jabatan Fungsional, Nomor Rekening 1.20.1.20.03.29.06.5.2.2.15.02.
6. Sehubungan hal tersebut, dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Surat Perintah Tugas terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010078715

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat  
Dari : Kepala Biro Organisasi  
Tanggal : 30 September 2010  
Lampiran : 1 (satu) eksp.  
Perihal : **Klarifikasi hasil analisis jabatan.**

---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pengumpulan dan pengolahan data jabatan pada 14 SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, perlu kiranya dikonfirmasi dengan SKPD terkait agar data jabatan yang diperoleh benar-benar valid

dan tidak dipermasalahkan oleh SKPD. Hasil konfirmasi tersebut akan diedit kembali dan kemudian ditetapkan dengan Pergub tentang Informasi Jabatan. Di mana informasi jabatan tersebut akan berguna untuk keperluan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan kebutuhan Diklat.

Adapun 14 SKPD yang telah selesai dilakukan pengumpulan dan pengolahan data jabatan adalah :

- a) Inspektorat Provinsi
- b) Bappeda
- c) BKD
- d) Badan Diklat
- e) Badan Kesbang Pol. dan Linmas
- f) Bapedalda
- g) BPM
- h) Badan Perpustakaan dan Kearsipan
- i) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
- j) Badan Ketahanan Pangan
- k) Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi
- l) Satuan Polisi Pamong Praja
- m) Kantor Penghubung
- n) Dinas Perhubungan.

Sehubungan hal tersebut, dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Surat Klarifikasi hasil analisis jabatan dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

KEPALA BIRO ORGANISASI

**Ir. H. MUDRIKA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410009657

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010078715

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sdr Kepala Biro Hukum dan HAM  
Dari : Kepala Biro Organisasi  
Tanggal : 9 Desember 2009  
Lampiran : 1 (satu) konsep Pergub  
Perihal : **Penelitian draft Pergub. tentang Uraian Jabatan.**

---

Bersama ini disampaikan kepada Sdr. hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai tindaklanjut dari Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Setwan DPRD Propinsi Sumbar dan Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 50 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas eselon terendah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Setwan DPRD Propinsi Sumbar, perlu dibuatkan Uraian Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Setwan DPRD Propinsi Sumbar. Hal ini sesuai Permendagri Nomor 5 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa setiap Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota harus membuat Uraian Jabatan.
2. Sesuai DPA Perubahan Biro Organisasi Tahun 2009 telah dimulai pekerjaan Uraian jabatan dengan penyebaran angket Daftar Pertanyaan kepada Pemegang Jabatan struktural dan non struktural pada Sekretariat Daerah dan DPRD dan saat ini tengah dilakukan pengolahannya. Adapun uraian jabatan yang diolah tersebut adalah :
  - 1). Biro Pemerintahan dan Kependudukan
  - 2). Biro Hukum
  - 3). Biro Humas dan Protokol
  - 4). Biro Perekonomian
  - 5). Biro Bina Sosial
  - 6). Biro Organisasi
  - 7). Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau
  - 8). Biro Umum
  - 9). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Sehubungan hal tersebut, kiranya diharapkan bantuan Saudara untuk meneliti konsep Pergub tentang Uraian Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sesuai teknis Perundang-undangan yang berlaku serta dapat menyampaikan hasilnya kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI

**Drs. YASTRI ALPHIAN**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650316 199308 1 001

KEPALA BIRO ORGANISASI

**Ir. H. MUDRIKA**

Pembina Utama Muda

NIP. 410009657

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Plt. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat  
Dari : Kepala Biro Organisasi  
Tanggal : 4 Juni 2010  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Nomor : 061/ /Org-2009  
Perihal : **Rapat Evaluasi pengumpulan dan pengolahan data jabatan.**

---

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, hal-hal sebagai berikut :

2. Sebagai tindak lanjut Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Prop. Sumbar, telah dilakukan pengumpulan data jabatan dan selanjutnya akan dilakukan pengolahan data jabatan .
3. Sesuai dengan dengan DPA SKPD Biro Organisasi Tahun Anggaran 2010, terdapat kegiatan Penyusunan Informasi Jabatan untuk 14 SKPD, sebagai berikut :
  - a) Inspektorat Provinsi
  - b) Bappeda
  - c) BKD
  - d) Badan Diklat
  - e) Badan Kesbang Pol. dan Linmas
  - f) Bapedalda
  - g) BPM
  - h) Badan Perpustakaan dan Kearsipan
  - i) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
  - j) Badan Ketahanan Pangan
  - k) Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi
  - l) Satuan Polisi Pamong Praja
  - m) Kantor Penghubung
  - n) Dinas Perhubungan.
4. Sehubungan dengan penyebaran blangko Daftar Pertanyaan kepada Responden Pemegang jabatan pada 14 SKPD, akan dilakukan rapat Evaluasi pengumpulan dan pengolahan data jabatan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 7 s/d 11 Juni 2010 yang bertempat di Ruang Rapat Setda. Untuk itu bersama ini disampaikan kepada Bapak undangan Rapat pengumpulan dan pengolahan data jabatan (terlampir) , untuk Bapak tanda tangani.
5. Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO ORGANISASI

**Ir. H. MUDRIKA**  
Pembina Utama Muda  
NIP.410009657

6. yakni Badan/
7. Penyusunan Rincian Tugas Pemegang Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, yang merupakan perbaikan dari Rincian Tugas sejenis yang dibuat berdasarkan urusan kewenangan sesuai PP Nomor 37 Tahun 2008 .
7. Kegiatan penyusunan rincian tugas tersebut telah dikonsultasikan dengan SKPD terkait, untuk selanjutnya dimintakan pertimbangan dan arahan dari pihak Departemen Dalam Negeri di Jakarta , sebelum dijadikan Peraturan Gubernur.
8. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini ditugaskan Pejabat dari Biro Organisasi, sebagai berikut :
  - **Dra.Zulida Rivai**, Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan, bagian Kelembagaan, Biro Organisasi - Penata Tk.I (III/d) .

untuk melakukan konsultasi Penyusunan Rincian Tugas Pemegang Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat ke Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri Jalan Merdeka Barat Jakarta selama 2 ( dua) hari mulai tanggal 2 s/d 3 Desember 2009 .

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Setda. Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2009.

Sehubungan hal tersebut, dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Surat Perintah Tugas terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI

**Drs. YASTRI ALPHIAN**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650316 199308 1 001

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**Drs. H. CHAIRUL DARWIS**  
Pembina Utama Muda  
NIP.010078715



Laporan : **Keuangan Biaya uang Transportasi Dalam Rangka Pengumpulan Data Evaluasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, yang dilakukan pada tanggal 5 dan 6 April 2010 (Muzirwan dan Rikianto )**

No	Barang- barang yang dibeli	Jumlah
1	Pembelian rupa –rupa minuman , tgl.7 /4 di Lubuk Alung, terdiri M.150 Kaleng 3, 1 botol sprite, 3 SMS Gelas	Rp. 17.500,-
2	Beli oleh2 Panyaram 3 bungkus @ 8.000,- di Kayutanam	Rp. 24.000,-
3	Biaya Makan siang 3 orang di Kedai Nasi Miss Munin, Sarilamak Payakumbuh	Rp. 72.000,-
4	Beli 1 bungkus Rokok “Sampurna Mild”	Rp. 11.000,-
5	Beli Minyak untuk Kunjungan ke Padang, Panjang, Tanah Datar, Payakumbuh, 50 Kota,Bukittinggi	Rp.150.000,-
6	<u>Hari Pertama .....</u> Beli Minyak ( BBM) untuk kunjungan ke Pariamanj, Kab. Pariaman, Lubuk Basung , dan Pasaman Barat	Rp. 166.707,-
7	Beli minuman 3, wafer dan kue keju tambah 1 bungkus Rokok Sampurna a Mild , di depan terminal Sungai Limau	Rp. 36.000,-
8	Biaya makan siang 3 orang + 4 jus naga @ 10.000,-	Rp. 99.500,-
	Uang belanja Sopir Er, BA 2006 AR pada tanggal 6/4	Rp. 350.000,-
	Uang belanja Sopir Er, BA 2006 AR pada tanggal 7/4	Rp. 350.000,-
	Uang belanja Muzirwan pada tanggal 7/4 dan 6/4	Rp. 300.000,
	Uang belanja Rikianto pada tanggal 7/4 dan 6/4	Rp. 300.000,-
	Jumlah ..... Terbilang ( <i>SATU JUTA SEMBILAN RATUS RIBU TUJUH RATUS RUPIAH</i> )	<b>Rp. 1.900.700,-</b>

Pemasukan : Rp. 1.900.700,-  
 Pengeluaran: Rp. 1.920.000,-  
 Kelebihan : **Rp. 19.300,-**

Padang, 7 April 2010  
Yang membuat Laporan

MUZIRWAN,SH

## **SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : /Print/GSB-2009

- I D A S A R : 1. Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan APBD Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2009.
2. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.
3. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2008 tanggal 29 Desember 2008 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009.

III. Ditugaskan kepada Saudara :

1. Armen, SE (ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara)
2. Dra. Zulida Rivai, (ke Departemen Dalam Negeri)
3. Muzirwan,SH, (ke Badan Kepegawaian Negara)

III. Dalam rangka melakukan konsultasi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lokakarya Evaluasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 s/d 11 Desember 2009 .

- IV. Biayanya dibebankan pada DPA Biro Organisasi Setda. Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2009, kegiatan Evaluasi Jabatan Fungsional , Nomor Rekening 1.20.1.20.03.29.06.5.2.2.15.02.
- V. Demikianlah Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH

**H. FIRDAUS K, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530309 197601 1 005

KEPALA BIRO APARATUR

**YUEN KARNOVA, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410010354

Padang, Oktober 2009

Kepada Yth :  
Bapak Manager BNI VISA

d.a. Wisma 46 Lantai Dasar  
Jalan Sudirman Kav. 1  
Jakarta 10220  
PO.BOX 8888.

Dengan hormat,

Bersama ini saya kembalikan Kartu BNI Visa (UNAND Card) a.n. Muzirwan, SH dimana posisi hutang saya adalah Rp. 579 ( CR), sekaligus dengan ini menyatakan berhenti dari keanggotaan BNI Visa. Dengan demikian kewajiban membayar iuran tahunan sebesar Rp. 120.000,- menjadi batal karena pemberhentian ini.

Demikian disampaikan, terima kasih

Hormat saya ,

Muzirwan,S.H

## **LAPORAN PERJALANAN DINAS**

- I. Dasar : Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 3269/Print/GSB-2009 tanggal 24 Juli 2012 tentang perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Perangkat daerah kabupaten/ kota
- II. Tujuan lokasi : Departemen Dalam Negeri, Jalan Merdeka Barat Jakarta
- III. Maksud perjalanan Dinas : Melakukan konsultasi persiapan Pembentukan Lembaga lain.
- IV. Nama yang melakukan perjalanan Dinas : Erizal Rosal,S.H, IV/b, Kabag. Kelembagaan
- V. Lama Perjalanan Dinas : 2 (dua) hari, mulai tanggal 13 s/d 14 Juli 2009
- VI. Laporan Singkat :  
Dalam rangka mempersiapkan pembentukan lembaga lain sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 57 Tahun 2007, yaitu :
1. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
  2. BNP ( Badan Narkotika Nasional )
  3. Sekretariat Korpri Propinsi
  4. Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
  5. KPID ( Komisi Penyiaran Indonesia Daerah)
  6. Pelayanan Terpadu.

Saran dari Kabag. Kelembagaan Departemen Dalam Negeri agar segera dibentuk Lembaga lain sesuai tersebut di atas, dan dapat dikonsultasikan kembali.

Demikianlah laporan perjalanan Dinas ini dibuat sebagai laporan.

Padang, 15 Juli 2009

Yang melakukan  
Perjalanan Dinas

**ERIZAL ROSAL, S.H.**

Pembina Tk. I

NIP. 19570407 197810 1 001

Padang, 9 Juli 2010

Nomor : 061/ / Org-2010  
Lampiran : -  
Perihal : **Permintaan Artikel Bulletin O dan A**

Kepada Yth :  
Sdr .....  
.....

di -  
Padang.

Dalam upaya peningkatan wawasan dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dengan ini diinformasikan kepada Bapak/Ibu/Sdr. bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat C.q. Biro Organisasi untuk Tahun 2009 akan menerbitkan Bulletin Organisasi dan Aparatur (O dan A) untuk kedua kali edisi XXII/VIII/2009. Bulletin tersebut berisikan artikel-artikel yang bersifat membangun sistem, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan ethos kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan baik.

Sehubungan dengan maksud di atas, dengan ini diharapkan peran serta Bapak/Ibu/Sdr. untuk berpartisipasi dalam bentuk karya tulis yang menyangkut bidang :

1. Masalah Pemerintahan Nagari ( Biro Pemerintahan dan Kependudukan)
2. Masalah Implementasi PP Nomor 41 Tahun 2007 (Biro Organisasi).
3. Masalah Pembangunan ( Bappeda )
4. Masalah kepegawaian ( Biro Organisasi )
5. Masalah Etika dan Moralitas PNS (Keagamaan).

dengan penyajian artikel minimal 8 halaman folio, jarak ketikan 1,5 spasi dengan huruf standar **Time Roman 12** dan dilengkapi dengan pas foto ukuran 3x4 hitam putih 1 (satu) buah untuk setiap artikel yang diterbitkan akan disampaikan (satu) eksamplar Bulletin Organisasi dan Aparatur untuk jasa penulisan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr. terlebih dahulu disampaikan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
U.b. KEPALA BIRO ORGANISASI

**Ir. H. EDI ARADIAL**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195770220 198503 1 006

Padang, 9 Juli 2010

Nomor : 061/ / Org-2010  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Artikel Bulletin O dan A

Kepada Yth :  
Sdr .....  
.....

di -

**Padang.**

Dalam upaya peningkatan wawasan dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dengan ini diinformasikan kepada Bapak/Ibu/Sdr. bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat C.q. Biro Organisasi untuk Tahun 2009 akan menerbitkan Bulletin Organisasi dan Aparatur (O dan A) untuk kedua kali edisi XXII/VIII/2009. Bulletin tersebut berisikan artikel-artikel yang bersifat membangun sistem, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan ethos kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan baik.

Sehubungan dengan maksud di atas, dengan ini diharapkan peran serta Bapak/Ibu/Sdr. untuk berpartisipasi dalam bentuk karya tulis yang menyangkut bidang :

1. Masalah Pemerintahan Nagari ( Biro Pemerintahan dan Kependudukan)
2. Masalah Implementasi PP Nomor 41 Tahun 2007 (Biro Organisasi).
3. Masalah Pembangunan ( Bappeda )
4. Masalah kepegawaian ( Biro Organisasi )
5. Masalah Etika dan Moralitas PNS (Keagamaan).

dengan penyajian artikel minimal 8 halaman folio, jarak ketikan 1,5 spasi dengan huruf standar **Time Roman 12** dan dilengkapi dengan pas foto ukuran 3x4 hitam putih 1 (satu) buah untuk setiap artikel yang diterbitkan akan disampaikan (satu) eksamplar Bulletin Organisasi dan Aparatur untuk jasa penulisan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr. terlebih dahulu disampaikan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
U.b. KEPALA BIRO ORGANISASI

**Ir. H. EDI ARADIAL**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195770220 198503 1 006

Nomor : 061/ / Org-2010  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Padang, 3 Juli 2010

Kepada :

Sdr. ....  
(Tim Analisis Jabatan pada Badan/  
Dinas .....  
.....  
Prov.Sumbar )

di -

**Padang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang SOTK Badan, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, akan dilakukan analisis jabatan pada 14 SKPD untuk tahun 2010.

Sehubungan dengan kegiatan pengumpulan data jabatan pada 14 SKPD Badan / Lemtekda di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sejak pertengahan April 2010 lalu, direncanakan akan dilakukan evaluasi terhadap data jabatan baik yang belum terkumpul, sudah terkumpul, dan yang akan diolah menjadi informasi jabatan.



Untuk kegiatan evaluasi data jabatan dimaksud, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari : Senin s/d Jum'at  
Tanggal : 7 s/d 11 Juni 2010  
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Setda Sumbar ( lantai II )  
Acara : 1. Evaluasi pengumpulan data jabatan dan pengolahan data jabatan  
2. Hal – hal lain yang dirasa perlu.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

Plt. SEKRETARIS DAERAH

**H. MAHMUDA RIVAL, SH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19531221 198310 1 001

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010078715

Padang, 9 Juli 2009

Nomor : 061/ / Org-2009  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth :  
Sdr. Anggota Tim Penerbitan  
Bulletin Organisasi dan  
Aparatur (**O dan A**)

di -

**Padang**

Sehubungan akan diterbitkan Bulletin O dan A Edisi 22/VII/2009, dengan ini diminta kehadiran Sdr. untuk dapat menghadiri Rapat yang akan diadakan pada :

- Hari : **Jum'at**  
Tanggal : 10 Juli 2009  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Kepala Biro Organisasi  
Acara : 1. Penetapan topik yang akan dimuat dalam Bulletin O dan A Edisi 22  
2. Hal – hal lain yang dirasa perlu.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
U.b. KEPALA BIRO ORGANISASI

**Ir. H. EDI ARADIAL**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195770220 198503 1 006

Padang, 9 Juli 2009

Nomor : 061/ / Org-2009  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris DPRD Prov. Sumbar
2. Sdr. Kepala Biro .....  
.....  
.....  
di lingkungan Setda Prov.Sumbar

di -

**Padang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang SOTK di lingkungan Setda dan Setwan DPRD Provinsi Sumatera Barat, akan dilakukan analisis jabatan pada SKPD untuk tahun 2009.

KEPALA BIRO ORGANISASI

**Ir. H. EDI ARADIAL**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195770220 198503 1 006

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Kepala Biro Organisasi  
Dari : Kepala Bagian Kelembagaan

Tanggal : 13 Juli 2009  
Nomor : 065/ /Org-2009  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Penerbitan Bulletin Organisasi dan Aparatur Edisi XXII/VII/2009.**

---

Dengan ini dilaporkan kepada Bapak bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Tahun 2009 salah satu kegiatan adalah Penerbitan Bulletin Organisasi dan Aparatur untuk 3 (tiga) kali penerbitan sebanyak 1.375 eksemplar, dengan Nomor Rekening 1.20.1.20.03.29.09.5.2. Dimana untuk 1 kali penerbitan tersedia dana untuk 5 (lima) judul @ Rp. 350.000,- dengan jumlah Rp. 1.750.000,- terbilang (*satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) pada penerbitan ke dua Tahun Anggaran 2009 edisi XXII/VIII/2009 sebanyak 375 eksemplar dan direncanakan akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja dengan Rekanan yang memenuhi persyaratan.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon persetujuan Bapak selanjutnya untuk diproses, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN

**ERIZAL ROSAL,S.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19570407 197810 1 001

**NOTA DINAS**

Kepada : Sdr. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Organisasi  
Dari : Kepala Biro Organisasi  
Tanggal : 13 Juli 2009  
Nomor : 065/ /Org-2009  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Proses Penerbitan Bulletin Organisasi dan Aparatur Edisi XXII/VII/2009.**

---

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Kelembagaan tanggal 13 Juli 2009 dan sesuai dengan DPA Biro Organisasi Tahun 2009, salah satunya terdapat kegiatan Penerbitan Bulletin Organisasi dan Aparatur untuk 3 (tiga) kali penerbitan sebanyak 1.125 eksemplar, dengan Rekening Nomor 1.20.1.20.03.29.09.5.2.

Sehubungan hal tersebut di atas, akan diterbitkan Bulletin Organisasi dan Aparatur untuk ke II Edisi XXII/VIII/2009 sebanyak 375 eksamplar, sesuai ketentuan yang berlaku untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kerja dengan Rekanan yang memenuhi persyaratan.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

KEPALA BIRO ORGANISASI

**Ir. H. EDI ARADIAL**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195770220 198503 1 006

Dengan ini dilaporkan kepada Bapak bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Tahun 2009 salah satu kegiatan adalah Penerbitan Bulletin Organisasi dan

Aparatur untuk 3 (tiga) kali penerbitan sebanyak 1.375 eksamplar, dengan Nomor Rekening 1.20.1.20.03.29.09.5.2. Dimana untuk 1 kali penerbitan tersedia dana untuk 5 (lima) judul @ Rp. 350.000,- dengan jumlah Rp. 1.750.000,- terbilang (*satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) pada penerbitan ke dua Tahun Anggaran 2009 edisi XXII/VII/2009 sebanyak 375 eksamplar dan direncanakan akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja dengan Rekanan yang memenuhi persyaratan.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon persetujuan Bapak selanjutnya untuk diproses, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN

**ERIZAL ROSAL,S.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19570407 197810 1 001

KEPALA BIRO ORGANISASI

**Ir.H. EDI ARADIAL**  
Pembina Tk. I  
NIP. 410008935

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**

Pembina Utama Muda

NIP. 010078715

## **Nota Dinas**

Kepada : Bapak Kepala Biro Aparatur

Dari : Kabag.Anjab, Forjab dan Persyaratan Jabatan

Tanggal : 4 Agustus 2008

Lampiran: 1 (satu) berkas

Sifat : Biasa

Nomor : 065/ /Apt-2008

Perihal : **Persetujuan Pencairan Dana Pemeliharaan Peralatan Komputer**

---

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, sesuai dengan program kerja yang telah disetujui dalam alokasi dana APBD Propinsi Sumatera Barat dalam DPD SKPD Tahun 2008 , dengan kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Perorangan Pejabat.

Sehubungan dengan itu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, mohon persetujuan Bapak untuk dapat merealisasikan Dana Pemeliharaan Peralatan Komputer, sebagai berikut :

**Belanja Suku cadang :**

- Pemeliharaan Peralatan Komputer : Rp. **450.000,-**

terbilang : Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

( Faktur terlampir )

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak diartikan terima kasih.

Kabag.Anjab, Forjab dan Persyaratan Jabatan

**ARMEN, BA**

Pembina Tk.I

NIP. 160016652

**KELENGKAPAN BAHAN KENAIKAN PANGKAT  
DARI III/c KE III/d**

- ❖ Salinan fotocopy pangkat III/c , rangkap 3
- ❖ Salinan copy DP 3 Tahun 2007 dan 2008, rangkap 3
- ❖ Salinan copy Karpeg, rangkap 3
- ❖ Salinan Copy Ijazah terakhir, rangkap 3

**Paling lambat diserahkan tanggal 31 Januari 2009  
Untuk memperoleh persetujuan Kanreg.XII BKN Pekanbaru.  
SK Pangkat tmt tanggal 1 April 2009**

---

**KELENGKAPAN BAHAN KENAIKAN PANGKAT  
DARI III/c KE III/d**

- ❖ Salinan fotocopy pangkat III/c , rangkap 3
- ❖ Salinan copy DP 3 Tahun 2007 dan 2008, rangkap 3
- ❖ Salinan copy Karpeg, rangkap 3
- ❖ Salinan Copy Ijazah terakhir, rangkap 3

**Paling lambat diserahkan tanggal 31 Januari 2009  
Untuk memperoleh persetujuan Kanreg.XII BKN Pekanbaru.  
SK Pangkat tmt tanggal 1 April 2009**



## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Biro Umum Setda Prop. Sumbar  
Dari : Kepala Biro Aparatur  
Tanggal : 29 Nopember 2007  
Nomor : 065/ /APT-2007  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Permintaan Mobil Dinas Operasional dan Sopir**

---

Dalam rangka Sosialisasi Bimbingan Jabatan, perlu dilakukan Bimbingan Jabatan ke unit Unit kerja/ SKPD di lingkungan Propinsi Sumatera Barat.

Untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Jabatan dimaksud akan dilakukan kunjungan ke 7( tujuh ) UPTD , sebagai berikut :

1. UPTD. Balai Mekanisasi Pertanian di Bukittinggi, yang merupakan UPTD. dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prop. Sumbar.
2. UPTD. Balai Latihan Kerja Padang Panjang, yang merupakan UPTD. dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumbar.
3. UPTD. Balai Latihan Kerja Payakumbuh, yang merupakan UPTD. dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumbar.
4. UPTD. Balai Budi Daya Ikan (BBI) Sicincin , yang merupakan UPTD. dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
5. UPTD. Balai Pengobatan Penyakit Paru – Paru Lubuk Alung, yang merupakan UPTD. dari Dinas Kesehatan.
6. UPTD. Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang di Cubadak, Batu sangkar, yang merupakan UPTD. dari Dinas Sosial.
7. UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami, Kab.Solok , yang merupakan UPTD. dari Dinas Sosial

Yang dilaksanakan selama 2 (dua ) hari , dari tanggal 3 s/d 4 Nopember 2007 .

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan bantuan transportasi (Kendaraan Dinas Operasional) beserta Sopir, demi kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasama yang baik ini diaturkan terimakasih.

**KEPALA BIRO APARATUR**

**YUEN KARNOVA, SE**  
Pembina Utama Muda, NIP. 410010354

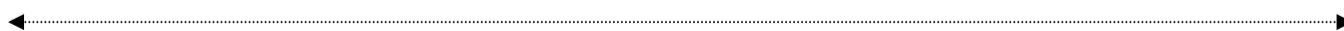
**SUSUNAN ACARA**  
**RAKORNIS PENILAIAN KINERJA PERORANGAN PEJABAT**

---

<i>No.</i>	<i>M a t e r i</i>	<i>Penyaji / Nara - sumber</i>	<i>Moderator</i>	<i>Waktu</i>
1	Pembukaan	-	Panitia	09.00 – 09.30
2	Penataan Kelembagaan ( <i>diskusi</i> )	Kepala Biro Aparatur	Arlis, SP	09.30 – 11.00
3	Program Pendayagunaan Analisa Jabatan ( <i>diskusi</i> )	Kabag.Anjab,Forjab, dan Persyaratan Jabatan	Arlis, SP	11.00 – 12.30
-	Ishoma	-	-	12.30 – 13.30
4	D i s k u s i	Pendayagunaan Analisis Jabatan	Armen,BA	13.30 – 14.30

Padang, 25 Juli 2008

*Panitia Penyelenggara*



**SUSUNAN ACARA**  
**LOKA KARYA EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**

---

<i>No.</i>	<i>M a t e r i</i>	<i>Penyaji/ Nara - sumber</i>	<i>Moderator</i>	<i>Waktu</i>
1	Pembukaan	Sekretaris Daerah Propinsi	Panitia	09.00 – 09.30
2	Kebijakan Pemda Propinsi tentang Jabatan Fungsional	Kepala Biro Organisasi	Erizal Rosal,S.H	09.30 – 11.00
3		Armen,SE ( Kepala Bidang Data dan Pengembangan Karier)	Drs. Yastri Alphian	11.00 – 12.30
4	<i>Ishoma</i>	-	Panitia	12.30 – 13.00
5		Sekretaris Daerah Propinsi	Rizaldi ,AP, M.Si	13.00 – 14.30
6		Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Dra. Zulida Rivai	14.30 – 15.45
7	Diskusi	-	Drs. Anasir	15.45 – 17.00
8	Penutupan Acara	Asisten Administrasi Umum	Erizal Rosal,SH.	17.00 - selesai

Padang, 20 Nopember 2009

*Panitia Penyelenggara*

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Prop. Sumbar  
Dari : Asisten Administrasi Umum  
Tanggal : 15 Desember 2009  
Nomor : 065/ /Org-2009  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Sambutan Pembukaan Lokakarya Evaluasi Jabatan Fungsional di lingkungan Propinsi Sumatera Barat.

---

Bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa Biro Organisasi akan melaksanakan kegiatan Lokakarya Evaluasi Jabatan Fungsional di lingkungan Propinsi Sumatera Barat. dengan Peserta Pemegang Jabatan Fungsional sektor Kehutanan , Pertanian, dan Peternakan yang tersebar di Kabupaten/ Kota, pada :

Hari : **Senin**  
Tanggal : 29 Desember 2009  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Aula UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Propinsi Sumatera Barat, Jalan Gajah Mada , Gunung Pangilun Padang

Kepada Bapak dimohon untuk dapat memberikan Kata Sambutan dan sekaligus membuka acara Rakornis dimaksud, dan bahan yang Bapak perlukan sedang kami siapkan. Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010078715

Dalam rangka Sosialisasi Bimbingan Jabatan, perlu dilakukan Bimbingan Jabatan ke unit Unit kerja/ SKPD di lingkungan Propinsi Sumatera Barat.

Untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Jabatan dimaksud akan dilakukan kunjungan ke 7( tujuh ) UPTD , sebagai berikut :

8. UPTD. Balai Mekanisasi Pertanian di Bukittingi, yang merupakan UPTD. dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prop. Sumbar.
9. UPTD. Balai Latihan Kerja Padang Panjang, yang merupakan UPTD. dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumbar.
10. UPTD. Balai Latihan Kerja Payakumbuh, yang merupakan UPTD. dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sumbar.
11. UPTD. Balai Budi Daya Ikan (BBI) Sicincin , yang merupakan UPTD. dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
12. UPTD. Balai Pengobatan Penyakit Paru – Paru Lubuk Alung, yang merupakan UPTD. dari Dinas Kesehatan.
13. UPTD. Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang di Cubadak, Batu sangkar, yang merupakan UPTD. dari Dinas Sosial.
14. UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami, Kab.Solok , yang merupakan UPTD. dari Dinas Sosial

Yang dilaksanakan selama 2 (dua ) hari , dari tanggal 3 s/d 4 Nopember 2007 .

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan bantuan transportasi (Kendaraan Dinas Operasional) beserta Sopir, demi kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasama yang baik ini diaturkan terimakasih.

**KEPALA BIRO APARATUR**

**YUEN KARNOVA, SE**  
Pembina Utama Muda, NIP. 410010354

Padang, 14 Agustus 2012

Perihal : Permohonan Cuti Tahunan.

Kepada Yth  
Bapak Kepala Biro Organisasi  
Setda. Prop. Sumbar  
di –  
Padang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKIANTO, A.Md.  
NIP. : 19791227 201001 1 004  
Pangkat /Gol: Pengatur ( II/c)  
Jabatan : Pullahta Subag Kelembagaan Provinsi Biro Organisasi

Dengan ini mengajukan permohonan Cuti selama 4 ( empat ) hari terhitung mulai tanggal 23 s/d 26 Agustus 2012 .

Selama menjalankan cuti tahunan alamat rumah saya adalah di Jalan Merdeka III RT 03 RW III Perumahan Arai Pinang Blok K/1 Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo Padang..

Demikianlah permohonan ini saya ajukan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya

RIKIANTO,A.Md  
NIP. 19791227 201001 1 004

--	--

<p>Catatan Pejabat Kepegawaian :</p> <p>Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuti Tahunan</li> <li>2. Cuti Besar</li> <li>3. Cuti Sakit</li> <li>4. Cuti Bersalin</li> <li>5. Cuti karena alasan penting</li> <li>6. Keterangan lain- lain</li> </ol>	<p>Catatan Pertimbangan Atasan langsung :</p> <p style="text-align: center;"><b>Ameli, S.Sos</b> NIP.19620906 198511 2 003</p>
	<p style="text-align: center;">Kabag Kelembagaan</p> <p style="text-align: center;">ERIZAL ROSAL, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19570407 197810 1 001</p>

Padang, Nopember 2007

Perihal : Permohonan Cuti Bersalin

Kepada Yth :  
Bapak Kepala Biro Aparatur  
Setda. Prop. Sumbar  
di –  
PADANG

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUFNIDA  
NIP. : 010238907  
Pangkat /Gol: Pengatur Tk. I ( II/d)

Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Bersalin selama 2 ( dua ) bulan terhitung mulai tanggal ..... 2007 s/d ..... 2008

Selama menjalankan cuti Bersalin alamat rumah saya adalah Belakang Rumah Bersalin “ Restu Illahi “ RT 08, RW III Kelurahan Kampung Dalam , Kecamatan Pauh Kota Padang. ( HP. 081363710444 ).

Demikianlah permohonan ini saya ajukan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya

YUFNIDA  
NIP. 010238907

Catatan Pejabat Kepegawaian :

Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan :

7. Cuti Tahunan
8. Cuti Besar
9. Cuti Sakit
10. Cuti Bersalin
11. Cuti karena alasan penting
12. Keterangan lain- lain

Catatan Pertimbangan Atasan langsung :

Kabag. Anjab, Forjab dan  
Persyaratan Jabatan

ARMEN,BA  
Pembina Tk. I  
NIP. 160016652



## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Asisten Administrasi  
Dari : Kepala Biro Aparatur

Tanggal : 1 Nopember 2007  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Nomor : 065/ /Apt-2007  
Perihal : **Bantuan Narasumber Pelatihan Bimtek Analisis Jabatan**

---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 060/1519/X/Org/2007 tanggal 31 Oktober 2007 perihal Mohon Bantuan Tenaga Instruktur Bimbingan Teknis Analisis Jabatan, bersama ini ditugaskan Pejabat/ Pegawai pada Biro Aparatur untuk menjadi Instruktur, sebagai berikut :

1. Yuen Karnova,SE, Kepala Biro Aparatur - Pembina Utama Muda( IV/c )
2. Armen,BA, Kabag. Anjab, Forjab dan Persyaratan Jabatan - Pembina Tk. I (IV/b ).
3. Dra.Zulida Rivai , Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan - Penata Tk.I (III/d) .
4. Muzirwan,S.H, Staf Sub Bagian Analisis Jabatan - Penata ( III/c).

selama **5** (lima ) hari dari tanggal 5 s/d 9 Nopember 2007 ( jadwal terlampir )

Acara Bimtek tersebut diikuti oleh Pejabat/ Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh.

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Biro Aparatur Setda. Propinsi Sumatera Barat, Kegiatan Penyusunan Buku Informasi Jabatan, Rekening Nomor 1.20.1.20.08.28.18.

Sehubungan hal tersebut, dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Surat Perintah Tugas terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih.

KEPALA BIRO APARATUR

**YUEN KARNOVA, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410010354

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah  
Dari : Asisten Administrasi  
Tanggal : 22 Nopember 2007  
Lampiran : -  
Nomor : 061/ /Apt-2007  
Perihal : Persetujuan Realisasi Tambahan Uang ( TU ).

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, sesuai dengan Program kerja Bagian Analisis Jabatan, Formasi Jabatan dan Persyaratan Jabatan yang tertuang dalam kegiatan Penyusunan Informasi Jabatan, bahwa kegiatan ini telah memasuki Triwulan ke IV.

Sehubungan dengan itu guna memau pelaksanaan pekerjaan, dimohon persetujuan Bapak untuk dapat merealisasikan Tambahan Uang Kegiatan, sebagai berikut :

No	Uraian	Kode Rekening	Jumlah
1	Belanja Lembur PNS	5.2.1.03.01	Rp. 6.300.000,-
2	Belanja Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.01	Rp. 3.460.000,-
3	Belanja Bahan Bakar Minyak	5.2.1.01.06	Rp. 1.350.000,-
4	Belanja Cetak	5.2.1.06.01	Rp. 18.140.000,-
5	Belanja Foto copy	5.2.1.06.02	Rp. 9.183.000,-
6.	Belanja Sewa/ Gedung	5.2.2.07.02	Rp. 2.500.000,-
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.2.1.08.01	Rp. 1.600.000,-
8	Belanja Makan dan Minum Rapat	5.2.1.11.02	Rp. 8.070.000,-
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.2.1.15.01	Rp. 16.500.000,-
10	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.1.15.02	Rp. 21.670.000,-
JUMLAH .....			Rp. <b>89.133.000,-</b>
Terbilang : ( <i>Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah</i> )			

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010078715

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah  
Dari : Asisten Administrasi  
Tanggal : 22 Nopember 2007  
Lampiran : -  
Nomor : 061/ /Apt-2007  
Perihal : Persetujuan Realisasi Tambahan Uang ( TU ).

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, sesuai dengan Program kerja Bagian Analisis Jabatan, Formasi Jabatan dan Persyaratan Jabatan yang tertuang dalam kegiatan Penyusunan Informasi Jabatan, bahwa kegiatan ini telah memasuki Triwulan ke IV.

Sehubungan dengan itu guna memau pelaksanaan pekerjaan, dimohon persetujuan Bapak untuk dapat merealisasikan Tambahan Uang Kegiatan, sebagai berikut :

No	Uraian	Kode Rekening	Jumlah
1	Belanja Honor Nara Sumber	5.2.1.01.08	Rp. 1.360.000,-
2	Belanja Lembur PNS	5.2.1.03.01	Rp. 6.300.000,-
3	Belanja Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.01	Rp. 3.460.000,-
4	Belanja Bahan Bakar Minyak	5.2.1.01.06	Rp. 1.350.000,-
5	Belanja Cetak	5.2.1.06.01	Rp. 18.140.000,-
6	Belanja Foto copy	5.2.1.06.02	Rp. 9.183.000,-
7.	Belanja Sewa/ Gedung	5.2.2.07.02	Rp. 2.500.000,-
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.2.1.08.01	Rp. 1.600.000,-
9	Belanja Makan dan Minum Rapat	5.2.1.11.02	Rp. 8.070.000,-
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.2.1.15.01	Rp. 16.500.000,-
11	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.1.15.02	Rp. 21.670.000,-
JUMLAH .....			Rp. <b>90.133.000,-</b>
Terbilang : ( <i>Sembilan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah</i> )			

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**

Pembina Utama Muda

NIP. 010078715

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 060/1519/X/Org/2007 tanggal 31 Oktober 2007 perihal Mohon Bantuan Tenaga Instruktur Bimbingan Teknis Analisis Jabatan, bersama ini ditugaskan Pejabat/ Pegawai pada Biro Aparatur untuk menjadi Instruktur, sebagai berikut :

5. Yuen Karnova,SE, Kepala Biro Aparatur - Pembina Utama Muda( IV/c )
6. Armen,BA, Kabag. Anjab, Forjab dan Persyaratan Jabatan - Pembina Tk. I (IV/b ).
7. Dra.Zulida Rivai , Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan - Penata Tk.I (III/d) .
8. Muzirwan,S.H, Staf Sub Bagian Analisis Jabatan - Penata ( III/c).

selama 5 (lima ) hari dari tanggal 5 s/d 9 Nopember 2007 ( jadwal terlampir )

Acara Bimtek tersebut diikuti oleh Pejabat/ Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh.

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Biro Aparatur Setda. Propinsi Sumatera Barat, Kegiatan Penyusunan Buku Informasi Jabatan, Rekening Nomor 1.20.1.20.08.28.18.

Sehubungan hal tersebut, dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Surat Perintah Tugas terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih.

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Asisten Administrasi  
Dari : Kepala Biro Aparatur  
Tanggal : 13 Nopember 2007  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Nomor : 065/ /Apt-2007  
Perihal : **Bantuan Narasumber Tenaga Instruktur Peny.Standar Kompetensi Jabatan**

---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 061/4269/Org/2007 tanggal 5 Nopember 2007 perihal Mohon Bantuan Tenaga Instruktur , bersama ini ditugaskan Pejabat/ Pegawai pada Biro Aparatur untuk menjadi Instruktur, sebagai berikut :

1. Armen,BA, Kabag. Anjab, Forjab dan Persyaratan Jabatan - Pembina Tk. I (IV/b ).
2. Dra.Zulida Rivai , Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan - Penata Tk.I (III/d) .

selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 s/d 21 Nopember 2007 ( jadwal terlampir )

Acara Bimtek tersebut diikuti oleh Pejabat/ Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang bertempat di Aula Kantor Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping. Materi yang disampaikan adalah tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003.

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Biro Aparatur Setda. Propinsi Sumatera Barat, Kegiatan Penyusunan Buku Informasi Jabatan, Rekening Nomor 1.20.03.28.18.5.2.

Sehubungan hal tersebut, dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Surat Perintah Tugas terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih.

KEPALA BIRO APARATUR

**YUEN KARNOVA, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410010354

**MATERI KOMPETENSI JABATAN :**

<b>1.</b>	<b>1. Pengantar Kompetensi Jabatan</b>
	<b>2. Tahap – tahap Pelaksanaan kegiatan Kompetensi Jabatan</b>
	<b>3. Komponen Kompetensi Jabatan</b>
	<b>4. Pengisian Blanko Kompetensi Jabatan</b>
<b>2</b>	<b>5. Penyusunan Syarat Pendidikan / <i>Simulasi</i></b>
	<b>Penyusunan Syarat Diklat / <i>Simulasi</i></b>
	<b>6. Pengolahan Data / <i>Simulasi</i></b>
<b>3</b>	<b>7. Pengumpulan dan Pengolahan Data :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Syarat Pendidikan</li><li>- Syarat Diklat</li></ul>

Padang, Agustus 2007

Nomor : 065/ / Apt-2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Audit SKPD**

Kepada Yth :  
Sdr. **Kepala Bawasda. Prop. Sumbar**

di -  
**Padang**

Dengan hormat disampaikan kepada Saudara bahwa dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4,5, dan 6 Tahun 2001 dalam waktu dekat akan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan SKPD Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan, serta peningkatan status Kantor Polisi Pamong Praja dari eselon III/a menjadi eselon II/b.

Bergabungnya beberapa SKPD akan memerlukan penataan administrasi organisasi terutama menyangkut Personil, Aset dan Keuangan, sehingga SKPD hasil perubahan Perda Nomor 4,5, dan 6 Tahun 2001 dapat melaksanakan aktifitasnya dengan baik.

Berkaitan dengan kebutuhan tersebut, diminta kepada Bawasda untuk menjadwalkan dan melaksanakan pemeriksaan terhadap :



1. Dinas Pendapatan Daerah
2. Biro Keuangan
3. Biro Perlengkapan
4. Biro Umum
5. Kantor Polisi Pamong Praja

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

**GAMAWAN FAUZI**

SEKRETARIS DAERAH

**Drs.H. YOHANNES DAHLAN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003662

## **LAPORAN PERJALANAN DINAS**

### **I. Pendahuluan**

Penyusunan Kompetensi Jabatan ini adalah dalam rangka pemenuhan makna Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2005 , dimana untuk menentukan Pemegang Jabatan perlu berpedoman kepada Syarat Kompetensi Jabatan. Untuk menyusun syarat kompetensi jabatan, Tim Kompetensi Jabatan Propinsi Sumatera Barat telah menyusun Pedoman Penyusunan Syarat Kompetensi Jabatan.

### **II. Isi Laporan.**

Pedoman Penyusunan Syarat Kompetensi Jabatan ini direncanakan merupakan Surat Keputusan Gubernur yang akan ditindaklanjuti oleh tiap SKPD. menetapkan syarat Kompetensi Jabatan untuk tiap jabatan struktural pada SKPD.

Untuk kesempurnaan materi Penyusunan draft ini, dilakukan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri dengan harapan akan mendapatkan koreksian dan saran perbaikan.

### **III. Kesimpulan/ saran.**

Pada prinsipnya Pejabat di Departemen Dalam menyambut baik penyusunan draft Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman Penyusunan Syarat Kompetensi Jabatan dan telah diterima masukan, dengan harapan apabila Penetapan Pejabat telah mempedomani syarat kompetensi jabatan, tentunya akan mendapatkan pejabat yang tepat untuk jabatan yang tepat pada tiap SKPD.

#### **IV. Penutup.**

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Padang, 4 September 2007

Yang melakukan perjalanan Dinas

**Dra. Zulida Rivai**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muzirwan,SH  
Nip. : 050067939  
Pangkat/Gol : Penata, III/c  
Jabatan : Staf Subag. Analisis Jabatan

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini terlampir antara lain :

1. Legalisis DP3 Tahun 2006, rangkap 2
2. Legalisir SK. Pangkat terakhir, rangkap 2
3. Legalisir KGB terakhir, rangkap 2

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya

**Muzirwan, SH**  
NIP. 0500067939

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**

Pembina Utama Muda  
NIP. 0100078715

---

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
ASISTEN ADMINISTRASI

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**

Pembina Utama Muda  
NIP. 0100078715

---

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
ASISTEN ADMINISTRASI

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**

Pembina Utama Muda  
NIP. 0100078715

Rekapitulasi Diklat Teknis / Fungsional yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat dari tahun **1997** s/d **sekarang** , adalah :

1. Administrasi Barang	63. Kursus B.Ingggris
2. Administrasi Kepegawaian	64. Kursus Dinas Staf
3. Administrasi Keuangan	65. Kursus Komputer
4. Analisis Jabatan	66. Kursus Manajemen Proyek
5. Analisis Kebutuhan Diklat.	67. Kursus Manajemen Koperasi
6. AKIP dan LAKIP	68. Kursus Pemasarakatan UU No.5/1974
7. Achievement Motivation Training	69. Kursus Pembinaan Orientasi Diklat
8. Audit Pembukuan dan Penghitungan APBD	70. Kursus Pendapatan Daerah
9. Analisis dan Evaluasi Kinerja	71. Kursus Galian C
10. Administrasi Pengelola Kegiatan dan Pelelangan	72. Komunikasi Konseling
11. Bahasa Inggris	73. Kompetensi Pembina LPM
12. Budaya Kerja	74. Kursus Program Diklat Apratur
13. Bendaharawan Barang	75. Kursus Legislatif
14. Bimtek Kepmendagri Nomor ..	76. Manajemen Kepegawaian
15. Kearsipan Nasional	77. Monitoring Evaluasi Program dan Proyek
16. Keprotokolan/ kehumasan	78. MOC.
17. Kewirausahaan	79. Manajemen Keuangan Daerah
18. Manajemen Kearsipan	80. Manajemen Pemerintahan
19. Manajemen Kepala SD	81. Manajemen Pemerintahan Desa
20. MDE	82. Manajemen Seminar Skill
21. P3KT.	83. Orientasi Amdal A
22. PDRB	84. Orientasi Analisis Kemampuan Aparatur Tk. II
23. Pelayanan Prima	85. Orientasi Bimbingan KKT, KKP dan PKL
24. Pembuatan Modul dan Perencanaan Program	86. Orientasi Gladi Manaj. Pemerintahan
25. Penelitian	87. Orientasi Kediklatan
26. Pengawasan Melekat	88. Orientasi Pendalaman Materi Tgs. Angg. DPRD II
27. Pengawasan Fungsional	89. Orientasi Teknis Pelaksanaan Diklat
28. Pengawasan Keuangan Daerah	90. Pembekalan PNS Gol. III
29. Pengawasan Operasional	91. Pembekalan STPDN
30. Pengelolaan Keuangan Daerah	92. Penataran Admin. Perkantoran
31. Penulisan Modul	93. Penataran Aparat Tenaga Perancang Per-UU-an
32. Penyusunan Kurikulum dan Silabi	94. Penataran Arsip In aktif
33. Penyusunan Perundang-undangan	95. Penataran B.Indonesia dan Penyul. B.Ingggris
34. Perencanaan	96. Penataran Kearsipan
35. Perpustakaan	97. Penataran Kepala Kelurahan
36. Pola Kerja Terpadu	98. Penataran O dan Manjemen
37. PPNS	99. Penataran Pejabat Pim Operasional
38. Purna Tugas	100. Penataran Pengemudi Kendar. Bermotor
39. Pengelolaan Terminal	101. Penataran Penghitungan PDRB
40. Pendapatan Daerah C	102. Penataran Penyusunan PDRB
41. PPNS Perikanan dan Kelautan	103. Penataran Peny. Telaahan Staf
42. Perencanaan Program dan Anggaran Kinerja	104. Penataran Perangkat Dati. II
43. Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional	105. Penataran Perangkat Kec. Bid. Perkotaan
44. Pengawasan Amdal	106. Penataran Polisi Pamong Praja
45. Penyebaran Polisi Kehutanan	107. Penataran Standar Audit Pemerintahan

46. Pengawas Sekolah	108. Penataran Kepala Dinas se Sumbar
47. Retikad Patda	109. Penyusunan Modul dan Program Bidang Pengelola Pasar.
48. Staf Paripurna	110. Pemegang Barang
49. Sosialisasi Diklat Pim III dan IV	111. Pengadaan Barang
50. Teknis Pertambangan	112. Pengelola dan Pengurus Barang
51. Teknis Bidang Pariwisata	113. Polisi Pamong Praja
52. TPTGR	114. PPAT/ Camat
53. TOT. Kewidyaiswaraan Tk. I	115. PTUN
54. TOT.PKT.	116. Sandi Dasar/ Operasional Komunikasi
55. Teknologi Pakan Ternak	117. SARLITA
56. Visi dan Misi	118. Sosialisasi UU No.22/99 dan 25/99
57. Gladi Manajemen Pemerintahan	119. Tata Naskah Dinas dan Telaahan Staf
58. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002	120. TOC.
59. Keppres Nomor 80 Tahun 2003	121. TOT Out Bond
60. Kursus Adm. Penulisan Laporan	122. TOT Umum
61. Kursus Amdal	123. TOT Kewidyaiswaraan Tk. Muda
62. Kursus bagi Kepala Perwakilan Kecamatan	124. TOT Khusus Diklat Pimpinan
	125. Workshop.

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor :065/ / Apt- 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALI SASTERA,S.H**  
NIP : 410010891  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Persyaratan Jabatan Biro Aparatur  
Setda. Propinsi Sumatera Barat

menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan Cek Kesehatan secara menyeluruh (General Chek – Up ) pada RSUD. M.Djamil Padang tanggal 28 Agustus 2007.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Agustus 2007

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI  
U.b.Kepala Biro Aparatur

**YUEN KARNOVA,SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410010354

**DARI :**  
**MUZIRWAN**  
**JALAN AIR CAMAR II**  
**NOMOR 15 A PADANG**  
**HP.08126622460**

**KEPADA :**  
**RUDI RINALDI / LENA**  
**JALAN R.A. KARTINI**  
**KELURAHAN CUBADAK AIR**  
**KOTO NAN GADANG**  
**PAYAKUMBUH UTARA**  
**HP.085263932147**

**DAFTAR : NAMA- NAMA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 PROPINSI SUMATERA BARAT PER 28 AGUSTUS 2007**

	<b>Nama Pejabat</b>	<b>Jabatan Unit Kerja</b>	<b>Nomor HP</b>	<b>Nomor Telpon</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
-	<b>H. GAMAWAN FAUZI,SH, MM</b>	GUBERNUR SUMBAR	0811661957	32020,31400
-	<b>PROF.Dr.H.MARLIS RAHMAN</b>	WAKIL GUBERNUR		31400,
-	<b>Drs.H. YOHANNES DAHLAN</b>	SEKRETARIS DAERAH PROPINSI	08126606855	31221
-	<b>Drs.H. ASRUL SYUKUR</b>	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN		31532
-	<b>Ir. H. SURYA DARMA SABIRIN</b>	ASISTEN II BIDANG PEMBANGUNAN		31835
-	<b>Drs.H.SULTANI WIRMAN</b>	ASISTEN III BIDANG KESOS		37211
-	<b>Drs.H.CHAIRUL DARWIS</b>	ASISTEN IV BIDANG ADMINISTRASI	081166	36409,36126
1	<b>Drs.H. ZAMBRI</b>	Kepala Biro Pemerintahan		31678,302,432
2	<b>Drs.SUHERMANTO RAZA,S.H,MM</b>	Kepala Biro Pemerintahan Nagari/ Kelurahan		34618/ 303,480



3	ERIZAL AGUS,S.H	Kepala Biro Hukum		31458,304.481
4	DEVI KURNIA,S.H	Kepala Biro Humas		31549,305,486
5	AFRIADI LAUDDIN,SE,M.Si.	Kepala Biro Perekonomian		34060,306,448
6	IR.MUDRIKA	Kepala Biro Pembangunan		28522,307,467
7	AFRIZALTY,S.H	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan		29674,206,432
8	Drs.KAFRAWI BACHTIAR	Kepala Biro Sospora		26433,308,458
9	Drs.ALWIS	Kepala Biro Umum		34425,310
10	ZULHILMAN BASYIR,SE	Plt.Kepala Biro Keuangan		35995,312,446
11	Drs.AMRIL SAIBI,MDM.	Plt.Kepala Biro Perlengkapan		33985,311,450
12	YUEN KARNOVA,SE	Kepala Biro Aparatur	0811668464	37687,457
	<b><u>Dinas Daerah:</u></b>		<b><u>Wakil KA.DINAS</u></b>	
13	Ir.H.SYAHRIAL SYAM,MS	Kepala Dinas Kehutanan	Drs.ASRIZAL ASNAN,MM	
14	Ir.H.DODY RUSWANDI,M.Sc.	Kepala Dinas Prasarana Jalan	kosong	
15	Ir.H.ZAINAL SALEH, Dip.HE	Kepala Dinas PSDA	kosong	
16	Drs.H.ALIMAN SALIM	Kepala Dinas Perhubungan	H.AKMAL,SH	
17	Ir.YOSMERI	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Drs.H.MIRWAN PULUNGAN,M.Pd	
18	Ir.JONNI	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holti.	kosong	
19	Ir.H.MASRUL ZEIN	Kepala Dinas Perkebunan	Ir. IRZAN BUSRAYAN,MM	
20	Dr.Ir.JAMES HELLIWARD,MS	Kepala Dinas Parsenibud.	Ir. FAJARUDDIN	
21	dr. Hj.ROSNINI SAVITRI,M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	kosong	
22	Drs.H. MUCHSIS MALIK	Kepala Dinas Sosial	Drs.ACHMAD KHARISMA	
23	Ir.OYONG ANDAR - WARNERI,M.Eng.Sc	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi	Drs.SYAFRUDDIN DARAB	
24	Drs.H. SINANG SUBEKTI	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	DEDEK NUZUL PUTRA,SH	
25	Ir.BUSHARMAIDI,MS.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	kosong	
26	Ir.H.SJAMSUIR BURHAN	Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	kosong	
27	Drs.H.BURHASMAN BUR,MM	Kepala Dinas Pendidikan	kosong	
28	ZUL EVI ASTAR,SH	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	H.DARYONO,SH	
29	Ir. EDWARDI,MM	Kepala Dinas Peternakan	Ir.H.EDI ARADIAL	
30	Drs.SYAFRIAL.S	Kepala Dinas Koperasi dan PKM	FACHRIL MURAD,S.H	
	<b><u>BADAN/ KANTOR :</u></b>		<b><u>Nomor Telpon Kantor</u></b>	
31	Dr.H. BAMBANG ISTIJONO, ME	Kepala Bappeda	55627	
32	JAYADISMAN,SH	Kepala Bawasda	31961,31851	
33	DR.Ir.RAHMAT SYAHNI,MS	Kepala Badan Diklat Propinsi	72370,71860	
34	Drs.H.ARIZALLIDJAR.M,M.Si	Kepala BKPPMD	51432	
35	H.SYOFYAN,S.H.	Kepala Badan Kesbang Linmas	3422,34475	
36	IR.HARMENSYAH, Dipl.Eng.	Kepala Bapedalda	27073	
37	IRVAN KHAIRUL ANANDA, SE	Kepala BPM	58279,442273	
38	EKA NUZLA,S.H.	Kepala Badan Arsip	40371	
39	Ir.H.SUHADRI EMHA	Kepala B.2 K.P.	7054505	
40	Drs.H.O.S.YERLY ASIR	Kepala Badan Perpustakaan	35646	
41	DRS.H.YENIFRA	Kepala Balitbang		

42	H.BUSRA,SH	Kepala BKD	7054804	
43	DRS.H. YUMLER LAHAR	Kepala Satpol Pamong Praja	27206	
44	Drs.ALWIS	Kantor Penghubung Pemprop. di Jakarta	021-8085889	
45	DRS.NASRAL ANAS	Sekretaris DPRD Propinsi		

Padang, 10 Oktober 2007

Kepada :

Yth.**Bapak Gubernur Sumatera Barat**  
di -  
Padang

Nomor : 065/ / Apt-2007

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat,

- Dari : Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat
- Tentang : Pedoman Penilaian Kompetensi Jabatan dan Calon Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat
- Catatan : Untuk menentukan kemampuan Calon Pejabat Struktural eselon II,III, dan III perlu ditetapkan pedoman Kompetensi jabatan, yakni berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas jabatannya.
- Lampiran : 2 ( dua ) rangkap draft Peraturan Gubernur.
- Untuk mohon tanda -  
tangan atas : Draft Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Jabatan dan Calon Pejabat Struktural Eselon II,III dan IV di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat , yang telah dikoreksi dan diteliti oleh Biro Hukum.

SEKRETARIS DAERAH

**Drs.H. YOHANNES DAHLAN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003662

**DISPOSISI PIMPINAN :**

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Wakil Gubernur  
Dari : Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat  
Tanggal : 27 September 2007  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Nomor : 065/ /Apt-2007  
Perihal : **Konsultasi Penyusunan Kompetensi Jabatan di Jakarta**

---

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak hal-hal, sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kegiatan dalam DPA Biro Aparatur terdapat kegiatan Penyusunan Kompetensi Jabatan . Kegiatan tersebut berupa penyusunan Kompetensi Jabatan dan Calon Pejabat Struktural Eselon II,III dan IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
2. Kegiatan tersebut di atas telah dilakukan dengan penyusunan konsep dan draft Peraturan Gubernur Sumbar tentang Kompetensi Jabatan dan Calon Pejabat Struktural Eselon II,III dan IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Bapak untuk dapat menugaskan Pejabat/ Pegawai dari Biro Aparatur , sebagai berikut:
  - Nama : **Dra. Zulida Rivai**
  - Pangkat/ Jabatan : Penata Tk.I ( III/d )
  - Jabatan : Kasubag. Analisis Jabatan Biro Aparatur

untuk melakukan Konsultasi Penyusunan Kompetensi ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta selama 3 ( tiga ) dari mulai tanggal 2 s/d 4 Oktober 2007.

Biaya Perjalanan Dinas ini dibebankan pada Dokumen Pengelola Anggaran (DPA) Biro Aparatur Setda Tahun 2007, Kegiatan Penyusunan Kompetensi Jabatan Rekening Nomor 1.20.1.20.03.28.19.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan Bapak. Terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

**Drs.H. YOHANNES DAHLAN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003662

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Asisten Administrasi  
Dari : Kepala Biro Aparatur  
Tanggal : 18 September 2007  
Lampiran : 1 (satu) SPT  
Sifat : Segera  
Nomor : 065/ /Apt-2006  
Perihal : **Peserta Tim Ramadhan Propinsi Sumatera Barat**

---

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 46-331-2007 tanggal 4 September 2007 tentang Pembentukan Tim Ramadhan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007, dengan ini ditugaskan Pejabat/Pegawai dari Biro Aparatur, sebagai berikut :

1. **Armen,BA**, Pembina Tk. I (IV/b), Kabag. Anjab, Forjab dan Persyaratan Jabatan
2. **Dra. Zulida Rivai**, Penata Tk. I ( III/d), Kasubag. Analisis Jabatan

untuk mengikuti rombongan Tim Ramadhan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 s/d 19 September 2007 yang berlokasi di Masjid BABUSALAM, Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Biaya Perjalanan Dinas ini dibebankan pada Dokumen Pengelola Anggaran (DPA) Biro Aparatur Setda. Tahun 2007.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan Bapak. Terima kasih.

KEPALA BIRO APARATUR

**YUEN KARNOVA, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP.410010354

**SEKRETARIS DAERAH**

Demikian disampaikan, mohon persetujuan dan pertimbangan Bapak. Terima kasih.

**KEPALA BIRO APARATUR**

**YUEN KARNOVA, SE**

Pembina Utama Muda  
NIP. 410010354

## **VISI DAN MISI**

1. **Visi** adalah pandangan ke depan dan arah tujuan yang ingin diwujudkan.
2. **Misi** adalah tugas yang diemban untuk mencapai sasaran – sasaran pokok/ strategis dan tujuan organisasi tertentu.
3. **Konsistensi** adalah ketetapan, kesesuaian, ketaatan dan kemantapan dalam bertindak sesuai dengan visi, misi, janji, prinsip, amanah, kebijakan atau aturan yang ditetapkan (*taat azas*).
4. **Komitmen** adalah keteguhan hati, tekad yang mantap dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini.





# **EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL**

## **I. Ditunjuk dari Sisi Pemegang Jabatan Fungsional**

### **A. Pengembangan Kepegawaian**

- (1) Akan diketahui Peningkatan SDM Aparatur Pemegang jabatan Fungsional dari tahun ke tahun.
- (2) Akan diketahui penugasan yang diberikan kepada Pemegang Jafung.
- (3) Akan diketahui aktifitas kerja jafung.
- (4) Akan
- (5) Akan diketahui
- (6) Akan diketahui
- (7) Akan diketahui
- (8) Akan diketahui
- (9) Akan diketahui
- (10) Akan diketahui
- (11) Akan diketahui
- (12) Akan diketahui
- (13) Akan diketahui
- (14) Akan diketahui
- (15) Akan diketahui
- (16) Akan diketahui
- (17) Akan diketahui
- (18) Akan diketahui

## **II. Ditinjau dari Manajemen Kepegawaian**

### **A. Pengembangan Kepegawaian**

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD TAHUN  
ANGGARAN 2007  
BAGIAN ANALISIS JABATAN, FORMASI JABATAN DAN  
PERSYARATAN JABATAN BIRO APARATUR**

**1. *Penyusunan Buku Informasi Jabatan* :**

Anggaran tersedia Rp. 178.578.000,-. Mata anggaran  
1.29.1.20.03.28.18

Uang lembur PNS mengoreksi hasil anjab, tupoksi, forjab dan jafung  
: Rp. 11.000.000,-

Uang lembur non : PNS 1.220.000,-

Biaya perjalanan dinas dalam Propinsi Rp. 37.350.000,-

2. **Penyusunan Kompetensi Jabatan** , Anggaran tersedia  
Rp. 60.408.000,- Mata anggaran 1.20.1.20.03.28.19,  
Uang lembur PNS : Rp. 4.000.000,-  
Non PNS : Rp. 660.000,-  
Belanja BBM ke Bukittinggi : Rp. 900.000,-

3. **Penyusunan Pola Kinerja Perorangan PNS**

Mata anggaran 1.20.1.20.03.28.20 ,  
Anggaran Rp. 45.475.000,-  
Uang lembur PNS Rp. 4.300.000,-  
Non PNS : Rp. 400.000,-  
Belanja Penunjang Kegiatan, BBM : Rp. 450.000,-

## **PEREKONOMIAN INDONESIA MEMBAIK.**

Desakan kuat untuk agar merombak Tim Ekonomi semakin kuat, karena mereka dinilai gagal dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Indikator kegagalan ini ditandainya dengan berkuatnya dolar US di kisaran Rp. 9.000,- per dolar. Angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang terus bertambah.

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat  
Dari : Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat  
Tanggal : 19 Februari 2007

Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Nomor : 065/ /Apt-2007  
Perihal : **Mohon persetujuan rancangan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Daerah .**

---

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan motivasi PNS, perlu diberikan tunjangan terhadap jabatan yang beresiko, baik resiko fisik maupun resiko non fisik dengan memperhatikan aspek tanggung jawab, ancaman, resiko, godaan dan suasana kerja. Sehingga dengan pemberian tunjangan daerah kepada PNS Fungsional Umum tersebut untuk meningkatkan semangat kerja dan memberikan rasa keadilan dalam menerima upah kerja.

Kriteria pemberian tunjangan daerah tersebut berdasarkan atas beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, serta tempat bertugas. Di samping itu juga didasarkan atas kriteria khusus yang diberikan kepada PNS yang berprestasi yang ditetapkan oleh Tim Penilai Prestasi PNS di lingkungan Propinsi.

Menindaklanjuti rapat dengan DPRD Propinsi Sumatera Barat tanggal 13 Desember 2006 lalu, perlu dilakukan pembahasan lanjutan dengan DPRD untuk penetapan tunjangan daerah .

Sehubungan dengan hal tersebut diminta persetujuan Bapak terhadap rancangan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Daerah, sebagaimana terlampir.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA BARAT**

**Drs.H. YOHANNES DAHLAN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003662

YANG KE 39

**1 SEPTEMBER 1968**

**1 SEPTEMBER 2007**

## **DARI : SUAMI**

### **HARI RAYA IDUL ADHA**

Hari raya Idul adha kemarin jatuh pada hari Jum'at, dan dirayakan secara meriah oleh umat Islam se dunia. Idul adha disebut juga dengan Idul Qurban, karena memperingati pengorban Nabi Ibrahim a.s. bersama anaknya Ibrahim .Setiap hari Raya Idul Adha ini umat Islam se dunia berkumpul di Mecca Al Mukaramah untuk menunaikan rukun iman ke 5, yakni naik haji ke tanah suci bagi orang yang mampu

Kisah pengorbanan nabi Ibrahim a.s. bersama dengan anaknya Ismail dimulai waktu Ibrahim mendapat mimpi 3 kali berturut-turut. Dalam mimpinya, Ibrahim menyembelih anaknya Ismail yang merupakan anak satu-satunya yang tersayang. Setelah dikonfirmasi mimpi esoknya pada Ibrahim, mereka sepakat untuk menyembelih Ibrahim. Begitu juga Ibunya, Siti Sarah, tidak berkeberatan karena mereka merasa ini adalah ujian dari Allah SWT.

Pada waktu menuju lokasi penyembelihan, mereka digoda syetan agar jangan menyembelih Ismail, lalu mereka melempar Syetan itu. Maka kemudian berlangsunglah ritual penyembelihan yang monumental itu.

Namun Allah SWT. berkehendak lain, nabi Ismail tidak jadi meninggal dunia, dia digantikan seekor kambing besar. Peristiwa inilah yang menjadi latar belakang hari raya Idul Adha , yang setiap tahun diperingati.

Note : masukkan Past Ten, Pas Continius Tenses, Pas Perfect Tense,  
Simple Present Ten, Simple Continuos Tense, dan Future Tense

Padang, 6 Juli 2007

Kepada :

3. Yth. Bapak/ Sdr. ....  
**Pembahas** Tim Penyusunan Pola Kinerja PNS
4. Sdr. ....  
**Penyusun** Tim Penyusunan Pola Kinerja PNS  
di -  
Padang

## **SURAT PENGANTAR**

Nomor : 065/ / Apt-2007

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Ket.
-	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/250/Apt-2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pola Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat	1 ( satu) eksamplar	Untuk dilaksanakan sesuai SK.

**a.n. Sekretaris Daerah**  
**Asisten Administrasi**  
**u.b.**

**NOTA DINAS**



Kepada : Sdr. Kepala Biro Umum  
Dari : Kepala Biro Aparatur  
Tanggal : 27 Juni 2007  
Sifat : Segera  
Nomor : 065/ /Apt-2007  
Perihal : **Peminjaman Ruang Rapat Sekda**

---

Sehubungan dengan Kunjungan dan komparasi Tim Biro Organisasi Setda. Propinsi Banten di Sumbar dari tanggal 28 s/d 29 Juli 2007, yang akan menyampaikan ekspose program analisis jabatan di Sumatera Barat , bersama ini kami mengharapkan bantuan Sdr. untuk dapat meminjamkan Ruang Rapat Sekda pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2007 mulai pukul 13.00 WIB.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Biro Aparatur**

**YUEN KARNOVA,SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410010354

Dalam rangka meningkatkan motivasi PNS, perlu diberikan tunjangan terhadap jabatan yang beresiko, baik resiko fisik maupun resiko non fisik dengan memperhatikan aspek tanggung jawab, ancaman, resiko, godaan dan suasana kerja. Sehingga dengan

pemberian tunjangan daerah kepada PNS Fungsional Umum tersebut untuk meningkatkan semangat kerja dan memberikan rasa keadilan dalam menerima upah kerja.

Kriteria pemberian tunjangan daerah tersebut berdasarkan atas beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, serta tempat bertugas. Di samping itu juga didasarkan atas kriteria khusus yang diberikan kepada PNS yang berprestasi yang ditetapkan oleh Tim Penilai Prestasi PNS di lingkungan Propinsi.

Menindaklanjuti rapat dengan DPRD Propinsi Sumatera Barat tanggal 13 Desember 2006 lalu, perlu dilakukan pembahasan lanjutan dengan DPRD untuk penetapan tunjangan daerah .

Sehubungan dengan hal tersebut diminta persetujuan Bapak terhadap rancangan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Daerah, sebagaimana terlampir.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA BARAT**

**Drs.H. YOHANNES DAHLAN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003662

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Nomor / Print/GSB-2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang permintaan Peserta Pengukuran Dampak Spesifik dari Program Partnership for Governance Reform in Indonesia yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 s/d 18 Oktober 2006 di Hotel Santika Yogyakarta, dengan ini disampaikan kepada Bapak bahwa Pegawai yang ditugaskan adalah ARMEN, BA, jabatan Kepala Bagian Analisis Jabatan, Formasi Jabatan dan Persyaratan Jabatan Biro Aparatur.

Mengingat bahwa pembiayaan yang ditanggung oleh Pihak Partnership hanyalah berupa transpor dan akomodasi, dengan ini kami mohon bantuan Bapak, kiranya kepada yang bersangkutan diberikan bantuan Uang saku dan biaya penginapan dengan rincian, sebagai berikut :

- |                            |                   |                               |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| a. Uang saku selama 4 hari | 4 x Rp. 300.000,- | = Rp.1.200.000,-              |
| b. Biaya penginapan 2 hari | 2 x Rp. 300.000   | = <u>Rp. 600.000,-</u>        |
|                            | Jumlah :          | .....= Rp. <b>1.800.000,-</b> |

Terbilang : ( *Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah* )

Demikian disampaikan, mohon persetujuan dan pertimbangan Bapak. Terima kasih.

KEPALA BIRO APARATUR

**YUEN KARNOVA, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410010354

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat  
Dari : Kepala Biro Aparatur  
Tanggal : 16 Agustus 2007  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Nomor : 065/ /Apt-2006  
Perihal :

---

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Nomor / Print/GSB-2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang permintaan serta Pengukuran Dampak Spesifik dari Program Partnership for Governance Reform in Indonesia di yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 s/d 18 Oktober 2006 di Hotel Santika Yogyakarta, dengan ini disampaikan kepada Bapak bahwa Pegawai yang ditugaskan adalah Sdr.ARMEN, BA , Kepala Bagian Analisis Jabatan, Formasi Jabatan dan Persyaratan Jabatan Biro Aparatur

Untuk kelancaran Pengukuran tersebut, diharapkan bantuan biaya untuk kontribusi sebesar Rp. 1.800.000,- ( Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )

Demikian disampaikan, mohon persetujuan dan pertimbangan Bapak. Terima kasih.

**KEPALA BIRO APARATUR**

**YUEN KARNOVA, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410010354

## **TANDA TERIMA**

---

Sudah terima dari Biro Aparatur Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Tunjangan Daerah  
Sebanyak 65 ( Enam puluh lima ) Buku

Padang, 27 Februari 2007

Yang Menerima

( \_\_\_\_\_ )  
Nip.

**RUPIAH DIPERDAGANGKAN PADA  
RP. 8.880,- NAIK RP. 95 POIN ( 7/5/2007 )**

**IHSG . BERADA PADA 2.037,041**

## **TANDA TERIMA**

---

Sudah terima dari Biro Aparatur :

1. Ranperda SOTK Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD sebanyak 70  
Tujuh Puluh ) Buku
2. Ranperda SOTK Dinas Daerah sebanyak 70 (Tujuh Puluh ) Buku
3. Ranperda SOTK Badan,Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja Sebanyak 70 ( Tujuh  
Puluh ) Buku
4. Nota Penjelasan Gubernur sebanyak 70 ( Tujuh Puluh ) Buku

Padang, 26 Februari 2007

Yang Menerima

( \_\_\_\_\_ )  
Nip.

Padang, 27 Juni 2007

Nomor : 065/ / Apt-2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth :

3. Sdr. Kepala BKD. Prop. Sumbar
  4. Sdr. Kepala Badan Diklat Prop. Sumbar
  5. Sdr. Kepala Biro Hukum dan HAM
  6. Sdr. Kepala Biro Keuangan
  7. Sdr. Sekretaris KORPRI Prop. Sumbar
- di

**Padang**

Dalam rangka menyambut kedatangan Kunjungan Kerja Biro Organisasi Pemerintah Propinsi Banten , bersama ini diminta kehadiran Saudara hadir pada :

Hari / tanggal : **Kamis** / 28 Juli 2007  
Waktu : Pukul 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Sekda. ( Lantai II )  
Acara : Kunjungan dan Komparasi Tim Biro Organisasi Setda.  
Propinsi Banten di Prop. Sumbar

Demikian disampaikan, atas kehadiran Sdr. diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI  
U.b. **Kepala Biro Aparatur**

**YUEN KARNOVA,SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410010354

SEKRETARIS DAERAH

**Drs.H. YOHANNES DAHLAN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003662

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat  
Dari : Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat  
Tanggal : 13 Oktober 2006  
Lampiran : 1(satu ) ekspl.  
Sifat : Segera  
Nomor : 065/ /Apt-2006  
Perihal : **Pengukuran Dampak Spesifik dari Program yang telah dijalankan oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia**

---

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

3. Sehubungan dengan Surat dari Senior Program Manager Partnership Governance Reform in Indonesia Nomor 711/CSR/Sep/2006 tanggal 29 September 2006 perihal sebagaimana tersebut di atas( terlampir ), bersama ini disampaikan kepada Bapak untuk dapat menugaskan Sdr. **ARMEN, BA** , pangkat Pembina Tk. I , jabatan Kepala Bagian Anjab, Forjab dan Persy.jabatan Biro Aparatur.

untuk dapat mengikuti Acara Workshop dan Diskusi tentang Pengukuran Dampak Spesifik dari Program yang telah dijalankan oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia, pada :

Hari / tanggal : Senin s/d Rabu , tanggal 16 s/ 18 Oktober 2006  
Waktu : Pukul 08.30 s/d 17.30 WIB  
Tempat : Ruang Jatinom Hotel Santika Yogyakarta  
Acara : - *Workshop* pada tanggal 16 Oktober 2006  
- *Focus Group Discussion Impact Assessment of EU's contribution to Partnership's CSR Project* pada tanggal 17 Oktober 2006 .

4. Sekiranya Bapak setuju, saya akan menanda tangani Surat Perintah Tugas dan SPPD terlampir.
5. Demikian disampaikan, atas berkenan dari Bapak disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

Drs.H. YOHANNES DAHLAN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003662



## **SURAT TUGAS**

Nomor : / Print/ GSB- 2006

**DASAR** : Memorandum of Understanding tentang Kerjasama Kemitraan dalam rangka Penciptaan Tata Kelola Yang baik antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia .

### **MENUGASKAN :**

**KEPADA** : **Drs. H. Yohannes Dahlan**, pangkat Pembina Utama Madya , Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat.

**UNTUK** : Mengikuti acara Pengukuran Dampak Spesifikasi dari Program yang telah dijalankan oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia , selama 3 (tiga) hari yang bertempat di Hotel Santika Yogyakarta.

**PEMBIAYAAN:** Dibebankan kepada Anggaran Proyek Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH**

Drs.H. YOHANNES DAHLAN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003662

## **SURAT TUGAS**

Nomor : / Print/ GSB- 2006

**DASAR** : Memorandum of Understanding tentang Kerjasama Kemitraan dalam rangka Penciptaan Tata Kelola Yang baik antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia .

### **MENUGASKAN :**

**KEPADA** : ARMEN, BA , Pembina Tk. I ( IV/b ), Kabag.Anjab, Forjab dan Persyaratan Jabatan

**UNTUK** : Mengikuti acara Pengukuran Dampak Spesifikasi dari Program yang telah dijalankan oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia , selama 3 (tiga) hari yang bertempat di Hotel Santika Yogyakarta.

**PEMBIAYAAN:** Dibebankan kepada Anggaran Proyek Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs.H. YOHANNES DAHLAN**

Pembina Utama Madya

NIP. 410003662

2. ARMEN, BA , Pembina Tk. I ( IV/b ), Kabag.Anjab, Forjab dan Persyaratan Jabatan

Pemimpin Proyek,

**Drs.H. YOHANNES DAHLAN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003662

**4. Penyusunan Pola Kinerja Perorangan PNS**

Mata anggaran 1.20.1.20.03.28.20 ,

Anggaran Rp. 45.475.000,-

Uang lembur PNS Rp. 4.300.000,-

Non PNS : Rp. 400.000,-

Belanja Penunjang Kegiatan, BBM : Rp. 450.000,-

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat  
Dari : Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat  
Tanggal : Oktober 2006  
Lampiran : 1(satu ) ekspl.  
Sifat : Segera  
Nomor : 065/ /Apt-2006  
Perihal : **Pengukuran Dampak Spesifik dari Program yang telah dijalankan oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia**

---

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Surat dari Senior Program Manager Partnership Governance Reform in Indonesia Nomor 711/CSR/Sep/2006 tanggal 29 September 2006 perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini ditugaskan Pejabat dari Biro Aparatur , sebagai berikut :
  - Nama : ARMEN, BA
  - Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I( IV/b)
  - NIP. : 160016652
  - Jabatan : Kabag.
2. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Partnership Governance Reform in Indonesia dalam Program Perwujudan Reformasi Birokrasi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, diawali dengan kegiatan Seleksi dan Pembentukan SOTK yang akan dilaksanakan oleh Tim Eksternal.
3. Tim Eksternal berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
  - 2 (dua) orang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam Negeri ( telah disurati oleh Pemimpin Kegiatan dengan Surat Nomor 065/800/Apt-2006 tanggal 31 Mei 2006.
  - 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah yang aktif dalam penyusunan rancangan SOTK , yaitu Sdr. :
    - 1). Drs.H.Yohannes Dahlan
    - 2). Yuen Karnova,SE

- 5 (lima) Tim dari Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat dan Pamong senior, yaitu Sdr :
  - 1). Prof.Dr.Elfindri
  - 2). Prof.Dr.Helmi,M.Sc.
  - 3). Prof.Dr.Syamsul Amar
  - 4). Saldi Isra,SH,MPA
  - 5). Drs.H.Rusdi Lubis
  
- 4. Kalau Bapak menyetujui usulan Personil tersebut di atas, akan kami tanda tangani Surat Permintaan Personil Tim Eksternal Penilaian Draft SOTK Prop. Sumbar (terlampir).  
Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

Drs.H. SULTANI WIRMAN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003660

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat  
Dari : Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat  
Tanggal : 12 Oktober 2006  
Lampiran : 1(satu ) ekspl.  
Sifat : Segera  
Nomor : 065/ /Apt-2006  
Perihal : **Pengukuran Dampak Spesifik dari Program yang telah dijalankan oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia**

---

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

6. Sehubungan dengan Surat dari Senior Program Manager Partnership Governance Reform in Indonesia Nomor 711/CSR/Sep/2006 tanggal 29 September 2006 perihal sebagaimana tersebut di atas( terlampir ), bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa Acara dimaksud akan diikuti oleh Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat, pada :

Hari / tanggal : Senin dan Selasa, tanggal 16 s/ 17 Oktober 2006  
Waktu : Pukul 08.30 s/d 17.30 WIB  
Tempat : Ruang Jatinom Hotel Santika Yogyakarta  
Acara : - *Workshop* pada tanggal 16 Oktober 2006  
- *Focus Group Discussion Impact Assessment of EU's contribution to Partnership's CSR Project* pada tanggal 17 Oktober 2006 .

7. Sekiranya Bapak setuju saya akan menanda tangani Surat Perintah Tugas dan SPPD terlampir.
8. Demikian disampaikan, atas berkenan dari Bapak disampaikan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. H. YOHANNES DAHLAN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 4100003662

Drs.H. SULTANI WIRMAN  
Pembina Utama Madya

**PARA PIMPINAN KOMISI DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KOMISI I :**

**Ketua** : H. DJANAS RADEN DT. BANDARO KUNING,S.H  
( F.PDI PERJUANGAN )

**WAKIL**

**Ketua** : ERIZAL EFFENDI,S.H ( F.PAN )

**Sekretaris** : H. AMORA LUBIS,S.Sos.I ( F.PPP)

**MITRA KERJA :**

1. Biro Hukum
2. Biro Aparatur
3. Biro Pemerintahan
4. Biro Perlengkapan
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat
6. Badan Diklat Propinsi
7. BKD
8. Badan Arsip Propinsi
9. Badan Kesbang dan Linmas
10. Kantor Penghubung Pemda di Jakarta

**KOMISI II**

**Ketua** : HILMAN SYARIFUDDIN,SE ( F.PBB)  
**Wakil Ketua** : MURDANI,SE,MM ( F.BINTANG DEMOKRAT)  
**Sekretaris** : ELDI SUTRISNO DT.INTAN BATUAH  
( F. BINTANG DEMOKRAT )

**Mitra Kerja** : -

1. Biro Perlengkapan / aset daerah
2. Biro Keuangan



3. Biro Perekonomian
4. Dinas Perkebunan
5. Dinas Pendapatan
6. Dinas Kehutanan
7. Diperta dan Holtikultura
8. Dinas Perindag
9. Dinas Koperasi dan PKM
10. BKPPMD
11. Bawasda
12. BANK NAGARI, ASKRIDA, ATS dan PT.PP Sumbar

**KOMISI III :**

**Ketua** : TASLIM,S.Si ( F.PAN )  
**WKL.KETUA** : AHMAD SIDDIQ,SP ( F. PKS)  
**Sekretaris** : ERIAL M. SYAH, SH ( F.PDI PERJUANGAN)

**Mitra Kerja :**

1. Dinas PSDA
2. Dinas Prasarana Jalan
3. Dinas Pertambangan dan Energi
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. BPM
6. Bapedalda
7. Bappeda
8. Biro Pembangunan
9. Dinas Perhubungan

**KOMISI IV.**

**Ketua** : DRS.IRDINANSYAH TARMIZI (F.GOLKAR)  
**Wkl.Ketua** : ERWINA SIKUMBANG ,S.Sos ( F.PDI Perj.)  
**Sekretaris** : SYAFRIL A.HADI,S.Pd. ( F.BINTANG DEMOKRAT )

1. Biro Sospora
2. Dinas Sosial
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Parsenibud.
5. Balitbang
6. Badan Perpustakaan Daerah
7. RSUD. Dr. H. Achmad Moechtar Bukittinggi
8. RSUD Solok
9. RSUD. Pariaman
10. RSJ.Prof.H.B.SAANIN
11. Kanwil Depag.

DPRD SUMBAR  
 Telpon 7057591

**TATA TERTIB DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KOMISI I**

**Ketua : JANAS RADEN,SH**

**Sekretaris : RAFDINAL,S.H**

**MITRA KERJA :**

- 11.Biro Hukum
- 12.Biro Aparatur
- 13.Biro Pemerintahan
- 14.Biro Perlengkapan
- 15.Badan Pemberdayaan Masyarakat
- 16.Badan Diklat Propinsi
- 17.BKD
- 18.Badan Arsip Propinsi
- 19.Badan Kesbang dan Linmas
- 20.Kantor Penghubung Pemda di Jakarta

**KOMISI II**

**Ketua : TASLIM, S.Si,Apt.**

**Wakil Ketua : SULTANI,S.Si**

**Sekretaris : MURDANI,SE.MM**

**Mitra Kerja : -**

- 13.Biro Perlengkapan / aset daerah
- 14.Biro Keuangan
- 15.Biro Perekonomian
- 16.Dinas Perkebunan

- 17.Dinas Pendapatan
- 18.Dinas Kehutanan
- 19.Diperta dan Holtikultura
- 20.Dinas Perindag
- 21.Dinas Koperasi dan PKM
- 22.BKPPMD
- 23.Bawasda
- 24.BANK NAGARI, ASKRIDA, ATS dan PT.PP Sumbar

**KOMISI III :**

**Ketua : TASLIM,S.Si.**  
**Sekretaris : AHMAD SIDIK,SP**

**Mitra Kerja :**

- 10.Dinas PSDA
- 11.Dinas Prasarana Jalan
- 12.Dinas Pertambangan dan Energi
- 13.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 14.BPM
- 15.Bapedalda
- 16.Bappeda
- 17.Biro Pembangunan
- 18.Dinas Perhubungan

**KOMISI IV.**

**Ketua : RIZAL MOENIR**  
**Sekretaris : MUSLIM M.YATIM,Lc.**

- 12.Biro Sospora**
- 13.Dinas Sosial**
- 14.Dinas Kesehatan**
- 15.Dinas Pansenibud.**
- 16.Balitbang**
- 17.Badan Perpustakaan Daerah**
- 18.RSUD. Dr. H. Achmad Moechtar Bukittinggi**
- 19.RSUD Solok**
- 20.RSUD. Pariaman**
- 21.RSJ.Prof.H.B.SAANIN**

**22.Kanwil Depag.**

DPRD SUMBAR  
Telpon 7057591

**Muzirwan, S.H**  
Sekretaris Masjid Al Kautsar  
Periode Tahun 2005 – 2008  
*HP. 08126622460*  
*Jalan Air Camar II No.15 A*

**Muzirwan, S.H**  
Sekretaris Masjid Al Kautsar  
Periode Tahun 2005 – 2008  
*HP. 08126622460*  
*Jalan Air Camar II No.15 A*

**Muzirwan, S.H**  
Sekretaris Masjid Al Kautsar  
Periode Tahun 2005 – 2008  
*HP. 08126622460*  
*Jalan Air Camar II No.15 A*

**Muzirwan, S.H**  
Sekretaris Masjid Al Kautsar  
Periode Tahun 2005 – 2008  
*HP. 08126622460*  
*Jalan Air Camar II No.15 A*

**Muzirwan, S.H**  
Sekretaris Masjid Al Kautsar  
Periode Tahun 2005 – 2008  
*HP. 08126622460*  
*Jalan Air Camar II No.15 A*

**Muzirwan, S.H**

Sekretaris Masjid Al Kautsar

Periode Tahun 2005 – 2008 (semenjak 1 April 1999 )

HP. 08126622460, Flexi : 07517849108

Jalan Air Camar II No.15 A Padang**PERINCIAN GAJI BULAN JUNI TAHUN 2007**

Nama : MUZIRWAN, SH  
NIP : 050067939  
Pangkat/Gol : III/c  
Masa kerja : 10 tahun , 1 tahun ( ditambah Peninjauan Masa Kerja selama 3,5 tahun )

**I . Gaji berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2007**

1	Rp. 1.494.800,-	:	Gaji Pokok
2	Rp. 149.480,-	:	Tunjangan 10 % Istri
3	Rp. 29.896,-	:	Tunjangan Anak
			<b>Jumlah .....</b> :
4	Rp. 1.674.176,- ( Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah )		

**II . Gaji berdasarkan Tunjangan – tunjangan :**

1	Rp. 1.674.176,-	:	Gaji Brutto
2	Rp. 185.000,-	:	Tunjangan Fungsional Umum ( Tunjangan Perbaikan Penghasilan )
3	Rp. 115.440,-	:	Tunjangan Beras (30 Kg.)
4	Rp. 49.633,-	:	Tunjangan Pajak
4	Rp. <b>2.024.250,-</b> ( Dua Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah ) <b><u>Gaji Brutto</u></b>		

**III . Gaji berdasarkan Potongan - Potongan :**

No	Jumlah	:	Jenis pemotongan
1	Rp. 167.417,-	:	Iuran Wajib Pegawai 10 %
2	Rp. 49.633,-	:	PPh.

3	Rp. 7.000,-	:	Pemotongan Taperum
-	Rp. 216.109,-	:	( Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Sembilan Rupiah )
-	Rp. 1.800.200,-	:	( Satu Juta Delapan Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah )
	Rp. 213.200,-	:	<i>Pemotongan KPR BTN Perumahan Sopo Inanta Blok H Nomor 5 Lubuk Buaya</i>
	<b>Rp. 1.587.000,-</b>	:	<b>SATU JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH</b> —————→ <i>Gaji Netto pada ATM Bank Nagari</i>

**Muzirwan, S.H**  
Sekretaris Masjid Al Kautsar  
Periode Tahun 2005 – 2008  
HP. 08126622460  
Jalan Air Camar II No.15 A

Biaya pengurusan Tanah Surat Ukur / Peta Bidang Nomor 0435 tanggal 12 September 2006 a.n. ASMA ISMAEL , Jalan Air Camar II Nomor 4 A Pdg.

Luas tanah = 179 m<sup>2</sup>  
Transaksi Jual beli sebesar = Rp. 13.000.000,-  
Biaya Surat / Dokumen Tanah = Rp. 2.000.000,-  
Biaya Akta Jual Beli dan  
Biaya Balik Nama = Rp. 1.271.000,-  
Total ..... = **Rp.16.271.000,-**

Rincian biaya dokumen :

1. Biaya pendaftaran tanah / pakai faktur	: Rp. 661.500,-
2. Biaya Notaris pada Indra Jaya,S.H	: 350.000,-
3. Biaya Panitia A	: 350.000,-
4. Biaya transpor Juru Ukur	: 150.000,-
5. Biaya penempelan s/d Sertifikat terbit	: 450.000,-
6. Biaya AJB dan Balik Nama	: 1.271.000,-
7. Biaya administrasi surat – surat jual beli di bawah tangan	: <u>39.500,-</u>
Total .....	: <b>Rp.3.271.000,-</b>

Padang, 30 Juni 2006

Kepada Yth :

Para Pihak yang bersangkutan/ berkepentingan dengan objek tanah yang terletak di lokasi Jalan Air Camar II RT 04, RW VII Nomor 4 A Padang a.n. ASMA ISMAEL di

Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan masih timbulnya permasalahan terhadap objek tanah sebagaimana tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Para Pihak yang merasa memiliki, bersangkutan, berkepentingan, dan bersengketa terhadap tanah dimaksud, dimohon untuk mengajukan keberatan pada :

PANITIA PENGUKURAN / PENGALIHAN KONVERSI  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) KOTA PADANG

Alamat : Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Padang, Telpon 22524.

Karena objek tanah tersebut telah didaftarkan dan teregistrasi untuk pengalihan atas hak a.n. , sebagai berikut :

Nama : ASMA ISMAEL  
Umur : 79 Tahun  
Alamat : Jalan Air Camar II Nomor 1 Padang

Objek tanah dimaksud telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memperoleh :

1. Surat Keterangan dari LURAH PARAK GADANG TIMUR dan persetujuan dan CAMAT PADANG TIMUR
2. Surat Persetujuan dari Kepala BPN , dengan Kode SALH tanggal 27 Juni 2006, Nomor Dokumen 02/PGT/19/ VI/2006



3. Izin persetujuan dan tanda tangan dari ahli waris kaum, sbg:

1. ASMA ISMAIL selaku Pemohon
2. NURMIMA dan anak – anak , terdiri dari:
  - a. Rita
  - b. Mis
  - c. Yuliza
3. Anak – anak Alm. ANIZAR, terdiri dari :
  - a. Roza Eka Putra
  - b. Yusra

4. ANWAR ST. RAJO SULAIMAN , selaku mamak Kepala Waris.

5. Saksi – Saksi , terdiri dari :

- a. Awaluddin Syam, selaku Ketua RT 04 RW VII
- b. Zakaria Zain

Sesuai agenda dari Pihak BPN Kota Padang , tanah tersebut akan diukur pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2006 oleh Juru Ukur BPN bernama Syafei. Dan selanjutnya akan ditinjau oleh PANITIA KONVERSI dari BPN Kota Padang , untuk menunggu gugatan dari Para Pihak yang berkepentingan selama 66 ( enam puluh enam hari ) terhitung bulan Juli s/d September 2006.

Seluruh administrasi dan pembiayaan sebesar Rp,661.500,- telah dibayarkan oleh Pemegang Kuasa

Demikianlah Pemberitahuan ini disampaikan untuk dimaklumi dan diketahui. Terima kasih.

Pemegang Kuasa  
Pengurusan Objek tanah bersangkutan,

MUZIRWAN,S.H

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Asisten Administrasi  
Dari : Kepala Biro Aparatur  
Tanggal : Mei 2006  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Nomor : 065/ /Apt-2006  
Perihal : **Bantuan Narasumber Pelatihan Bimtek Pengukuran Beban Kerja**

---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Nomor 061/502/Orgs/2006 tanggal 12 Mei 2006 perihal Permintaan tenaga Pembimbing Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan bagi Aparat Pemerintah Kota Sawahlunto, bersama ini ditugaskan Pejabat/ Pegawai pada Biro Aparatur dan Biro Pembangunan untuk menjadi Nara sumber, sebagai berikut :

Tim I :

9. Dra.Zulida Rivai , Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan - Penata Tk.I (III/d) , sebagai Ketua Tim.
  10. Muzirwan,S.H, Staf Sub Bagian Analisis Jabatan - Penata ( III/c), sebagai Anggota.
  11. Irpandri Chandra, Staf Sub Bagian Tata Usaha, Pengatur (II/c), sebagai Sopir.
- Selama 1 (satu) hari dari tanggal 29 s/d 30 Mei 2006

Tim II :

1. Armen,BA , Kepala Bagian Analisis Jabatan,Formasi dan Persyaratan Jabatan - Pembina Tk.I (IV/b) , sebagai Ketua Tim.
  2. Farida, Staf Sub Bagian Analisis Jabatan - Penata ( III/c), sebagai Anggota.
- Selama 1 (satu) hari dari tanggal 31 Mei 2006

Acara Bimtek tersebut diikuti oleh Pejabat/ Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yang bertempat di Gedung GOW Kota Sawahlunto.

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Belanja Administrasi Umum (BAU) Setda. Propinsi Sumatera Barat.

Sekiranya Bapak setuju mohon kiranya Bapak menanda tangani Surat Perintah Tugas terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih.

KEPALA BIRO APARATUR

**YUEN KARNOVA, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410010354

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Asisten Administrasi  
Dari : Kepala Biro Aparatur  
Tanggal : Mei 2006  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Nomor : 065/ /Apt-2006  
Perihal : **Bantuan Narasumber Pelatihan Bimtek Pengukuran Beban Kerja**

---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Nomor 061/502/Orgs/2006 tanggal 12 Mei 2006 perihal Permintaan tenaga Pembimbing Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan bagi Aparat Pemerintah Kota Sawahlunto, bersama ini ditugaskan Pejabat/ Pegawai pada Biro Aparatur dan Biro Pembangunan untuk menjadi Nara sumber, sebagai berikut :

Tim I :

12. Dra.Zulida Rivai , Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan - Penata Tk.I (III/d) , sebagai Ketua Tim.
  13. Muzirwan,S.H, Staf Sub Bagian Analisis Jabatan - Penata ( III/c), sebagai Anggota.
  14. Irpandri Chandra, Staf Sub Bagian Tata Usaha, Pengatur (II/c), sebagai Sopir.
- Selama 1 (satu) hari dari tanggal 29 s/d 30 Mei 2006

Tim II :

3. Armen,BA , Kepala Bagian Analisis Jabatan,Formasi dan Persyaratan Jabatan - Pembina Tk.I (IV/b) , sebagai Ketua Tim.
  4. Farida, Staf Sub Bagian Analisis Jabatan - Penata ( III/c), sebagai Anggota.
- Selama 1 (satu) hari dari tanggal 31 Mei 2006

Acara Bimtek tersebut diikuti oleh Pejabat/ Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yang bertempat di Gedung GOW Kota Sawahlunto.

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Belanja Administrasi Umum (BAU) Setda. Propinsi Sumatera Barat.

Sekiranya Bapak setuju mohon kiranya Bapak menanda tangani Surat Perintah Tugas terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih.

**KEPALA BIRO APARATUR**

**YUEN KARNOVA, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410010354

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat  
Dari : Plt. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat  
Tanggal : Juni 2006  
Lampiran : 1(satu ) ekspl.  
Sifat : Biasa  
Nomor : 065/ /Apt-2006  
Perihal : **Permintaan Personil Tim Eksternal Penilaian Draft SOTK Prop. Sumbar**

---

---

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Partnership Governance Reform in Indonesia dalam Program Perwujudan Reformasi Birokrasi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, diawali dengan kegiatan Seleksi dan Pembentukan SOTK yang akan dilaksanakan oleh Tim Eksternal.
- b. Tim Eksternal berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
  - 2 (dua) orang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam Negeri ( telah disurati oleh Pemimpin Kegiatan dengan Surat Nomor 065/800/Apt-2006 tanggal 31 Mei 2006.
  - 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah yang aktif dalam penyusunan rancangan SOTK , yaitu Sdr. :
    - 1). Drs.H.Yohannes Dahlan
    - 2). Yuen Karnova,SE
  - 5 (lima) Tim dari Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat dan Pamong senior, yaitu Sdr :
    - 1). Prof.Dr.Elfindri
    - 2). Prof.Dr.Helmi,M.Sc.
    - 3). Prof.Dr.Syamsul Amar
    - 4). Saldi Isra,SH,MPA
    - 5). Drs.H.Rusdi Lubis
- c. Kalau Bapak menyetujui usulan Personil tersebut di atas, akan kami tanda tangani Surat Permintaan Personil Tim Eksternal Penilaian Draft SOTK Prop. Sumbar (terlampir).  
Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

Drs.H. SULTANI WIRMAN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003660

Padang, 3 Juli 2006

Nomor : 065/ / Apt - 2006  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth :

Sdr. ....  
.....

di -

PADANG.

Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa Tim Penilai Rancangan SOTK Propinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Penilaian terhadap rancangan SOTK. Propinsi Sumatera Barat pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 4 Juli 2006  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB  
Tempat :

Diminta kehadiran Saudara untuk hadir pada acara dimaksud sebagai..... dengan harapan Saudara akan dapat memberikan kontribusi untuk penyempurnaan SOTK Propinsi Sumatera Barat

Atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

**Drs.H. YOHANNES DAHLAN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003662

**]DAFTAR : RENCANA PESERTA EKSPONEN PENILAIAN RANCANGAN SOTK.  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

---

No.	N a m a	Jabatan	Keterangan



Demikianlah disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA BARAT

Drs.H. SULTANI WIRMAN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003660

Padang, Juni 2006



Nomor : 065/ / Apt- 2006  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) ekspl.  
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth :  
Anggota Tim Lokal Program Manager  
Civil Service Reform Partnership  
di –  
PADANG.

Sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan rencana kerja kemitraan dalam rangka Reformasi Birokrasi, maka dalam pelaksanaan Program Manager Civil Service Reform Partnership, perlu dilakukan penyempurnaan susunan keanggotaan Tim Lokal. Untuk maksud tersebut, telah ditetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Lokal dengan Surat Tugas Gubernur Nomor 59/Print/GSB-2006 tanggal 26 Februari 2006.

Sehubungan dengan adanya perubahan dimaksud, maka kepada personil Tim Lokal yang sebelumnya telah dibentuk dengan Surat Sekda Nomor 711/Print/GSB-2005 tanggal 26 Desember 2005, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini.

Demikianlah disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA BARAT

Drs.H. SULTANI WIRMAN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 410003660

Padang, 15 Maret 2006

Nomor : 065/ / Apt- 2006  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:  
1. Sdr. Kepala Dinas .....

Perihal : **Permintaan Data  
Jabatan Fungsional**

2. Sdr. Kepala Badan .....
3. Sdr. Setwan. DPRD Prop. Sumbar
4. Sdr. Kepala Biro Setda.Prop. Sumbar
5. Sdr. Kepala Kantor .....  
di lingkungan Prop. Sumbar  
di –  
PADANG

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Sdr. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi , terdapat 96 (sembilan puluh enam ) jenis Jabatan Fungsional yang telah diatur dengan Keputusan MENPAN. Semenjak tahun 2003 sampai tahun 2005 telah diterbitkan SK. Gubernur untuk penetapan 48 jenis jabatan fungsional.Sedangkan rencana tahun 2006 ini akan diterbitkan lagi sebanyak 15 ( lima belas ) jenis jabatan fungsional.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk mengisi Formulir sebagaimana terlampir, yang terdiri atas :

- 1.**Formulir I** : untuk inventarisasi persediaan jabatan fungsional (jabatan yang ada sekarang ) dan perkiraan sementara kebutuhan jabatan fungsional.
- 2.**Formulir II**: merupakan data dasar untuk menghitung kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan Beban Kerja Instansi yang dilengkapi dengan petunjuk pengisian.

Formulir tersebut dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat C.q. Biro Aparatur, selambat - lambatnya telah diterima pada tanggal 4 April 2006.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA BARAT  
ASISTEN ADMINISTRASI

**DRS.H.YOHANES DAHLAN**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 410003662

## **FORMULIR I INVENTARIS JABATAN FUNGSIONAL**

No.	Jenis Jabatan Fungsional yang akan diterbitkan SK.Gubernur	Persediaan ( orang )	Perkiraan Kebutuhan ( orang )
1	2	3	4

1.	Teknik Pengairan		
2.	Teknik Jalan dan Jembatan		
3.	Teknik Tata Bangunan dan Pemukiman		
4.	Statistisi		
5.	Pranata Komputer		
6.	Penyuluh Agama		
7.	Pengawas Radiasi		
8.	Guru		
9.	Pengawas Sekolah		
10.	Pamong Belajar		
11.	Penilik		
12.	Widyaiswara		
13.	Operator Transmisi dan Sandi		
14.	Sandiman		
15.	Juru Penerangan		

File name : formulir inv jafung

## FORMULIR I INVENTARIS JABATAN FUNGSIONAL

INSTANSI : \_\_\_\_\_

No.	Jenis Jabatan Fungsional	Persediaan ( orang )	Perkiraan Kebutuhan ( orang )
1	2	3	4

--	--	--	--

**FORMULIR II**  
**DATA JABATAN FUNGSIONAL**

## URAIAN TUGAS DAN PENUGASAN

INSTANSI : \_\_\_\_\_

No.	Nama Jenis Jabatan Fungsional Dan Uraian Tugas	Jumlah Penugasan/Tahun (2002, 2003, dan 2004)	Waktu Yang Terpakai Untuk Tiap Penugasan
1	2	3	4

**Catatan :**

*Petunjuk pengisian disebelah.*

Pada hari Selasa (11/4) Gubernur Sumatera Barat ,H.Gamawan Fauzi,S.H melantik dan mengambil sumpah 46 pejabat eselon II dan 1 orang pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, yang bertempat di Aula Kantor

Gubernur Sumbar. Pelantikan ini merupakan yang pertama semenjak pasangan Gamawan Fauzi/Marlis Rahman dilantik pada tanggal 11 Agustus 2005 yang lalu.

Pelantikan yang dihadiri lebih kurang 500 orang pengunjung ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821.22/759/BKD-2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Dengan pelantikan ini sekaligus menjawab keraguan "tim work" pasangan Gamma . Karena lebih kurang 8 bulan setelah dilantik, Gubernur masih belum juga *memformat* pejabat yang akan membantu kerjanya. Dari berbagai komentar Gubernur semenjak dilantik,seharusnya pelantikan pejabat ini telah dimulai pada bulan Oktober 2005 lalu. Dalam sebuah kesempatan sebulan setelah dilantik Gubernur Gamawan mengatakan bahwa sampai bulan Oktober 2005 pejabat yang ada saat itu tidak akan diganti.Ini berarti pada bulan Oktober 2005 akan ada pelantikan,terutama dengan pensiunnya 2 orang pejabat yakni Drs.Basril Thaher dan Drs. Asrul Mas'ud, serta ditambah lowongnya jabatan Sekda Prop. Sumbar sejak bulan April 2005 lalu.

Sampai saat inipun jabatan Sekda Prop. Sumbar belum juga terisi, walaupun 3 orang calon Sekda definitif telah mengikuti fit and profer test pada tanggal 9 Maret 2006 di Departemen Dalam Negeri. Ketiga nama yang diusulkan adalah Drs.H.Yohanes Dahlan ( Asisten Administrasi Setda. ) , Drs.H.Sultani Wirman ( Plt.Sekda dan merangkap Asisten Pemerintahan ) dan Drs.H. Khairul ( Sekda ) Kota Bukittinggi. Namun dari rumor berkembang, pilihan akan jatuh pada Drs,.H.Yohanes Dahlan, yang merupakan mantan Ka.Biro Humas tahun 1999.

Jika ditilik satu persatu pada acara pelantikan ini banyak menjadi catatan yang perlu disorot.Dari 12 orang pejabat eselon II yang dinonjobkan, terdapat 7 orang menjadi Staf Khusus, yang kurang begitu jelas apa tugasnya, apakah masih berhak menggunakan eselon II, serta 5 orang berada dalam status pada BKD, yang diistilahkan dengan parkir.Ke 12 pejabat parkir diperkirakan karena peninggalan Gubernur lama, atau setidaknya ada kaitan tak langsung dengan Gubernur lama.Ada 1 orang pejabat yang menjadi misteri kenapa dinonjobkan, yakni Drs.H.Yulrizal Baharin, karena selama ini beliau nonblok.Beliau selama ini mempunyai reputasi jabatan yang lumayan cemerlang. Antara lain Asisten II Setda. Kota Padang, Kabiro Pemdes Setda.Prop.Sumbar, Asisten III Setda Sumbar, Asisten I , dan sempat menjabat Walikota Payakumbuh serta terakhir Kadinan Parsenibud. Pemprop. Sumbar. Dari segi usia perintis ide " Kembali Ke Nagari "ini terbilang muda baru berumur 49 tahun.Kita tidak tahu kenapa beliau sampai parkir'mudah-mudahan pada pelantikan selanjutnya Gubernur kembali memakai beliau.Sedangkan 4 orang pejabat lagi, mungkin akan dipakai Pemko.Padang untuk menduduki jabatan baru.

Dari pejabat yang dilantik ada hal yang perlu dikomentari, ada 3 orang mantan pejabat yang gagal pada Pilkada lampau, yakni Aliman Salim, Benny Muchtar dan Yumler Lahar, sedangkan pejabat yang pernah menjadi Penjabat Bupati dan Walikota antara lain O.S.Yerly Asir /Bukittinggi , Drs.Zambri/ Pasaman Barat, Marzuki Onmar/ Solok Selatan.

Dari dunia perguruan tinggi(Unand) ada 2 orang yang memegang jabatan yang cukup stragegis,Dr.Ir.James Helliward/Parsenibud, Dr.Ir.Rahmat Syahni,MS / Dinas Pendidikan,yakni Dinas yang memperoleh dana APBD Sumbar yang tertinggi.Terdapat 2 nama yang hampir bersamaan, yakni Ir. Fachri Syam dan Ir.H.Syahrial Syam, MS

## ***SURAT PERNYATAAN PERCERAIAN***

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOFRI YANTO

Umur : 28 tahun

Suku : Koto

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Tepi Bandar Blk. Tangsi Nomor 8 Padang

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2006 saya telah menceraikan Istri saya yang bernama :

Nama : DEBI MARGARETTA  
Umur : 32 tahun  
Pekerjaan : Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Ranah Binuang Nomor 26 Padang

Berhubung karena Istri saya telah minta cerai, oleh karena itu saya terima permintaan cerai tersebut . Dengan demikian telah sah saya menceraikannya (TALAK III).

Untuk selanjutnya segala sesuatu hal yang berkaitan dengannya, mulai hari ini tidak lagi menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah Surat Pernyataan Cerai ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari siapapun, untuk dapat dimaklumi oleh semua pihak.

Padang, 8 Mei 2006

Saya yang menyatakan,

NOFRI YANTO

SAKSI :

(AZWAR )

## ***SURAT KUASA***

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASMA ISMAEL  
Umur : 79 tahun  
Suku : Caniago  
Pekerjaan : Rumah tangga

Alamat : Jalan Air Camar II RT 04 RW VII Nomor 1 Padang

Dengan ini menyatakan memberikan kuasa dalam pengurusan surat menyurat sebidang tanah kaum saya yang terletak di Jalan Air Camar II RT 04,RW VII Nomor 4 A Padang , kepada :

Nama : MUZIRWAN,S.H

Umur : 39 tahun

Suku : Koto

Pekerjaan : PNS Kantor Gubernur

Alamat : Jalan Air Camar II RT 02 RW VII Nomor 15 A Padang

Berhubung yang bersangkutan adalah Penyewa tanah yang terletak pada lokasi tanah yang akan diurus tersebut, dan akan membeli tanah tersebut setelah selesainya hasil pengukuran dan diterbitkan GS ( Gambar Situasi ) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

Demikianlah Surat Kuasa ini untuk diketahui dan untuk dapat dimaklumi .

Padang, 23 Juni 2006

Saya yang menyatakan,

ASMA ISMAEL

## **BIO DATA**

**TIM PERSONIL EKSTERNAL PENILAIAN SOTK PEMERINTAH**



## **PROPINSI SUMATERA BARAT**

Nama : PROF. Dr.H. SYAMSUL AMAR  
NIP : 130  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang  
Alamat rumah: Jalan Linggarjati II Nomor 1 Tabing Padang  
Telpon rumah: 0751- 446336  
Nomor HP : 0816351630

## **BIO DATA**

**TIM PERSONIL EKSTERNAL PENILAIAN SOTK PEMERINTAH**

## **PROPINSI SUMATERA BARAT**

1. Nama : Drs.H. RUSDI LUBIS  
NIP : -  
Pangkat/Gol : Pembina Utama , IV/e  
Jabatan : Pensiunan PNS ( mantan Sekda Prop. Sumbar )  
Alamat rumah : Jalan Parak Kopi Alai I  
Telpon rumah : 0751-  
Nomor HP : 081166
  
2. Nama : SALDI ISRA,SH,MPA  
NIP : 132 137998  
Pangkat/Gol : Penata, III/c  
Jabatan : Dosen Jurusan Hukum Tata Negara  
Dosen Ilmu Hkum Program Pasca Sarjana, UNAND  
Alamat rumah : Jalan Aru, Kampung Tanjung RT 01,RW II Nomor 15 Lubuk  
Begalung, Padang  
Telpon rumah : 0751- 71281  
Nomor HP : 0812661953  
Informasi  
Lain : Menantu Ilhamdi Taufik,SH ( Dosen Hukum Unand )  
Tgl.lahir : Bukittinggi, 20 Agustus 1968  
Pendidikan : S.1 Hukum UNAND, S.2 Master Public Administration  
University Kuala Lumpur , Malaysia  
Aktifitas : Perintis dan Anggota Forum Peduli Sumatera Barat  
Penghargaan : BUNG HATTA AWARD
  
3. Nama : PROF. DR.H. ELFINDRI, SE,MA.  
NIP : 131 654 469  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi Unand, Dosen Magister Manajemen Program Pasca  
Sarjana, UNAND  
Alamat rumah : Jalan Parak Kopi II Nomor 12 Alai  
Telpon rumah: 0751- 40620, Kantor ( FE.UNAND, 71088 )  
0751- 71686 Program Pasca Sarjana UNAND  
Nomor HP : 08126600296  
Informasi :  
Lain :  
Tgl.lahir : Bukittinggi, 24 Nopember 1962  
Pendidikan : S.1 Fakultas Ekonomi Unand 1986, S.2 . POP & HDR University Flinders 1989,  
S.3 POP & HDR University Flinders Australia 1995  
Bidang Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
  
4. Nama : PROF.DR.IR. HELMI, M.Sc.  
NIP : 131 474 873

**Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d**  
**Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Unand Dosen Program Pasca Sarjana UNAND**  
**Alamat rumah : Jalan Belanti Indah Gang IV Nomor 8 Kec.Padang Utara**  
**Telpon rumah : 0751- 442579 , 0751- 71686 Program Pasca Sarjana UNAND**  
**Nomor HP : 08126604703**  
**Informasi :**  
**Lain :**  
**Pendidikan : S.1 Fakultas Teknik Unand 1986, S.2 . (M.Sc.)di Filipina , S.3 (P.Hd) di Inggris**  
**Disertasi : Agrarian Development**

**5. Nama : PROF. Dr.H. SYAMSUL AMAR**  
**NIP : 130**  
**Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d**  
**Jabatan : Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang**  
**Dosen Fakultas Ekonomi UNP Padang**  
**Alamat rumah : Jalan Linggarjati II Nomor 1 Tabing Padang**  
**Telpon rumah : 0751- 446336**  
**Nomor HP : 0816351630**

# BIO DATA

## TIM PERSONIL EKSTERNAL PENILAIAN SOTK PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

Nama : SALDI ISRA,SH,MPA  
NIP : 132 137998  
Pangkat/Gol : Penata, III/c  
Jabatan : Dosen Jurusan Hukum Tata Negara  
Dosen Ilmu Hkum Program Pasca Sarjana, UNAND  
Alamat rumah: Jalan Aru, Kampung Tanjung RT 01,RW II Nomor 15 Lubuk  
Begalung, Padang  
Telpon rumah: 0751- 71281  
Nomor HP : 0812661953  
Informasi  
Lain : Menantu Ilhamdi Taufik,SH ( Dosen Hukum Unand )  
Tgl.lahir : Bukittinggi, 20 Agustus 1968  
Pendidikan : S.1 Hukum UNAND, S.2 Master Public Administration  
University Kuala Lumpur , Malaysia  
Aktifitas : Perintis dan Anggota Forum Peduli Sumatera Barat  
Penghargaan: BUNG HATTA AWARD

# **BIO DATA**

## **TIM PERSONIL EKSTERNAL PENILAIAN SOTK PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Nama : PROF. DR.H. ELFINDRI, SE,MA.**  
**NIP : 131 654 469**  
**Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d**  
**Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi Unand**  
**Dosen Magister Manajemen Program Pasca Sarjana,**  
**UNAND**  
**Alamat rumah: Jalan Parak Kopi II Nomor 12 Alai**  
**Telpon rumah: 0751- 40620, Kantor ( FE.UNAND, 71088 )**  
**0751- 71686 Program Pasca Sarjana UNAND**  
**Nomor HP : 08126600296**  
**Informasi :**  
**Lain :**  
**Tgl.lahir : Bukittinggi, 24 Nopember 1962**  
**Pendidikan : S.1 Fakultas Ekonomi Unand 1986, S.2 . POP & HDR University**  
**Flinders 1989, S.3 POP & HDR University Flinders Australia 1995**  
**Bidang Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia**

**BIO DATA**

**TIM PERSONIL EKSTERNAL PENILAIAN SOTK PEMERINTAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Nama : PROF.DR.IR. HELMI, M.Sc.  
NIP : 131 474 873  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Unand  
Dosen Program Pasca Sarjana UNAND  
UNAND  
Alamat rumah: Jalan Belanti Indah Gang IV Nomor 8 Kec.Padang Utara  
Telpon rumah: 0751- 442579  
0751- 71686 Program Pasca Sarjana UNAND  
Nomor HP : 08126604703  
Informasi :  
Lain :  
Pendidikan : S.1 Fakultas Teknik Unand 1986, S.2 . (M.Sc.)di Filipina , S.3 (P.Hd) di  
Inggris  
Disertasi : Agrarian Development.

**BIO DATA**

**TIM PERSONIL EKSTERNAL PENILAIAN SOTK PEMERINTAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Nama : PROF. Dr.H. SYAMSUL AMAR  
NIP : 130  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang  
Alamat rumah: Jalan Linggarjati II Nomor 1 Tabing Padang  
Telpon rumah: 0751- 446336  
Nomor HP : 0816351630

**BIO DATA**

**TIM PERSONIL EKSTERNAL PENILAIAN SOTK PEMERINTAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Drs.H. RUSDI LUBIS  
NIP : -  
Pangkat/Gol : Pembina Utama , IV/e  
Jabatan : Pensiunan PNS ( mantan Sekda Prop. Sumbar )  
Alamat rumah: Jalan Parak Kopi Alai  
Telpon rumah: 0751-  
Nomor HP : 081166

**BIO DATA**



**TIM PERSONIL EKSTERNAL PENILAIAN SOTK PEMERINTAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Nama : SALDI ISRA,SH,MPA  
NIP : 132 137998  
Pangkat/Gol : Penata, III/c  
Jabatan : Dosen Jurusan Hukum Tata Negara  
Dosen Ilmu Hkum Program Pasca Sarjana, UNAND  
Alamat rumah: Jalan Aru, Kampung Tanjung RT 01,RW II Nomor 15 Lubuk  
Begalung, Padang  
Telpon rumah: 0751- 71281, 72258  
Nomor HP : 08126619853  
Informasi  
Lain : Menantu Ilhamdi Taufik,SH ( Dosen Hukum Unand )  
Tgl.lahir : Bukittinggi, 20 Agustus 1968  
Pendidikan : S.1 Hukum UNAND, S.2 Master Public Administration  
University Kuala Lumpur , Malaysia  
Aktifitas : Perintis dan Anggota Forum Peduli Sumatera Barat  
Penghargaan: BUNG HATTA AWARD

**BIO DATA**

**TIM PERSONIL EKSTERNAL PENILAIAN SOTK PEMERINTAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Nama : PROF. DR.H. ELFINDRI, SE,MA.  
NIP : 131 654 469  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi Unand  
Dosen Magister Manajemen Program Pasca Sarjana,  
UNAND  
Alamat rumah: Jalan Parak Kopi II Nomor 12 Alai  
Telpon rumah: 0751- 40620, Kantor ( FE.UNAND, 71088 )  
0751- 71686 Program Pasca Sarjana UNAND  
Nomor HP : 08126600296  
Informasi :  
Lain :  
Tgl.lahir : Bukittinggi, 24 Nopember 1962  
Pendidikan : S.1 Fakultas Ekonomi Unand 1986, S.2 . POP & HDR University  
Flinders 1989, S.3 POP & HDR University Flinders Australia 1995  
Bidang Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia

**BIO DATA**

**TIM PERSONIL EKSTERNAL PENILAIAN SOTK PEMERINTAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Nama : PROF.DR.IR. HELMI, M.Sc.**  
**NIP : 131 474 873**  
**Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d**  
**Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Unand**  
**Dosen Program Pasca Sarjana UNAND**  
**UNAND**  
**Alamat rumah: Jalan Belanti Indah Gang IV Nomor 8 Kec.Padang Utara**  
**Telpon rumah: 0751- 442579**  
**0751- 71686 Program Pasca Sarjana UNAND**  
**Nomor HP : 08126604703**  
**Informasi :**  
**Lain :**  
**Pendidikan : S.1 Fakultas Teknik Unand 1986, S.2 . (M.Sc.)di Filipina , S.3 (P.Hd) di**  
**Inggris**  
**Disertasi : Agrarian Development.**

**DAFTAR : NAMA - NAMA PERSONIL TIM EKSTERNAL PENILAIAN  
SOTK PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT RUMAH	NOMOR HP	NO.TELPON
1.	<b>Drs. H. RUSDI LUBIS</b>	Pamong Senior	Jl. Parak Kopi I. No. Alai	08126622722	0751- 7056235
2.	<b>Prof. DR. H. SYAMSUL AMAR</b>	Direktur PPs. UNP Padang	Jl.Linggarjati II Nomor 1 Tabing	0816351630	446336
3.	<b>Prof. DR. H. ELFINDRI, SE, MA</b>	Dosen PPs.	Jl.Parak Kopi II Nomor	08126600296	40620 (Rumah )

4.	<b>Prof. DR. Ir. HELMI, M.Sc</b>	UNAND Dosen PPs.UNAND	12 Alai Jl.Belanti Indah Gang IV Nomor 8	08126604703	71686 ( Kantor ) 442579 @ 71686/K
5.	<b>SALDI ISRA, SH, MPA.</b>	Dosen Hukum UNAND	Jl.Aru, Kampung Tanjung RT 01,RW II Nomor 15 Lubeg.	08126619853	71281 72258
6.	<b>Drs. ISMADI ANANDA, M.Si</b>	Asisten Deputi Evaluasi Kelembagaan MENPAN	Jakarta	08129290521	7398381 pesawat 2034
7.	<b>Drs. EDWARD SIGALINGGING, M.Si.</b>	Kepala Bagian Kelembagaan, Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri	Jakarta	08121948811	021-3454081 (K)
8.	<b>Drs. H. YOHANNES DAHLAN</b>	Sekda Prop. Sumbar	Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang (Kantor)	08126606855	
9.	<b>YUEN KARNOVA, SE</b>	Kepala Biro Aparatur	Wisma Linggar Jati No. 8 RT. 2 Kel. Perupuk Tabing	0811668464	0751 - 443490

Padang, Juni 2006

**JADWAL : NAMA – NAMA PENCERAMAH WIRID SUBUH SELAMA BULAN  
RAMADHAN TAHUN 2006 DI MASJID AL KAUTSAR AIR CAMAR – AUR -  
DURI KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR**

<b>No.</b>	<b>Hari</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nama Penceramah</b>	<b>No.Telpon/HP</b>
1	Minggu	24 September 2006	DASRIL DARWIS,S.Ag.	893073
2	Senin	25 September 2006	KHAIRUL ABRAR, S.Ag.	
3	Selasa	26 September 2006	H. BUKHARI ISMIRAT	62929
4	Rabu	27 September 2006	Drs. TASWIR TGK.RUMAH TINGGI	081374247068
5	Kamis	28 September 2006	TENGGU NASRUDDIN, S.Ag	
6	Jum'at	29 September 2006	Drs.AHMAD YANI SIREGAR	081363444018
7	Sabtu	30 September 2006	Drs.DJAMALIS RASYID	
8	Minggu	1 Oktober 2006	ZAINAL DT. CINTO KAYO	62929
9	Selasa	2 Oktober 2006	ISMAIL Sm.Hk.S.Sos.	30026
10	Selasa	3 Oktober 2006	DR.H.SYAMSUL BAHRI KHATIB	24324
11	Rabu	4 Oktober 2006	Drs.HAJUSNIR HUSIN	08126702160

12	Kamis	5 Oktober 2006	H. RISTAWARDI DT. MARAJO	
13	Jum'at	6 Oktober 2006	M.YUNIS CHATIB, BA	890149
14	Sabtu	7 Oktober 2006	MUNANDAR MASKA, S.Ag.	081363215661
15	Minggu	8 Oktober 2006	ASSAIDUL AKRAM, A.Pd.I	
16	Senin	9 Oktober 2006	M.AZIM, MS	
17	Selasa	10 Oktober 2006	DR.H.SYAMSUL BAHRI KHATIB	24324
18	Rabu	11 Oktober 2006	Dra.Hj.KHAIYARTI	62929
19	Kamis	12 Oktober 2006	H. RISTAWARDI DT. MARAJO	
20	Jum'at	13 Oktober 2006	Drs. AKMALUDDIN	08136334921
21	Sabtu	14 Oktober 2006	NOVIAR ADAM,S.Ag.	891673
22	Minggu	15 Oktober 2006	ZULKIFLI PETO ALAM,S.Iq.	
23	Senin	16 Oktober 2006	Drs.H.ABBAS ARIEF	
24	Selasa	17 Oktober 2006	H. BUKHARI ISMIRAT	62929
25	Rabu	18 Oktober 2006	Drs.H. MALDANIS	
26	Kamis	19 Oktober 2006	TENGGU NASRUDDIN,S.Ag.	
27	Jum'at	20 Oktober 2006	Drs.AHMAD YANI SIREGAR	081363444018
28	Sabtu	21 Oktober 2006	AGUSMAN PANDUKO SUTAN	
29	Minggu	22 Oktober 2006	Drs.HAJUSNIR HUSIN	08126702160

JADWAL : **NAMA - NAMA PENCERAMAH WIRID SUBUH SELAMA BULAN RAMADHAN TAHUN 2007 DI MASJID AL KAUTSAR AIR CAMAR - AUR DURI KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR**

<b>No.</b>	<b>Hari</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nama Penceramah</b>	<b>No.Telpon/HP</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kamis	13 September 2007		
2	Jum'at	14 September 2007		
3	Sabtu	15 September 2007		
4	Minggu	16 September 2007		
5	Senin	17 September 2007		
6	Selasa	18 September 2007		
7	Rabu	19 September 2007		



5	Minggu	16 September 2007		
6	Senin	17 September 2007		
7	Selasa	18 September 2007		
8	Rabu	19 September 2007		
9	Kamis	20 September 2007		
10	Jum'at	21 September 2007		
11	Sabtu	22 September 2007		
12	Minggu	23 September 2007		
13	Senin	24 September 2007		
14	Selasa	25 September 2007		
15	Rabu	26 September 2007		
16	Kamis	27 September 2007		
17	Jum'at	28 September 2007		
18	Sabtu	29 September 2007		
19	Minggu	30 September 2007		
20	Senin	1 Oktober 2007		
21	Selasa	2 Oktober 2007		
22	Rabu	3 Oktober 2007		
23	Kamis	4 Oktober 2007		
24	Jum'at	5 Oktober 2007		
25	Sabtu	6 Oktober 2007		
26	Minggu	7 Oktober 2007		
27	Senin	8 Oktober 2007		
28	Selasa	9 Oktober 2007		
29	Rabu	10 Oktober 2007		
30	Kamis	11 Oktober 2007		

**PENGURUS MASJID AL KAUTSAR  
AIR CAMAR – AUR DURI**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

Idul Fitri 1428 H. jatuh pada :

Hari : **Sabtu**  
Tanggal : **13 Oktober 2007**  
Pukul : **07.30 WIB**  
Tempat : Halaman  
Masjid Al Kautsar

**DEFRI NALDI**

**MUZIRWAN,S.H**



# MASJID AL KAUTSAR

Jalan Air Camar – Aur Duri Padang

**Air camar - Aur Duri**

Telpon 0751- 812397, 7810987,HP.08126622460

---

Padang, 23 Mei 2007

Nomor : /M.AK/PGT-V/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Tablik Akbar**

Kepada Yth :

1. Bapak /Ibu/Sdr. Pemuka Masyarakat Air Camar – Aur Duri
  2. Bapak/Ibu/ Sdr. Jamaah Masjid Al Kautsar
  3. Bapak/Ibu/ Sdr. Pengurus Masjid Al Kautsar
  4. Bapak/Ibu/ Sdr. Kaum Muslimin/ Muslimat Air Camar – Aur Duri
- di –

Padang.



Padang.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Seiring surat ini kami mendo'akan kepada Allah SWT. kiranya Bapak senantiasa berada dalam keadaan sehat wal'afiat dalam lindungan-Nya. Amien ya Rabbal 'Alamien.

Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak untuk berkenan hadir pada :

Hari : Minggu  
Tanggal : 1 April 2007 (13 Rabiul Awal 1428 H.)  
Waktu : Pukul 20.00 WIB ( sesudah sholat Isya )  
Tempat : Masjid Al Kautsar  
Acara : Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.  
Tahun 1428 H.  
Penceramah : **Drs.H. ASASRIWARNI, MA** ( Purek III IAIN Imam  
Bonjol Padang)

Besar harapan kami kiranya Bapak berkenan menghadiri acara dimaksud.

Atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENGURUS MASJID AL KAUTSAR  
AIR CAMAR – AUR DURI  
KETUA SEKRETARIS

**DEFRI NALDI**

**MUZIRWAN,S.H**

***Mengetahui :***

**Lurah Parak Gadang Timur**

**AZIAR AZIS,S.Sos.**

# MASJID AL KAUTSAR

## AIR CAMAR – AUR DURI

Jalan Air Camar – Aur Duri Padang

Telpon 0751- 812397, 7810987, HP.08126622460

---

Padang, 7 September 2007

Nomor : /M.AK/PGT-IX/2007  
Lampiran : 1 ( satu) lembar  
Perihal : **Mohon Bantuan**

Kepada Yth :  
Bapak / Ibu Ketua RT ..... RW .....  
Air Camar / Aur Duri / Aur Duri Baru \*/  
di –  
Padang.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Seiring salam di atas kami mendo'akan kepada Allah SWT. kiranya Bapak senantiasa berada dalam keadaan sehat wal'afiat dalam lindungan-Nya. Amien ya Rabbal 'Alamien.

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1428 H. kami akan mengintarisasi Nama - nama Anak Yatim dan Fakir Miskin yang ada di wilayah Bapak



**DEFRI NALDI**

**MUZIRWAN,S.H**

**PANITIA RAKORNIS ANALISA JABATAN SE SUMATERA BARAT**

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

WAKIL GUBERNUR

MARLIS RAHMAN

SEKRETARIS DAERAH

FIRDAUS. K, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.

Plt. SEKRETARIS DAERAH

**ASRUL SYUKUR**

Pembina Utama Muda  
NIP.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010078715



**GUBERNUR  
SUMATERA BARAT**

**GAMAWAN FAUZI**

**WAKIL GUBERNUR**

**MARLIS RAHMAN**

**SEKRETARIS DAERAH**

**H.FIRDAUS. K, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010077781

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**ASRUL SYUKUR**

Pembina Utama Muda  
NIP.010072648

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

**Drs.H. CHAIRUL DARWIS**

Pembina Utama Muda

NIP. 010078715

**KEPALA BIRO ORGANISASI**

**Ir.H. EDI ARADIAL**

Pembina Tk. I

NIP. 410008935

*File : Nota Dinas Muzirwan page 103*

**SEKRETARIS DAERAH**

**H.FIRDAUS. K, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 010077781

**SEKRETARIS DAERAH**

**H.FIRDAUS. K, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 010077781

## SEKRETARIS DAERAH

**H.FIRDAUS. K, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 010077781

**POLIKLINIK  
KANTOR GUBERNUR**

Nama KK : MUZIRWAN  
Umur : 40 TAHUN  
Alamat : Jl. Air Camar II  
Nomor 15 A  
Nomor Reg. : **90390**

**POLIKLINIK  
KANTOR GUBERNUR**

Nama KK : MUZIRWAN  
Umur : 40 TAHUN  
Alamat : Jl. Air Camar II  
Nomor 15 A  
Nomor Reg. : **90390**

**POLIKLINIK**

**KANTOR GUBERNUR**

Nama KK : MUZIRWAN

Umur : 40 TAHUN

Alamat : Jl. Air Camar II  
Nomor 15 A

Nomor Reg. : **90390**